



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 perlu dilakukan perubahan sebagai akibat adanya penyesuaian substansi peraturan daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan terdapat perubahan materi Peraturan Daerah terkait dengan kebijakan nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6 Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2015

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman (RPJMD) Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Tahun 2011-2015 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Pasal 240 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Tahun 2011-2015 dilakukan pengendalian dan evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015, RPJMD Tahun 2011-2015 perlu dilakukan perubahan sebagai akibat adanya penyesuaian substansi peraturan daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan terdapat perubahan materi Peraturan Daerah terkait dengan kebijakan nasional.

Materi Muatan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi didasarkan pada pertimbangan:

1. menyesuaikan arah kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;
2. menyesuaikan prediksi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini;
3. mencantumkan prinsip inovasi sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
4. mencantumkan prakiraan kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2015 per tahun per program sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Tahun 2011-2015;
5. menyesuaikan nomenklatur organisasi perangkat daerah dengan kondisi terkini;
6. memperjelas definisi setiap pernyataan indikator kinerja daerah;
7. mengintegrasikan indikator SPM dan indikator MDGs dalam indikator kinerja daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja daerah dengan perkembangan hasil pembangunan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RPJMD Tahun 2011-2015 sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal II

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 85 a

Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2011-2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah Kabupaten Sleman memandang perlu untuk melakukan antisipasi pada setiap tahap pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan

Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RPJMD Tahun 2011-2015 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28

- Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

1.3 LATAR BELAKANG PERUBAHAN

1. Menyesuaikan arah kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;
2. Menyesuaikan prediksi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini;
3. Mencantumkan prinsip inovasi sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
4. Mencantumkan prakiraan kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2015 per tahun per program sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Tahun 2011-2015;

5. Menyesuaikan nomenklatur organisasi perangkat daerah dengan kondisi terkini;
6. Memperjelas definisi setiap pernyataan indikator kinerja daerah;
7. Mengintegrasikan indikator SPM dan indikator MDGs dalam indikator kinerja daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja daerah dengan perkembangan hasil pembangunan.

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.4.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

1.4.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2011-2015 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2011-2015, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2006-2025.

1.4.3. Hubungan RPJMD dan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan

lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sleman.

1.4.4. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman.

1.4.5. Hubungan RPJMD dengan RKPD

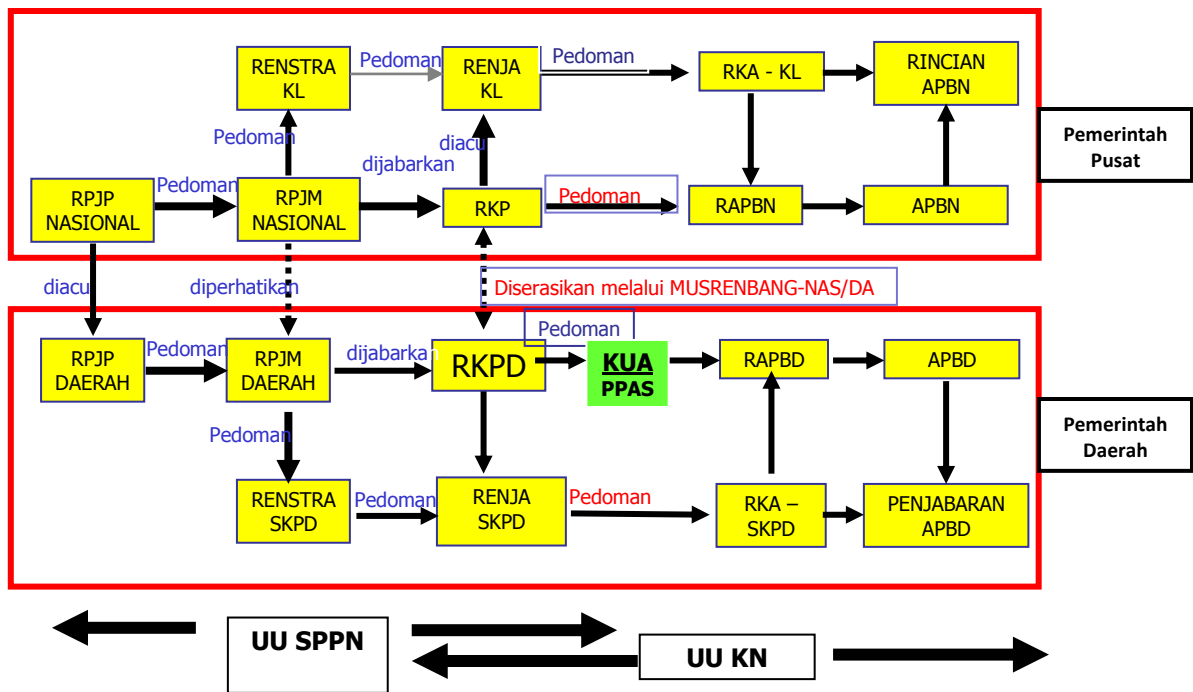
Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.

Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah terpilih yang diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJPD.

1.5.1. Sistematika Penulisan

RPJMD Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah,

Berisi tentang kondisi fisik, perekonomian daerah, sosial budaya, prasarana dan sarana, dan pemerintahan umum.

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan,

Berisi tentang pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah, dan kebijakan umum anggaran.

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

Berisi tentang rumusan permasalahan, isu strategis dan proyeksi pada setiap urusan yang dikelompokkan ke dalam 9 fungsi.

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berisi tentang dasar filosofis, visi, misi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari tujuan dan sasaran.

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tentang strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Berisi kebijakan umum, dan program pembangunan.

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Berisi tentang rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selama 5 tahun.

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Berisi tentang penetapan indikator kinerja daerah menurut sasaran strategis, indikator dan capaian kinerja pembangunan makro daerah serta indikator dan capaian kinerja menurut misi.

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Berisi kaidah-kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

1.6.1. Maksud

Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan.

RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.6.2. Tujuan

RPJMD disusun dengan tujuan untuk:

1. Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
2. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. SEJARAH SINGKAT KABUPATEN SLEMAN

Periode Kasultanan Yogyakarta hingga lahirnya RI

Pada masa Kasultanan Yogyakarta tepatnya di tahun 1916, terjadi reorganisasi wilayah Kasultanan Yogyakarta (Mataram) yang dituangkan pada Rijktsblad No. 11 tahun 1916. Dalam Rijktsblad tersebut disebutkan bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi Kabupaten Kalasan, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sulaiman (yang saat ini disebut Sleman), yang dikepalai oleh seorang bupati. Keberadaan kabupaten tersebut secara hierarkhis membawahi distrik dan dikepalai oleh panji.

Kabupaten Sulaiman terbagi dalam 4 distrik yakni : 1 distrik Mlati yang terbagi dalam 5 onderdistrik dan 46 kalurahan, 2. Distrik Klegung terbagi dalam 6 onderdistrik dan 52 kalurahan, 3. Distrik Jumeneng terbagi dalam 6 onderdistrik dan 58 kalurahan, 4. Distrik Godean terbagi dalam 8 onderdistrik dan 55 kalurahan. Di Kasultanan Yogyakarta juga dibentuk Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kota serta Kabupaten Kulon Progo.

Pada periode ini, Kabupaten Sleman mengalami berbagai perubahan status dan herarki pemerintahan, mulai dari Kabupaten, berubah menjadi distrik dan menjadi salah satu distrik di Kabupaten Yogyakarta, berubah menjadi kawedanan. Pada tahun 1945 wilayah Sleman kembali menjadi sebuah kabupaten.

Pasang surut hirarki pemerintahan tersebut, tidak terlepas dari konstelasi politik nasional, yang pada saat itu terjadi pengalihan kekuasaan nasional dari Pemerintah Hindia Belanda, kepada Jepang, dan akhirnya kepada Pemerintah RI. Raja Yogyakarta pada saat itu, Sultan Hamengkubuwono IX, berupaya mereformasi birokrasi pemerintahan Yogyakarta, yang juga berimbas pada perubahan status dan hierarki pemerintah kabupaten dan kota.

Periode Tahun 1945 – 1947

Dengan dijadikannya kembali Sleman sebagai kabupaten, wilayah Sleman terdiri dari 17 kapanewon (Son) yang meliputi 258 kalurahan (Ku). Untuk kedua kalinya ibukota Kabupaten Sleman adalah ibukota

lama yakni di wilayah Sleman Utara, yang sekarang Triharjo, Kecamatan Sleman. Bupati yang menjabat pada masa ini adalah Pringgodingrat.

Periode Tahun 1947 – 1964

Bupati Sleman KRT. Pringgodingrat pada tahun 1947 memindahkan pusat pelayanan kabupaten ke Ambarukmo, di petilasan Dalem serta bekas pusat pendidikan perwira polisi yang pertama di Indonesia. Pada tahun yang sama Bupati KRT. Pringgodingrat diganti oleh KRT. Projodiningrat.

Pada tahun 1950 Bupati KRT. Projodiningrat diganti oleh KRT. Diponingrat. Jabatan tersebut dijabat hingga pada tahun 1955, selanjutnya digantikan oleh KRT. Prawiradiningrat yang menjabat hingga tahun 1959. Pada masa pemerintahan ini terdapat peraturan Departemen Dalam Negeri, bahwa tiap-tiap Kabupaten selain memiliki seorang bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pegawai kementerian Dalam Negeri, juga harus ada kepala daerah yang dipilih legislatif (DPRD). Pada masa ini yang terpilih menjadi Kepala Daerah Swatantra adalah Buchori S. Pranotohadi. Pemerintah Kabupaten dengan 2 kepala daerah berlangsung hanya sampai tahun 1959. Sejak tahun 1959 tersebut pemerintahan Kabupaten Sleman kembali dikepalai oleh seorang bupati/kepala daerah. Bupati yang menjabat pada masa ini adalah KRT. Murdodiningrat.

Periode Tahun 1964 – 1985

KRT. Murdodiningrat pada tahun 1964, memindahkan pusat pemerintahan dari Ambarukmo ke Dusun Beran, Desa Tridadi Kecamatan Sleman. Pada saat itulah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman memiliki lambang daerah.

Pada tahun 1974 KRT. Murdodiningrat digantikan oleh KRT Tedjo Hadiningrat. Masa jabatan KRT. Tedjo Hadiningrat hanya berlangsung selama 3 bulan, karena KRT Tedjo Hadiningrat mengalami sakit sehingga tidak dapat menjalankan tugas selaku Bupati, kemudian digantikan oleh Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat yang menjabat 2 periode dari tahun 1974 hingga tahun 1985. Pada masa kepemimpinan Drs. KRT. H. Prodjosuyoto ini, Sleman berhasil mendapatkan anugerah tanda kehormatan atas hasil karya tertinggi dalam melaksanakan pembangunan kala itu, berupa Parasamya Purna Karya Nugraha, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 045/TK/

Tahun 1979. Nama penghargaan ini kemudian diabadikan menjadi nama Jalan utama Kantor Bupati/Setda serta nama Pendopo di Sekretariat Daerah.

Periode Tahun 1985 – 1990

Pada tahun 1985, Drs.KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat, digantikan oleh Drs. Samirin selama satu periode dari tahun 1985-1990. Walaupun hanya satu periode, namun berbagai hasil-hasil pembangunan masa kepemimpinan Drs. Samirin yang memiliki manfaat besar hingga saat ini. Berbagai hasil-hasil pembangunan tersebut antara lain:

- Pembangunan dan pengembangan Kampus IAIN (UIN Sunan Kalijaga), UII, UPN, Universitas Sanata Dharma, dan STIPER ke wilayah Kecamatan Depok Sleman;
- Pembangunan jembatan yang menghubungkan Yogyakarta, Godean, dan Dekso;
- Pembangunan Pasar Prambanan, Tempel, dan Gamping;
- Memprakarsai pembangunan Ring Road Utara;
- Mengembangkan Koperasi Pemuda sebagai Koperasi angkutan pedesaan dan perkotaan;
- Pembangunan Terminal Jombor dan Condongcatur;
- Pembangunan Masjid Agung "Dr. Soediro Hoesodo".

Periode Tahun 1990 – 2000

Menggantikan Drs. Samirin, dilantik Drs. H. Arifin Ilyas sebagai Bupati KDH. Tk. II Sleman pada tanggal 11 Agustus 1990. Pada masa jabatan tersebut tepatnya pada tahun 1994 Kantor Sekretariat Daerah yang sekaligus merupakan Kantor Bupati menempati gedung baru yang berhadapan dengan gedung DPRD hingga sekarang.

Pada tanggal 11 Agustus 1995, Drs. H. Arifin Ilyas dilantik kembali sebagai Bupati KDH. Tk. II Sleman untuk yang kedua kalinya. Berbagai prestasi dan hasil pembangunan yang diraih waktu itu antara lain:

- Penghargaan Adipura Tahun 1993 dan Tahun 1994;
- Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai daerah percontohan Otonomi Daerah;
- Pemberdayaan PKK Kab. Sleman;
- Penetapan Slogan 'Sleman Sembada', Mars Sleman Sembada;
- Penetapan motif batik Sleman Sembada dan penggunaan seragam pegawai dengan batik Sleman Sembada;

- Penetapan Salak Pondoh dan Burung Punglor sebagai flora dan fauna identitas Kabupaten Sleman;
- Gerakan sengonisasi untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis;
- Perintisan pengaspalan jalan padukuhan dengan pemberian bantuan aspal sebagai stimulan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman;

Periode Tahun 2000 – 2010

Pada tahun 2000, Drs. H. Arifin Ilyas diganti oleh Drs. Ibnu Subiyanto, Akt sebagai Bupati dan Zaelani sebagai wakil bupati untuk masa jabatan 2000-2005. Pada masa jabatan inilah untuk pertama kalinya jabatan kepala daerah tingkat II dijabat oleh bupati dan wakil bupati. Pada masa jabatan tersebut Bupati Sleman Drs. Ibnu Subiyanto, Akt melaksanakan pembangunan gedung-gedung perkantoran baru sehingga kegiatan pemerintahan dapat dilakukan dalam satu kompleks di Beran.

Melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, Drs. Ibnu Subiyanto kembali terpilih sebagai bupati periode 2005-2010 dengan wakil bupati Sri Purnomo. Periode ini ditandai dengan terjadinya musibah gempa bumi pada hari Sabtu, 27 Mei 2006, pukul 05.53 WIB, berkekuatan 5,9 SR dengan pusat gempa 38 km selatan Yogyakarta di kedalaman 33 km di bawah muka air laut.

Gempa Bumi ini telah menyebabkan 21.217 unit bangunan rumah tempat tinggal maupun prasarana publik mengalami rusak parah bahkan roboh. Sedangkan korban jiwa tercatat, untuk korban meninggal sebanyak 264 jiwa, luka berat sebanyak 672 jiwa, luka sedang dan ringan sebanyak 3099 jiwa. Secara nominal kerusakan dan kerugian terjadi mencapai kurang lebih Rp 952,15 M.

Selain musibah gempa bumi, pada tanggal 15 Juni 2006, juga terjadi erupsi Gunungapi Merapi. Erupsi ini telah menyebabkan 4 orang meninggal dunia, serta terkuburnya area wisata Kali Adem Cangkringan dengan material / lahar merapi.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Drs. Ibnu Subiyanto diantaranya adalah :

- Mengawali penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis kinerja;
- Penerapan audit keuangan daerah oleh BPK pada tahun 2010

- dengan hasil WDP (Wajar Dengan Pengecualian);
- Pembangunan stadion Maguwoharjo;
 - Pengembangan kawasan perekonomian Seturan;
 - Pembangunan dan penataan kawasan Selokan Mataram serta jalan penghubung antara Jalan Nyi Condrolukito (Monjali) dengan Jalan Affandi;
 - Membangun Taman Pemakaman Umum (TPU) di Seyegan;
 - Menstandarisasi gedung-gedung Puskesmas, Kecamatan, serta gedung-gedung kantor pemerintahan yang lain;
 - Memberikan nama jalan-jalan utama di Sleman dengan nama-nama tokoh atau maestro seperti Jalan Affandi Jl. Condro Lukito, Jl. Pronggodiningrat;
 - Memfungsikan kecamatan sebagai pusat pengembangan budaya, selain sebagai pusat pelayanan pemerintahan.

Periode 2010-sekarang

Setelah masa jabatannya berakhir, Drs. Ibnu Subiyanto di gantikan oleh Drs. H. Sri Purnomo, MSI yang terpilih sebagai bupati dengan didampingi Hj. Yuni Satia Rahayu, SS. M.Hum sebagai wakil Bupati masa jabatan 2010-2015. Pada awal masa jabatannya dihadapkan pada pekerjaan besar yakni penanganan Bencana Alam Erupsi Merapi yang terjadi pada tanggal 25 Oktober hingga 5 November 2010.

Erupsi Gunung Merapi tersebut, telah memporak porandakan 31 dusun di wilayah Cangkringan dan sempat menghentikan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pada radius 20 km dari puncak merapi selama 15 hari yang sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bencana erupsi Gunung Merapi telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 298 jiwa dan 2.613 KK penduduk kehilangan rumah tinggal.

Secara nominal kerusakan dan kerugian terjadi mencapai kurang lebih Rp5,4 triliun yang terdiri adalah; bidang perumahan sebesar Rp477 milyar, bidang infrastruktur sebesar Rp224 milyar, bidang sosial sebesar Rp49 milyar, bidang ekonomi sebesar Rp1,26 triliun dan bidang lintas sektor sebesar Rp3,39 triliun. Selain itu, kerugian dan kerusakan yang diakibatkan bencana sekundernya yakni banjir lahar dingin mencapai kurang lebih Rp40 milyar.

2.2. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.2.1. Karakteristik Wilayah

2.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah administrasi

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km². Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi
Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Padukuhan	
1.	Moyudan	4	65	2.762
2.	Minggir	5	68	2.727
3.	Seyegan	5	67	2.663
4.	Godean	7	77	2.684
5.	Gamping	5	59	2.925
6.	Mlati	5	74	2.852
7.	Depok	3	58	3.555
8.	Berbah	4	58	2.299
9.	Prambanan	6	68	4.135
10.	Kalasan	4	80	3.584
11.	Ngemplak	5	82	3.571
12.	Ngaglik	6	87	3.852
13.	Sleman	5	83	3.132
14.	Tempel	8	110	3.249
15.	Turi	4	42	4.309
16.	Pakem	5	61	4.384
17.	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, 2012

2.2.1.2 Letak dan kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110°12'57" sampai dengan 110°32'48" Bujur Timur dan 7°32'28" sampai dengan 7°50'11" Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2.1.3 Topografi

Kadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng gunung Merapi relatif terjal.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian <100 meter, 100-499 meter, 500-999 meter, dan >1.000 meter dpl. Ketinggian <100 m dpl seluas 6.203 ha, atau 10,79% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Berbah, dan Prambanan.

Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian 500-999 m dpl meliputi luas 6.538 ha, atau 11,38% dari luas wilayah, ditemui di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian >1.000 m dpl seluas 1.495 ha, atau 2,60% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian wilayah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	<100 m dpl (ha)	100-499 m dpl (ha)	500-999 m dpl (ha)	>1.000 m dpl (ha)	Jumlah (Ha)
1.	Moyudan	2.407	355	-	-	2.762
2.	Minggir	357	2.370	-	-	2.727

No	Kecamatan	<100 m dpl (ha)	100-499 m dpl (ha)	500-999 m dpl (ha)	>1.000 m dpl (ha)	Jumlah (Ha)
3.	Godean	209	2.475	-	-	2.684
4.	Seyegan	-	2.663	-	-	2.633
5.	Tempel	-	3.172	77	-	3.249
6.	Gamping	1.348	1.577	-	-	2.925
7.	Mlati	-	2.852	-	-	2.852
8.	Sleman	-	3.132	-	-	3.132
9.	Turi	-	2.076	2.155	78	4.039
10.	Pakem	-	1.664	1.498	1.222	4.384
11.	Ngaglik	-	3.852	-	-	3.852
12.	Depok	-	3.555	-	-	3.555
13.	Kalasan	-	3.584	-	-	3.584
14.	Berbah	1.447	852	-	-	2.299
15.	Prambanan	435	3.700	-	-	4.135
16.	Ngemplak	-	3.571	-	-	3.571
17.	Cangkringan	-	1.796	2.808	195	4.799
	Jumlah	6.203	43.246	6.538	1.495	57.482
	Prosentase	10,79	75,32	11,38	2,60	100

Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sleman, 2012

2.2.1.4 Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah.

Material vulkanik gunung Merapi yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik Merapi muda. Material vulkanik Merapi muda ini dibedakan menjadi 2 unit formasi geologi yaitu formasi Sleman (lebih di dominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan formasi Yogyakarta (lebih di dominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di bagian atas. Formasi Yogyakarta dan formasi Sleman ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan membentuk satu sistem akifer yang di sebut Sistem Akifer Merapi (SAM). Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Jenis tanah di Kabupaten Sleman terbagi menjadi litosol, regusol, grumosol, dan mediteran. Sebagian besar di wilayah Sleman didominasi

jenis tanah regosol sebesar 49.262 ha (85,69%), mediteran 3.851 ha (6,69%), litosol 2.317 ha (4,03%), dan grumusol 1.746 ha (3,03%), jenis tanah di Kabupaten Sleman selengkapnya seperti terlihat pada tabel 2.3:

Tabel 2.3
Jenis Tanah di Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Litosol	Regosol	Grumusol	Mediteran	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Moyudan	-	584	808	1.370	2.762
2.	Minggir	-	558	606	1.563	2.727
3.	Seyegan	-	2.187	8	468	2.663
4.	Godean	-	2.018	216	450	2.684
5.	Gamping	-	2.817	108	-	2.925
6.	Mlati	-	2.582	-	-	2.852
7.	Depok	-	3.555	-	-	3.555
8.	Berbah	-	2.299	-	-	2.299
9.	Prambanan	2.155	1.980	-	-	4.135
10.	Kalasan	162	3.422	-	-	3.584
11.	Ngemplak	-	3.571	-	-	3.571
12.	Ngaglik	-	3.852	-	-	3.852
13.	Sleman	-	3.132	-	-	3.132
14.	Tempel	-	3.249	-	-	3.249
15.	Turi	-	4.309	-	-	4.309
16.	Pakem	-	4.348	-	-	4.348
17.	Cangkringan	-	4.799	-	-	4.799
	Jumlah	2.317	49.262	1.746	3.851	57.482
	Prosentase	4,03	85,69	3,03	6,69	100

Sumber: Sistim Informasi Profil Daerah Tahun 2012

2.2.1.5 Hidrologi

Air tanah Merapi yang mengalir di bawah permukaan secara rembesan bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh topografi, rekahan atau patahan maka akan muncul mata air. Di Kabupaten Sleman terdapat 4 jalur mata air (*springbelt*) yaitu: jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mata air ini telah banyak dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupun irigasi.

Di Kabupaten Sleman terdapat 182 sumber mata air yang terukur debitnya mulai dari 1 s/d 400 lt/detik, yang airnya mengalir ke sungai-sungai utama yaitu sungai Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Di samping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia.

2.2.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah, hari hujan terbanyak dalam satu bulan 25 hari.

Kecepatan angin maksimum 6,00 knots dan minimum 3,00 knots, rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 97,0% dan terendah 28,0%. Temperatur udara tertinggi 32° C dan terendah 24° C.

Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

2.2.2 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan di Kabupaten Sleman untuk sawah, tegalan, pekarangan dan lain-lain. Perkembangan penggunaan lahan selama 3 tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata per tahun sebesar 0,11%, luas pekarangan naik 0,10%, luas tegalan turun 0,11% dan untuk penggunaan lainnya naik 0,08%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.a
Penggunaan Lahan Di Kabupaten Sleman

No	TAHUN	PENGUNAAN LAHAN (Ha.)		
		SAWAH	TEGAL	PEKARANGAN
1	2009	22.914	6.190	11.047
2	2010	22.819	6.197	10.446
3	2011	22.786	6.154	10.470
4	2012	24.665	5.036	19.201

2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi beberapa kawasan antara lain :

2.2.3.1 Kawasan peruntukan pertanian;

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah (21.113 hektar) dan kawasan pertanian lahan kering (9.117 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.

2.2.3.2 Kawasan peruntukan pertambangan;

- Batu kapur di Kecamatan Gamping;
- Breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;

- Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean, Seyegan, dan Prambanan;
- Tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman, Gamping, Prambanan, dan Berbah;
- Pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman.

2.2.3.3 Kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan industri meliputi lahan seluas 299 hektar di Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan

2.2.3.4 Kawasan permukiman;

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perdesaan (10.232 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.

2.2.3.5 Kawasan peruntukan pariwisata;

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi tema wisata alam, tema wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian.

2.2.3.6 Kawasan hutan;

Kawasan hutan meliputi kawasan hutan rakyat (3.171 hektar) di Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan.

2.2.3.7 Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :

- Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;
- Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan
- Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah.

2.2.4 Kawasan Rawan Bencana Alam

Wilayah kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sleman terdiri dari :

1. kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 3.303 ha (tiga ribu tiga ratus tiga hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Gamping, dan
 - b. Kecamatan Prambanan.
2. kawasan rawan kekeringan seluas 1.969 ha (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan Prambanan.

2.2.5 Kawasan Lindung Geologi

1. Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan bencana Gunungapi;

- b. Kawasan rawan gempa bumi.
2. Kawasan Rawan Bencana Gunungapi meliputi:
 - a. Area terdampak langsung letusan Merapi 2010 seluas \pm 1.578 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Pakem, dan Cangkringan;
 - b. Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas \pm 3.302 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Turi, Pakem, dan Cangkringan;
 - c. Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas \pm 3.279 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan;
 - d. Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas 1.357 ha meliputi Kecamatan Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Tempel, Pakem, dan Cangkringan.
3. Kawasan Rawan Gempa Bumi seluas kurang lebih 13.782 ha tersebar di seluruh kecamatan.

2.2.6 Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Sleman tercatat 1.126.888 jiwa, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2011 bertambah 33.778 orang atau 2,99% yaitu dari 1.093.110 orang pada Tahun 2010 menjadi 1.126.888 orang pada akhir tahun 2011. Dan dari tahun 2011 bertambah 9.714 orang atau 0,85% yaitu dari 1.126.602 orang pada tahun 2011 menjadi 1.136.602 orang pada akhir tahun 2012. Selengkapnya seperti pada tabel 2.4:

Tabel 2.4
Banyaknya Penduduk
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman

No	Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2008	524.722	50,44	515.498	49,56	1.040.220
2	2009	527.339	51,00	526.192	49,00	1.053.531
3	2010	547.885	50,12	545.225	49,88	1.093.110
4	2011	560.146	49,70	566.742	50,30	1.126.888
5	2012	564.978	49,71	571.624	50,29	1.136.602

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2012

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman jika dilihat dari 3 tahun terakhir rata-rata sebesar 1,53%. Pertumbuhan ini relatif tinggi, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Jogjakarta, sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan

daerah pengembangan pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan oleh tingkat kelahiran yang tinggi.

Jumlah kepala keluarga mengalami kenaikan sebanyak 10.008 KK (1,314%) dari 303.201 KK pada tahun 2010 menjadi 315.445 KK pada tahun 2012. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 3,29 jiwa per rumah tangga. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5:

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2008-2012 di Kabupaten Sleman

No	Jenis Data	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%/th)	1,31	1,28	1,92	1,36	1,31
2.	Banyaknya Kepala Keluarga (KK)	255.555	293.897	303.301	313.309	315.445
3.	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (orang)	3,37	3,8	3,15	3,29	3,60

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2012

Berdasarkan struktur umur penduduk Tahun 2010, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 21,84%, penduduk usia 15-60 tahun sebesar 67,59%, sementara penduduk usia di atas 60 tahun sebesar 10,56%.

Berdasarkan struktur umur penduduk Tahun 2011, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 19,22%, penduduk usia 15-60 tahun sebesar 70,63%, sementara penduduk usia di atas 60 tahun sebesar 6,46%.

Berdasarkan struktur umur penduduk Tahun 2012, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 19,75%, penduduk usia 15-60 tahun sebesar 67,18%, sementara penduduk usia di atas 60 tahun sebesar 13,85%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dan 2.7:

Tabel 2.6
Penduduk Laki-laki Berdasarkan Umur
Tahun 2008-2012

Kelompok Umur	2008	2009	2010	2011	2012
0-4	36,368	38,050	43,026	32.845	32.323
5-9	37,743	39,581	40,796	38.820	38.153
10-14	35,369	31,990	39,023	40.234	40.741
15-19	48,023	59,182	49,077	37.500	37.838
20-24	79,692	61,155	63,847	37.158	37.271
25-29	52,840	51,822	49,907	49.773	45.912
30-34	43,110	54,858	44,877	55.976	57.220
35-39	37,365	33,722	41,678	51.451	51.762

Kelompok Umur	2008	2009	2010	2011	2012
40-44	33,734	37,810	39,906	48.387	49.619
45-49	27,153	27,767	32,319	39.479	41.009
50-54	19,892	28,530	28,810	32.827	33.830
55-59	18,938	18,361	22,280	26.942	27.655
60+	54,497	48,595	52,339	34.053	71.644
JUMLAH	524,724	531,423	547,885	560.146	564.978

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2012

Tabel 2.7
Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
Tahun 2008-2012

Kelompok Umur	2008	2009	2010	2011	2012
0-4	34,994	30,141	40.549	30.974	32.575
5-9	35,662	32,962	38.582	36.392	35.704
10-14	34,015	25,675	36.756	37.401	37.964
15-19	47,259	52,144	48.273	35.353	35.146
20-24	68,603	55,334	55.972	36.387	36.643
25-29	47,643	48,064	46.887	50.089	46.868
30-34	43,625	61,133	44.608	54.880	56.102
35-39	39,111	37,013	41.774	51.704	51.799
40-44	34,332	33,040	41.199	48.413	49.655
45-49	26,485	35,450	34.858	40.393	41.342
50-54	21,895	31,876	30.390	34.401	35.771
55-59	19,365	21,926	22.249	26.948	28.202
60+	62.506	57.386	63.128	37.957	85.854
JUMLAH	515,495	522,144	545.225	566.742	571.624

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2012

2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (Hk) tahun 2010-2012 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,20% yaitu dari Rp 6.373,2 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 7.069,22 milyar pada tahun 2012. Selama tahun 2010-2012, empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga

konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8:

Tabel 2.8
PDRB dan Distribusi Persentase PDRB
Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan 2000
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

NO	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012*)	
		(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%
1	Pertanian	987.480	16,91	1.004.808	16,47	1.001.698	15,72	979.024	14,60	1.019.264	14,42
2	Pertambangan & Penggalian	30.372	0,52	28.901	0,47	33.304	0,52	38.084	0,57	38.636	0,55
3	Industri Pengolahan	904.474	15,49	921.892	15,11	950.029	14,91	1.010.358	15,07	1.005.640	14,23
4	Listrik, Gas & Air Bersih	52.789	0,90	56.066	0,92	58.768	0,92	61.282	0,91	65.150	0,92
5	Bangunan	642.538	11,01	684.367	11,22	729.456	11,45	780.153	11,64	827.196	11,70
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.276.918	21,87	1.359.722	22,29	1.436.205	22,54	1.526.308	22,77	1.636.136	23,14
7	Pengangkutan & Komunikasi	339.243	5,81	361.363	5,92	384.891	6,04	410.324	6,12	433.134	6,13
8	Keuangan, Persewaan, & Js. Perusahaan	598.190	10,25	631.510	10,35	669.291	10,50	715.317	10,67	779.721	11,03
9	Jasa-jasa	1.006.243	17,24	1.050.928	17,23	1.109.558	17,41	1.183.251	17,65	1.264.352	17,89
	PDRB	5.838.246	100,00	6.099.557	100,00	6.373.200	100,00	6.704.100	100,00	7.069.229	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2012

*) angka sementara

PDRB atas dasar harga berlaku (HB) tahun 2010-2012 mengalami pertumbuhan rata-rata 11,36% per tahun yaitu dari Rp13.611,72 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp16.696,582 milyar pada tahun 2012. Selama tahun 2010-2012, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, diikuti oleh sektor jasa-jasa, industri pengolahan, dan pertanian. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 3 tahun terakhir seperti pada tabel 2.9:

Tabel 2.9
PDRB dan Distribusi Persentase PDRB
Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku 2000
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012*)	
		(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	(juta Rp)	(juta Rp)	%
1	Pertanian	1.332.265	13,36	1.627.084	14,22	1.771.743	13,02	1.922.985	2.192.203	2.153.451	12,90
2	Pertambangan & Penggalian	62.566	0,63	62.536	0,55	73.245	0,54	86.671	96.205	90.599	0,54
3	Industri Pengolahan	1.505.155	15,09	1.639.909	14,33	1.927.170	14,16	2.171.967	2.432.603	2.274.445	13,62
4	Listrik, Gas & Air bersih	124.511	1,25	140.301	1,23	174.868	1,28	192.383	211.622	208.066	1,25
5	Bangunan	1.213.362	12,17	1.425.093	12,45	1.744.700	12,82	1.921.438	2.190.439	2.135.294	12,79
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.191.823	21,98	2.531.630	22,12	3.097.398	22,76	3.453.129	3.798.442	3.872.092	23,19
7	Pengangkutan & Komunikasi	604.012	6,06	679.689	5,94	780.674	5,74	857.248	942.973	922.507	5,53

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012*)	
		(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	(juta Rp)	(juta Rp)	%
8	Keuangan, Persewaan, & Js. Perusahaan	1.061.179	10,64	1.221.202	10,67	1.482.757	10,89	1.645.918	1.826.969	1.861.498	11,15
9	Jasa-jasa	1.877.320	18,83	2.118.626	18,51	2.559.171	18,80	2.845.861	3.187.365	3.178.630	19,04
	PDRB	9.972.193	100,00	11.446.071	100,00	13.611.725	100,00	15.097.600	16.878.820	16.696.582	100,00

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2012

*) angka sementara

Selama tahun 2010-2012, rata-rata pertumbuhan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian (2,78%), diikuti sektor industri pengolahan (0,88%), sektor bangunan (0,63%) dan sektor jasa-jasa (0,21%). Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (-1,31%), sektor listrik, gas dan air bersih (-1,18%), sektor perdagangan hotel dan restoran (-0,57%), sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan (-0,32%) serta sektor pertanian (-0,09%).

Sementara itu dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, sektor pertambangan dan penggalian juga memberikan rata-rata pertumbuhan kontribusi terbesar (3,93%), diikuti sektor bangunan (1,65%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1,09%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,88%), sektor jasa-jasa (0,63%) serta sektor industri pengolahan (0,60%). Sektor pertanian dan sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi masing-masing sebesar -4,80% dan -1,09%. Pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.10:

Tabel 2.10
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan
Harga Konstan (Hk) Tahun 2012
Kabupaten Sleman

NO	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian	1,96	-2,47
2	Pertambangan & Penggalian	0,00	-1,75
3	Industri Pengolahan	0,14	0,13
4	Listrik, Gas & Air bersih	-1,57	-1,10
5	Bangunan	1,96	1,63
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	-1,62	0,75
7	Pengangkutan & Komunikasi	-1,58	-0,65
8	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	-0,73	0,56

NO	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
9	Jasa-jasa	0,16	-0,11
	PDRB	11,80	5,20

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2012

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama 3 tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 perekonomian tumbuh 4,49%, menguat menjadi 5,19% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kinerja sektor-sektor ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 5,45%.

Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.11:

Tabel 2.11
Pertumbuhan Sektor dan PDRB Tahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Sleman

No	Sektor	Pertumbuhan				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	6,94	1,75	-0,31	-2,26	4,11
2	Pertambangan & Penggalian	-7,96	-4,84	15,24	14,35	1,45
3	Industri Pengolahan	1,52	1,93	3,05	6,35	-0,47
4	Listrik, Gas & Air bersih	5,15	6,21	4,82	4,28	6,31
5	Bangunan	6,86	6,51	6,59	6,95	6,03
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,99	6,48	5,62	6,27	7,20
7	Pengangkutan & Komunikasi	5,40	6,52	6,51	6,61	5,56
8	Keuangan, Persewaan, & Js. Persh	5,47	5,57	5,98	6,88	9,00
9	Jasa-jasa	4,70	4,44	5,58	6,64	6,85
	PDRB	5,13	4,48	4,49	5,19	5,45

Sumber : BPS Kab. Sleman, 2012

*) angka sementara

PDRB perkapita menurut harga berlaku (Hb) selama 3 tahun meningkat rata-rata 9,15% per tahun yaitu dari Rp.12.452.292 pada tahun 2010 menjadi Rp.14.980.000 pada tahun 2012. Sedangkan PDRB perkapita menurut harga konstan 2000 (Hk) meningkat rata-rata 3,12% per tahun yaitu dari Rp.5.830.337 pada tahun 2010 menjadi Rp.6.340.000 pada tahun 2012. PDRB per kapita selama 3 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 2.12:

Tabel 2.12
PDRB Per Kapita Tahun 2008-2012
Kabupaten Sleman

No.	PDRB	Nilai (Juta Rp.)				
		2008	2009	2010	2011	2012*)
1.	Hb	10,71	11,59	12,45	13,63	14,98
2.	Hk	5,46	5,65	5,83	6,05	6,34

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2012

*) angka sementara

2.3.1.2 Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman selama periode tahun 2010-2012 mengalami penurunan yaitu dari 7,46% pada tahun 2010 menjadi 4,06% pada tahun 2012 sebagaimana tabel 2.13:

Tabel 2.13
Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Sleman

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Inflasi (%)	10,16	4,03	7,46	3,19	4,06	4,90

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2012

Pada tahun 2012 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 7,07%, dan terendah pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,18%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.14:

Tabel 2.14
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi (%)					Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Bahan Makanan	10,30	4,25	22,02	1,97	7,07	10,35
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	7,91	6,41	6,50	5,19	6,72	6,14
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	18,21	5,11	6,23	3,02	3,90	4,38
4	Sandang	9,18	3,26	5,84	5,63	2,63	4,70
5	Kesehatan	4,75	3,63	0,60	5,58	1,44	2,54
6	Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga	5,50	4,26	3,63	0,94	1,32	1,96
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	4,86	-1,62	2,26	2,12	1,18	1,85
	Umum	10,16	4,03	7,46	3,19	4,06	4,90

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2012

2.3.1.3 Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Indeks Gini di Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kategori sedang. Distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman semakin tidak merata.

Apabila dikaitkan dengan angka pendapatan per kapita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan angka indeks Gini yang semakin menurun mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Sleman semakin meningkat dan semakin banyak penduduk yang dapat menikmatinya. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.15:

Tabel 2.15
Indeks Gini Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No.	Tahun	Indeks Gini
1	2008	0,31
2	2009	0,31
3	2010	0,38
4	2011	0,42
5	2012*)	0,44

Sumber : BPS Provinsi DIY,
*) Angka sementara

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan.

2.3.2.1 Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni.

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

AMH Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 angka melek huruf sebesar 92,61%, artinya bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 masih ada 7,39% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf dan pada tahun 2012 AMH sebesar 94,53% yang artinya masih ada 5,47 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.

2) Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah sebesar 10,30 atau setara dengan Sekolah Menengah kelas 1 dan meningkat menjadi 10,52 pada tahun 2012.

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2010 sebesar 116,42, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 116,51. Hal ini mengindikasikan bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak pada sekolah dasar sangat tinggi, sesuai dengan pencanangan wajib belajar 9 tahun bagi penduduk.

Demikian pula bagi SMP/M.Ts, dapat dilihat bahwa APK pada tahun 2010 sebesar 115,48 menurun pada tahun 2012 menjadi 113,70%.

APK SMA/MA/SMK pada tahun 2010 sebesar 77,17 dan pada tahun 2012 APK SMA/MA/SMK menjadi 77,69 atau meningkat sebesar 0,52% dari tahun 2010.

APK SMA/MA/SMK di bawah 80% disebabkan karena lulusan SMP diperkirakan melanjutkan ke SMA/MA/SMK di kota dan ke daerah perbatasan sehingga ini sangat mempengaruhi pada tinggi rendahnya APK di Kabupaten Sleman

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2010 sebesar 100,73. Pada 2012 APM SD/MI sebesar 100,87.

Untuk APM SMP/M.Ts pada tahun 2010 sebesar 81,71 dan pada tahun 2012 APM SMP/M.Ts menjadi 81,84.

APM SMA/MA/SMK pada tahun 2010 sebesar 59,03 kondisi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2012 besarnya APM SMA/MA/SMK mencapai 55,11. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.16

Tabel 2.16
Angka Melek Huruf, Lama Sekolah dan Angka Partisipasi
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka melek huruf	91,82	93,04	92,61	93,94	94,53
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,10	10,18	10,30	10,51	10,52
3	APK SD/MI	115,67	116,40	116,42	116,45	116,51
4	APK SMP/MTs	115,01	115,87	115,48	113,68	113,70
5	APK SMA/MA/SMK	75,45	75,73	77,17	77,66	77,69
6	APM SD/MI	98,99	99,16	100,73	101,51	100,87
7	APM SMP/MTs	80,98	81,00	81,71	79,65	81,84
8	APM SMA/MA/SMK	53,87	53,89	54,03	54,04	55,11

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2012

*) angka sementara

2.3.2.2 Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2012 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Rata-rata usia harapan hidup 76,08 tahun (laki-laki 73,46 tahun, perempuan 77,12 tahun) di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan nasional 70,6 tahun.
- 2) Di samping itu, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 4,70. Pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 16 dan nasional 34 per 1.000 KH.
- 3) Angka kematian ibu melahirkan 81,88 orang per 100.000 kelahiran hidup, provinsi 124, angka nasional 226.
- 4) Kondisi gizi buruk (0,45%), sedangkan pencapaian provinsi sebesar 0,68 dan nasional sebesar 4,9%, Persentase gizi buruk balita masih lebih baik dibanding Propinsi dan Nasional.
- 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2012 sebesar 99,86% sudah lebih baik dari target nasional 95%.
- 6) Cakupan penggunaan air bersih tahun 2012 sebesar 95,14%, pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan angka Nasional 80%
- 7) Cakupan penggunaan jamban keluarga dan cakupan penggunaan SPAL di Kabupaten Sleman sebesar 59,62% masih dibawah target Nasional, karena masyarakat di pedesaan masih terbiasa buang air besar di sungai sehingga perlu adanya sosialisasi secara gencar tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Adapun capaian indikator kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.17:

Tabel 2.17
Indikator Kesehatan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Capaian Kabupaten Sleman				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Usia harapan hidup rata-rata :	74,43	74,47	74,87	75,76	76,08
	- Laki-laki	72,46	72,46	73,04	73,14	73,46
	- Perempuan	76,79	76,79	76,70	76,80	77,12
2	Angka Kematian Bayi/1.000 KH	5,81	4,56	5,78	5,25	4,70
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH	69,31	69,31	112,2	122	81,88
4	Persentase Balita Gizi Buruk	0,54	0,53	0,66	0,5	0,45
5	Universal Child Immunization/UCI (%)	100	100	100	100	100
6	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
7	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%)	97,21	91,65	93,16	99,61	99,86
8	Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)	77,35	80,7	83	82,8	83,82
9	Cakupan penggunaan Air Bersih (%)	96,9	96,1	94,9	94,9	95,14
10	Cakupan penggunaan Jamban Keluarga (%)	66,7	68,4	67,2	65,1	75,11
11	Cakupan penggunaan SPAL (%)	56,0	59,1	58,5	48,8	59,62

Sumber : Dinas Kesehatan, 2012

2.3.2.3 Ketenagakerjaan

Pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja sebanyak 560.376 orang, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 522.622 orang dan penduduk tidak bekerja sebanyak 37.754 orang. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2012 adalah 0,93 Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.18:

Tabel 2.18
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2008-2012
Kabupaten Sleman

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012*	Capaian DIY 2012*
1.	Angkatan Kerja	566.659	570.605	502.268	524.326	560.376	1.944.858
2.	Penduduk yang Bekerja	527.985	528.376	461.008	484.405	522.622	1.867.708
3.	Penduduk yang Tidak Bekerja	38.674	42.229	41,26	39,921	37,754	77.150
4.	Rasio Penduduk yang Bekerja	0,94	0,93	0,91	0,92	0,93	0,96

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2012

*) angka sementara

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga:

2.3.3.1 Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Sleman, sebagaimana tabel 2.19:

Tabel 2.19
Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2008-2012
Kabupaten Sleman

No.	Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah grup kesenian	887	887	893	893	1.125
2	Jumlah gedung kesenian	7	7	7	7	8

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2012

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 memiliki kelompok kesenian sejumlah 893 kelompok kesenian yang tersebar di 17 Kecamatan dan 86 desa. Pada tahun 2012 terjadi penambahan jumlah grup kesenian atau kelompok kesenian yaitu menjadi 1.125 kelompok.

Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kesenian mendapatkan perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mendukung desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Namun demikian dengan jumlah penduduk sebesar 1.120.917* jiwa Kabupaten Sleman baru memiliki fasilitas gedung kesenian sejumlah 8 gedung kesenian.

Adapun nama-nama gedung kesenian di Kabupaten Sleman adalah BBM Minomartani, BBS Sinduharjo Ngaglik, P4TK Seni Budaya Klidon, Gedung Kesenian Sleman, Gedung Kesenian UNY, Panggung Trimurti dan Panggung Rorojonggrang Prambanan dan Gedung Kesenian Hardjo Sumantri.

2.3.3.2 Pemuda dan Olahraga

Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olah raga. Di bawah ini data tentang jumlah klub olah raga serta data gedung olah raga yang ada di Kabupaten Sleman sebagaimana tabel 2.20:

Tabel 2.20
Perkembangan Olahraga Tahun 2008-2012
di Kabupaten Sleman

No.	Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah klub olahraga	34	34	37	37	747
2	Jumlah gedung olahraga	4	4	11	11	52

Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga, 2012

Dari data fasilitas olah raga baik jumlah klub olah raga yang ada dan gedung olah raga yang tersedia sebagaimana terlihat dalam tabel di atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010 ada sebesar 37 klub olah raga, dan di tahun 2012 tetap 747 klub.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan klub-klub olah raga yang ada di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk fasilitas gedung olah raga tahun 2010 ada 11 gedung dan pada tahun 2012 menjadi 52 gedung olah raga. Perubahan cukup signifikan pada tahun 2012 berkaitan dengan jumlah gedung olahraga karena data tahun 2012 termasuk data GOR yang ada di masyarakat maupun di sekolah.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD Kabupaten Sleman.

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.4.1.1 Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah.

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di lingkup kabupaten dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	APS SD/MI	98,990	99,832	111,45	113,17	112,88
2	APS SMP/MTs	80,980	80,998	109,72	108,18	110,81
3	APS SMA/MA/SMK	53,868	53,886	58,02	57,89	58,96

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2012

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010 APS untuk SD/MI sebesar 111,45. Kondisi ini meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2012 APS SD/MI menjadi 112,88.

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI yang melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah murid SD ada yang usianya kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun dan juga masuknya penduduk dari daerah perbatasan, sehingga jumlah murid melebihi jumlah penduduk yang ada.

Pada jenjang SMP/M.Ts APS pada tahun 2010 sebesar 109,72 dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi 110,81.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK besarnya APS pada tahun 2010 adalah 58,02. Kondisi ini semakin meningkat hingga pada tahun 2012 mencapai 58,96.

2. Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1.3.	Rasio SD/MI	68	68	68	67	67
2.3.	Rasio SMP/MTs	33	33	33	33	35
3.3	Rasio SMA/MA/SMK	25	25	25	25	25

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2012

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2010 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI adalah 68 pada tahun 2012 rasio gedung sekolah terhadap penduduk ada 67.

Rasio gedung sekolah SMP/M.Ts dan penduduk usia sekolah SMP/M.Ts pada tahun 2010 adalah sebesar 33 setiap 10.000 penduduk usia SMP tersedia sekolah sebesar 33 dan pada tahun 2012 menjadi 35.

Untuk rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK pada tahun 2010 sebesar 25 dan pada tahun 2012 tetap sebesar 25.

3. Rasio guru/murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se Kabupaten Sleman dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio SD/MI	15	15	14	14	15
2	Rasio SMP/MTs	12	12	13	12	12
3	Rasio SMA/MA/SMK	9	9	9	9	9

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2012

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 14 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 14 anak. Kondisi seperti ini setiap tahun relatif sama sesuai dengan pertambahan jumlah guru dan jumlah murid. Pada tahun 2012 rasio guru/murid menjadi yaitu 15.

Pada tahun 2010 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 13 dan pada tahun 2012 menjadi 12.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 9 pada tahun 2010. Sedangkan tahun 2012 tetap 9 artinya setiap satu guru mengajar 9 murid.

Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.24:

Tabel 2.24
Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Uraian Data	Tahun Anggaran				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Taman Kanak-kanak					
a.	Jumlah sekolah	505	512	519	521	535
	- Negeri	3	4	4	4	5
	- Swasta	502	508	515	517	530
b.	Jumlah guru	2,093	2,228	2,253	2.284	2300
	- Negeri	36	39	42	47	49
	- Swasta	2,057	2,189	2,211	2.237	2.251
c.	Jumlah tenaga non guru	407	311	270	269	441
	- Negeri	11	17	12	14	17
	- Swasta	396	294	258	255	424
d.	Jumlah siswa	25,140	26,120	26,356	27.141	27.740
	- Negeri	375	424	429	440	515
	- Swasta	24,765	25,696	25,927	26.701	27.225
2.	Sekolah Dasar/MI					
a.	Jumlah sekolah	516	515	519	521	526
	- Negeri	384	383	381	381	329
	- Swasta	132	132	138	140	145
b.	Jumlah guru	5,972	6,186	6,370	6.328	6.250

		- Negeri	4,330	4,443	4,520	4.474	4.340
		- Swasta	1,642	1,743	1,850	1.854	1.910
	c.	Jumlah tenaga non guru	739	973	983	1.103	1.163
		- Negeri	505	638	670	745	785
		- Swasta	234	335	313	358	378
	d.	Jumlah siswa	86,900	87,893	89,335	90.622	89.886
		- Negeri	65,422	65,702	65,702	66.133	64.982
		- Swasta	21,478	22,191	23,633	24.489	24.904
3.	SMP/MTS						
	a.	Jumlah sekolah	114	121	121	123	129
		- Negeri	65	64	64	64	64
		- Swasta	57	57	57	59	65
	b.	Jumlah guru	3,336	3,242	3,202	2.256	3.359
		- Negeri	2,202	2,126	2,076	2.035	2.012
		- Swasta	1,134	1,116	1,126	1.221	1.347
		Jumlah tenaga non guru	1,188	981	974	1.030	1.001
		- Negeri	698	712	702	713	684
		- Swasta	490	269	272	317	317
	c.	Jumlah siswa	38,376	39,068	39,519	39.857	40.730
		- Negeri	28,227	28,009	28,236	28.278	27.780
		- Swasta	10,149	11,059	11,283	11.579	12.950
4.	SMA/MA						
	a.	Jumlah sekolah	61	57	57	57	58
		- Negeri	22	22	22	22	22
		- Swasta	39	35	35	35	36
	b.	Jumlah guru	1,888	1,761	1,740	1.699	1.688
		- Negeri	978	958	929	903	875
		- Swasta	910	803	811	796	813
	c.	Jumlah tenaga non guru	504	561	561	549	572
		- Negeri	244	333	340	333	345
		- Swasta	260	228	221	216	227
	d.	Jumlah siswa	13,937	13,860	14,267	14.734	14.936
		- Negeri	9,192	9,432	9,671	9.971	10.120
		- Swasta	4,745	4,428	4,596	4.763	4.816
5.	SMK						
	a.	Jumlah sekolah	50	52	53	53	54
		- Negeri	8	8	8	8	8
		- Swasta	42	44	45	45	46
	b.	Jumlah guru	1,869	1,920	1,944	1.925	1.973
		- Negeri	623	624	619	602	610
		- Swasta	1,246	1,296	1,325	1.323	1.363
	c.	Jumlah tenaga non guru	552	556	569	576	569
		- Negeri	204	199	198	202	192
		- Swasta	348	357	371	374	377
	d.	Jumlah siswa	17,876	18,674	18,990	19.461	19.592
		- Negeri	6,417	6,809	6,840	6.893	6.981
		- Swasta	11,459	11,865	12,150	12.568	12.611
6.	Kondisi Bangunan Sekolah						
	a.	Jumlah Ruang SD	3,671	3.636	3,661	3.646	3.664

		- Baik	2,302	2,499	2,609	2.686	2.711
		- Rusak Ringan	812	689	761	679	659
		- Rusak Berat	557	448	291	281	294
	b.	Jumlah Ruang SLTP	1,034	1.246	1,248	1.209	1.241
		- Baik	888	1.071	1,065	1.074	1.125
		- Rusak Ringan	94	105	113	84	72
		- Rusak Berat	52	70	70	51	44
	c.	Jumlah Ruang SLTA	1,005	1,111	1,211	1.246	1.229
		- Baik	962	984	1,098	1.117	1.122
		- Rusak Ringan	40	102	88	102	105
		- Rusak Berat	3	25	25	27	2
B Pendidikan Luar Sekolah							
1. Lembaga Pendidikan Kursus							
	a.	Jumlah lembaga	89	108	110	127	116
	b.	Jumlah tutor	445	568	660	508	474
	c.	Jumlah warga belajar	2,670	1,200	2,200	2.651	2.519
2. Sanggar kegiatan belajar							
	a.	Jumlah kegiatan	6	4	4	7	4
	b.	Jumlah pamong belajar	11	11	6	10	10
3. Kelompok Belajar							
	a.	Kejar Paket B setara SMP					
		- Jumlah tutor	138	672	642	108	178
		- Jumlah kelompok	23	112	107	18	33
		- Jumlah warga belajar	460	2,525	2,620	360	825
	b.	Kejar Paket C setara SMA					
		- Jumlah tutor	451	35	245	120	91
		- Jumlah kelompok	41	5	35	20	20
		- Jumlah warga belajar	810	700	1040	400	400
4. Play Group (Kelompok Bermain)							
	a.	Jumlah tutor		629	818	1.046	925
	b.	Jumlah kelompok	133	146	185	219	212
	c.	Jumlah warga belajar	3,482	4,090	5,168	6.755	6.474
5. TPA							
	a.	Jumlah tutor	203	279	312	516	408
	b.	Jumlah kelompok	44	48	87	107	78
	c.	Jumlah warga belajar	1,011	1,667	2,218	2.739	2.075
6. Satuan PAUD Sejenis							
	a.	Jumlah tutor	1,316	1,974	3,521	2.442	1.684
	b.	Jumlah kelompok	213	405	542	507	327
	c.	Jumlah warga belajar	11,108	16,111	20,115	20.580	10.790
C Hasil Pelayanan Publik							
1. Angka Partisipasi Kasar (%)							
	a.	SD	115.67	116,40	116,42	116,45	116,51
	b.	SMP	115.01	115.87	115,48	113,68	113,70
	c.	SMU/SMK	75.45	75,73	77,17	77,66	77,69
2. Angka Partisipasi Murni (%)							
	a.	SD	98.99	99.16	100,73	101,51	100,81
	b.	SMP	80.98	81.00	81,71	79,65	81,84

	c.	SMU/SMK	53.87	53.89	54,03	54,04	55,11
3.	Anak Putus Sekolah						
	a.	SD	37	34	33	40	36
	b.	SMP	66	48	27	32	30
	c.	SMU/SMK	124	61	74	74	73
4.	Rasio Siswa:Sekolah						
	a.	TK	52	51	51	52	53,30
	b.	SD	168	171	173	174	173,16
	c.	SMP	336	323	317	314	317,46
	d.	SMU/SMK	314	298	302	311	311,64
5.	Rasio Siswa: Guru						
	a.	TK	11	12	12	12	12,40
	b.	SD	15	15	14	14	14,52
	c.	SMP	12	12	12	12	12,19
	d.	SMU/SMK	9	9	9	9	9,45
6.	Rasio Siswa: Kelas						
	a.	SD	23	25	24	24,90	24,46
	b.	SMP	32	33	33	31,31	31,38
	c.	SMU/SMK	31	30	33	28,52	24,15
7.	Rata-rata Nilai Hasil Belajar						
	a.	UAN SD	7,56	7,40	7,17	7,53	7,70
	b.	UAN SMP	6,77	7,18	7,09	6,64	6,76
	c.	UAN SMA	7,49	7,26	6,65	6,60	6,16
	d.	UAN SMK	6,91	7,71	6,59	6,78	6,99
8	Rata-rata nilai Hasil Belajar program Kesetaraan						
	a.	UAN Paket A Setara SD	6.99	6,20	6,50	0	6,09
	b.	UAN Paket B Setara SMP	6.9	6,50	6,50	6,60	6,4
	c.	UAN Paket C Setara SMA	6.32	6,70	6,75	6,75	6,6
9.	Rata-rata Kelulusan (%)						
	a.	SD	99.92	100.08	99,90	99,59	99,26
	b.	SMP	91.2	93.67	92,10	99,93	98,37
	c.	SMU/SMK	87.26	98.26	96,58	99,34	95,94
10	Prosentase guru yang layak mengajar						
	a.	TK			29,96	40,32	46,26
	b.	SD	84	39.41	48,99	58,19	67,44
	c.	SMP	83.78	76.13	79,18	82,12	84,52
	d.	SMU/SMK	82.99	86.42	88,14	88,47	90,33

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2012

2.4.1.2 Urusan Wajib Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik.

Pelayanan di RSUD Sleman juga telah memenuhi standar ISO 9001:2000/ISO 9001:2008. Pencapaian indikator pelayanan RSUD tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/*Bed Occupancy Rate* (BOR) mencapai 75,08%, kondisi ini baik karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70%-85%.
- 2) Frekuensi pemakaian (*Bed Turn Over*) tahun 2012 mencapai 66,34 kali.
- 3) Pada tahun 2012 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (*Turn Over Interval*) mencapai 1,73 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standard Departemen Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.
- 4) Rata-rata lama perawatan pasien (*Length of Stay*) mencapai 4,99 hari pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.
- 5) Angka kematian bersih (*Net Death Rate*) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2012 mencapai 12,65‰ pasien, mengalami kenaikan sebesar 1,96‰ pasien dari tahun 2011 yang menunjuk angka 10,69‰ pasien. Walaupun angka kematian pasien ketika dirawat di RS mengalami kenaikan, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25 ‰.
- 6) Angka kematian kasar (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai 22,48‰ pasien pada tahun 2011, mengalami kenaikan tahun 2012 menjadi 23,15‰.
- 7) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per-1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per-1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD Sleman pada parameter angka kematian, masih dibawah target nasional cukup jauh. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD Prambanan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/*Bed Occupancy Rate* (BOR) mencapai 25,83%, kondisi ini masih jauh dari standar Nasional (30 %), jika dikaitkan standar, BOR dikatakan baik jika

realisasinya 70% - 85%, Frekuensi pemakaian (*Bed Turn Over*) tahun 2012 mencapai 1,9 kali per tahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut masih jauh dibawah standar nasional yaitu 75 kali per tahun.

- 2) Pada tahun 2012 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (*Turn Over Interval*) mencapai 7,83 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien masih jauh dari ideal karena sesuai standard Departemen Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.
- 3) Rata-rata lama perawatan pasien (*Length of Stay*) mencapai 2,70 hari pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien masih jauh memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.
- 4) Angka kematian bersih (*Net Death Rate*) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2012 sebesar 0,29‰, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25‰, Angka kematian kasar (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit pada tahun 2012 sebesar 0,58‰.
- 5) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per-1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per-1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD Prambanan pada parameter angka kematian, sangat baik masih dibawah, jauh dari target nasional. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik.

Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kesehatan
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	- Rasio posyandu persatuan balita	50	50	51	50,8	35
2	- Rasio puskesmas persatuan penduduk	39.112	38.126	43.614	40.232	44.292
	- Rasio poliklinik per satuan penduduk	37.547	34.041	40.383	20.116	26.364
	- Rasio pustu per satuan penduduk	12.685	13.424	15.357	14.166	15.595
3	Rasio RS per satuan penduduk	50.668	50.166	49.561	47.895	42.588
4	Rasio dokter per satuan penduduk	1.591	908.648	895,94	878	1.401
5	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	1.471,30	798,30	762,48	898	960
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	97,21	91,65	93,16	99,61	99,86

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
7	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	100	100	100	100	100
8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	49,50	53,73	44,84	67,5	55,83
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan kunjungan bayi (%)	95,56	61,16	91,08	95,22	91,68
13	Jumlah Puskesmas (bh)	24	25	25	25	25
14	Jumlah pembantu Puskesmas (bh)	72	71	71	71	71

Sumber : Dinas Kesehatan, 2012

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

2.4.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan.

Pada tahun 2010 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,3192, dan pada tahun 2013 mencapai angka 0,541. Terdapat peningkatan angka yang cukup signifikan antara tahun 2010-2012 dibandingkan pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan factor pembagi yaitu panjang jalan eksisting yang ada sebelumnya adalah sepanjang 1.085km, sedangkan eksisting panjang jalan dari perhitungan terbaru setelah SK jalan adalah sepanjang 699,5km.

Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2010 menunjukkan jumlah angka 1:8.692, kondisi tersebut meningkat pada tahun 2011 menjadi 1:8.787, tetapi menurun pada tahun 2013 menjadi 1:8.703 dikarenakan berkurangnya panjang saluran irigasi.

Indikator ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Sleman tercatat

3,307 pada tahun 2010, relatif tetap sampai dengan tahun 2012 yaitu 3,2737.

Indikator keempat adalah rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang mencapai angka 294,373 pada awal tahun 2010, sedangkan pada tahun 2013 mencapai angka 286.1415. Pada tahun 2013 telah dibangun dan difungsikan TPU baru yaitu di Prambanan yang dapat menampung \pm 5.000 jiwa, sehingga factor penyebut yang awalnya hanya 5.000 menjadi 10.000 sehingga rumus tersebut adalah ketersediaan makam sebanyak 319.000 dibagi jumlah penduduk sebanyak 1.114.833 x 1.000.

Indikator kelima adalah ratio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, pada tahun 2013 didapat angka sebesar 1.282,7 dari hasil penghitungan jumlah TPS (223 buah) dengan kapasitas 1.430m³ dibagi jumlah penduduk eksisting dikalikan 1.000.

Indikator keenam adalah panjang jalan yang dilalui roda 4, dimana angka tersebut mencapai 0,0015 km pada tahun 2013 untuk jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan nasional. Perhitungan didapat dari total panjang jalan dibagi jumlah penduduk.

Indikator ketujuh adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) dimana pada tahun 2013 mencapai prosentase sebesar 54,06% didapat dari hasil panjang jalan baik dan bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan >40km/jam dibagi seluruh panjang jalan kabupaten yang ada. Terdapat perbedaan signifikan dari angka pada tahun 2013 dibandingkan angka pada tahun 2010-2012 dikarenakan factor penyebut yang berbeda. Panjang jalan sebelumnya mencapai 1.085km, sedangkan pada tahun ini panjang jalan kabupaten eksisting hanya 699,5 Km.

Indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik, di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 angka menunjukkan 33,05 dan 43,89 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 mencapai 44,64% dengan asumsi perhitungan kondisi drainase baik dibagi seluruh drainase yang ada.

Untuk lingkungan permukiman dianggap sebagai kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Sleman. Luas kawasan permukiman di Kabupaten Sleman adalah sebesar 39,70%, didapat dari perhitungan luas kawasan permukiman perdesaan seluas 10.232 ha dan perkotaan seluas 12.590 ha dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sleman sebesar 57.482ha. Terdapat perbedaan perhitungan antara tahun 2013 dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2012 sudah terbit Perda 12 tahun 2012 tentang RTRW dengan perhitungan luasan kawasan permukiman perdesaan adalah sebagaimana tersebut di atas, sedangkan perhitungan awal luas permukiman perdesaan

adalah 10.733ha. Berikut tabel yang menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum.

Tabel 2.26
Indikator Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

NO	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,2897	0,3130	0,3192	0,3423	0,363
2	Rasio Jaringan Irigasi	0,01186	0,01190	1:8.602	1:8.787	1:8.787
3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3,4300	3,30700	1:306	1:311	1:303
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		294,373	294,373	287,254	283,572
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,744	0,919	0,918	0,918	0,918
6	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	0,0032	0,0031	0,0031	0,0030	0,0030
7	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)			31,9%	34,23%	36,32%
8	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	29,28	33,05	33,05	33,05	43,89
9	Kawasan Pemukiman (%)			40,574	40,574	40,574

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2012

2.4.1.4 Urusan Wajib Perumahan

Dalam bidang perumahan indikator kinerja dinilai di antaranya dari indikator rumah tangga pengguna air bersih, indikator rumah tangga pengguna listrik, indikator rumah tangga bersanitasi dan indikator rumah layak huni. Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah pengguna air bersih, listrik dan sanitasi pada tahun tertentu, dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga/KK pada tahun tertentu dikali 100%.

Khusus peningkatan dan penurunan yang terjadi pada indikator pengguna listrik karena dimungkinkan adanya satu atau lebih jaringan listrik yang digunakan oleh satu rumah tangga. Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 adalah sebesar 93,9%, dan pada tahun 2011 sejumlah 94,3%, kemudian meningkat menjadi 95,4% pada tahun 2012. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai 100,68% pengguna pada tahun 2010,

kemudian turun menjadi 90,151% pada tahun 2011, pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali sebesar 89,19%

Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2010 angka yang tercatat sejumlah 67,20%, selanjutnya pada tahun 2011 angka yang tercatat sejumlah 65,12%, serta pada tahun 2012 angka tercatat sejumlah 74,28%. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka sebesar 90,43% pada tahun 2010 dan 90,92% pada tahun 2011 sedangkan pada tahun 2012 mencapai 91,24%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.27:

Tabel 2.27
Indikator Urusan Perumahan
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

NO	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	60,95	62,23	93,9	94,3	95,4
2	Rumah tangga pengguna listrik (%)	90,151	96,73	97,10	97,15	95
3	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	63,02	54,875	67,20	65,12	74,28
4	Rumah layak huni (%)			90,43	90,92	91,24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2012

2.4.1.5 Urusan Wajib Penataan Ruang

Luas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan dengan pertimbangan pernah dilakukan studi tentang RTH kawasan perkotaan. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman sehingga didapatkan rasio RTH 63,724%. Adapun luas RTH diambil dari laporan RTH wilayah perkotaan yang merupakan luas lahan tidak terbangun.

Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB tetap, IMB sementara maupun IMB pemutihan. Pada tahun tertentu dibanding dengan 5 bangunan pada tahun tertentu yang dihitung dari bangunan-bangunan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan, fasilitas transportasi, fasilitas pengairan, persampahan, fasilitas peternakan, stasiun bahan bakar,

fasilitas pariwisata dan industri/perdagangan. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel 2.28:

Tabel 2.28
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	63,724	63,724	63,72*)	55,36	54,96
2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)		9,825	9,569	7,703	13,220

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2012

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2012

Ket *) : Angka perhitungan dengan luasan kawasan perkotaan berdasarkan Perda 23/1994

2.4.1.6 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No.7 Tahun 2005 tentang RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, dan perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJM Kabupaten Sleman tahun 2011-2015. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.29:

Tabel 2.29
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda, 2012

2.4.1.7 Urusan Wajib Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.

Jumlah arus penumpang angkutan umum selama tiga tahun mengalami peningkatan hingga mencapai 5.480.765 orang per tahun. Namun sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat, untuk periode tahun selanjutnya cenderung mengalami penurunan yang pada tahun 2012 menjadi hanya sebanyak 4.463.688 orang per tahun. Selaras dengan penurunan jumlah arus penumpang, maka dalam perkembangannya rasio ijin trayek selama tiga tahun terakhir juga mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 546 kendaraan.

Selaras dengan penurunan tersebut diatas tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor semakin menurun sejak tahun 2008. Kondisi ini akan sangat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya akan rentan mengalami kecelakaan, selain itu juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan, kondisi tersebut juga di mungkinkan para pengusaha angkutan umum malas karena takut kendaraannya memang tidak layak uji dan harus menanggung resiko kendaraan di kandangan. Oleh karena perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor tentang pentingnya uji kendaraan bermotor. Akibat kondisi tersebut mengakibatkan kepemilikan Kir angkutan umum juga menurun sejak 3 tahun terakhir. Prosentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas juga berkurang dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh panjang ruas jalan yang cenderung tetap sehingga pada tahun awal pembangunan memerlukan rambu relatif lebih banyak sedangkan pada tahun-tahun berikutnya hanya merupakan penambahan ataupun penggantian rambu yang rusak atau hilang. Indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.30:

Tabel 2.30
Indikator Urusan Perhubungan
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah arus penumpang	5.611.705	5.480.765	5.205.876	5.170.429	4.463.688

	angkutan umum						
2	Rasio ijin trayek	578	569	546	527	290	
3	Jumlah uji kir angkutan umum (bh)	15.649	15.030	14.825	15.337	18.784	
4	Jumlah Terminal Bis (bh)	5	5	5	5	5	
5	Angkutan darat (%)	0,0201	0,0202	0,0202	0,0206	0,0208	
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	2.087	1.908	1.715	1.825	1.873	
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	JBB < 5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
		JBB 5.000 – 10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	37.500
		JBB > 10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	45.000
9	Pemasangan Rambu-rambu	19,06	1,96	1,96	2,07	2,35	

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, 2012,

2.4.1.8 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Kabupaten Sleman memiliki keterbatasan sumber daya alam, sehingga lingkungan yang bersih dan sehat perlu dijaga. Lingkungan hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Pelayanan sampah di Kabupaten Sleman dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PUP dan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat. Persentase/rasio pelayanan sampah diperoleh dari prakiraan volume timbunan sampah dibagi dengan kapasitas pengangkutan sampah oleh Dinas PUP.

Upaya lainnya adalah melalui penanganan pengaduan kasus lingkungan. Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebanyak 23

kasus. Jenis pengaduan meliputi pencemaran udara berupa bau yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan sebanyak 11 kasus, debu dan asap 2 kasus, pengaduan kebisingan sebanyak 4 kasus, pencemaran air sebanyak 5 kasus. Kantor Lingkungan Hidup telah berupaya untuk menangani pengaduan kasus lingkungan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait, Camat, Kepala Dukuh dan tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak. Berbagai langkah dan pendekatan dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan yang dilakukan. Dari 23 kasus yang diadukan sebanyak 9 kasus selesai, sedangkan yang lainnya masih dalam koordinasi dan pengawasan.

Dalam pelayanan jasa pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas PUP telah menjangkau di seluruh wilayah 17 kecamatan, sedangkan persentase pelayanan sampah secara keseluruhan kecenderungannya meningkat dari 11,77% pada tahun 2011 menjadi 35,08% pada tahun 2012.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah mengalami peningkatan dari 5,5 pada tahun 2010 menjadi 6 pada tahun 2012. Sedangkan untuk penegakan hukum lingkungan telah dilakukan pembinaan pada 27 kasus di tahun 2011, dan 22 kasus di tahun 2012. Indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 2.31:

Tabel 2.31
Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Persentase penanganan sampah	15,24	14,18	14,63	33,64	35,08
2	Pencemaran status mutu air	-34 s/d -41	-38 s/d -62	-10 s/d -73	-19 s/d 43	-19 s/d 43
3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	4,4	5,5	5,5	5,8	6
4	Penegakan hukum lingkungan	25	27	28	27	22

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, 2012

2.4.1.9 Urusan Wajib Pertanahan

Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Sleman berubah tiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan adalah 428.572, pada tahun 2011 sejumlah 444.108, dan tahun 2012 sejumlah 455.193 bidang. Untuk penyelesaian ijin lokasi di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, pada tahun 2010 sejumlah 25 buah,

tahun 2011 sejumlah 9 buah, dan tahun 2012 sejumlah 20 buah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.32:

Tabel 2.32
Luas Lahan dan ijin Lokasi
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah sertifikat tanah (buah)	444.108	455.193	486.630	491.443	505.093
2	Penyelesaian izin lokasi (buah)	11	19	25	9	20

Sumber : Dinas Pengelolaan Pertanahan Daerah, 2012

2.4.1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan kependudukan pada tahun 2010 mengalami peningkatan karena angka kelahiran pada tahun 2010 juga meningkat, yang berakibat pada peningkatan permohonan akte kelahiran. Pada tahun 2011 pelayanan akta kelahiran mengalami kenaikan karena akhir tahun 2011 merupakan batas akhir perpanjangan dispensasi pengurusan akta kelahiran yang berakibat pada kenaikan jumlah permohonan. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel 2.33:

Tabel 2.33
Angka Rasio Kependudukan
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,78	0,78	0,93	0,93	0,97
2	Rasio bayi berakte kelahiran	66,63	91,80	99,31	100	100
3	Rasio pasangan berakte nikah	100	100	100	100	100
4	Kepemilikan KTP	93,75	93,75	93,75	93,75	97
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	17,08	24,35	17,25	40,86	42,06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2012

2.4.1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sector pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar.

Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga.

Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat tabel 2.34 :

Tabel 2.34
Indikator Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan			54,22	55,17	55,70
2	Partisipasi perempuan dilembaga swasta (%)	94,89	96,39	96,60	46,52	38,37
3	Rasio KDRT	0,041	0,15	0,125	0,012	0,0312
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	59,68	58,62	91,22	91,74	92,59
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	104	125	184	125	132

Sumber: Badan KB,PM,PP, 2012

2.4.1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Peningkatan partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif

di wilayah masing-masing. Perkembangan capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel 2.35:

Tabel 2.35
Indikator Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rata-rata jumlah jiwa per keluarga	3,37	3,32	3,6	3,34	3,60
2	Cakupan peserta KB aktif	117.882	119.189	121.245	118.424	120.561
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	79.469	85.907	46.067	40,67	40,67
4	Peserta KB Pria	8.087	8.338	8.504	8.586	8.952
5	Pasangan Usia Subur (PUS)	147.379	149.229	151.600	150.009	152.392
6	% Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)	79,99	79,83	80,17	78,41	79,11
7	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	769	787	733	797	854

Sumber: Badan KB,PM, PP, 2012

2.4.1.13 Urusan Wajib Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel 2.36:

Tabel 2.36
Indikator Urusan Sosial
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sarana sosial: - Panti Asuhan - Panti Jompo - Panti Sosial - Rumah Singgah (giran & Diponegoro) - Panti cacat	30	30	32 24 1 3 2 8	44 24 1 3 2 8	24 1 3 2 8
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	5.014	5.034	5.062	45.472	72.148
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak Jalanan	5.014	5.034	5.062 419	45.472 343	72.148 439

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, 2012

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal.

2.4.1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Hali ini sangat terkait dengan kondisi kualitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah.

Capaian pelaksanaan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2012 seperti terlihat dari capaian indikator sebagai berikut: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja. Pada Periode tahun 2010-2012 mengalami sedikit perubahan yaitu 66,29% di Tahun 2010, 67,02% di Tahun 2011, dan 59,64% di Tahun 2012.

Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui AKAL, AKAD maupun AKAN dari pencari kerja terdaftar yang menunjukkan angka 15,71% di Tahun 2010, 85,93% di Tahun 2011, 62,58% di Tahun 2012. Pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Untuk angka tingkat pengangguran terbuka masih menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 8,21% di tahun 2010, 7,61% di tahun 2011, 6,74% di tahun 2012. Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan K3 di tahun 2012 sebesar 100% sedangkan untuk data pada tahun 2012 adalah 100%. Jumlah perusahaan bertambah yaitu 1.031 perusahaan di tahun 2011 menjadi 1.065 perusahaan di tahun 2012. Angka perselisihan pengusaha pekerja di tahun 2012 sebesar 25 kasus (terselesaikan 23 kasus).

Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2010-2012 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Indikator Ketenagakerjaan
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	68,43	66,72	66,29	67,02	59,64
2	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	34,52	43	15,71	85,93	62,58
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,82	7,40	8,21	7,61	6,74
4	Keselamatan dan perlindungan/ K3 (%)	93,05	96,65	100	100	100
5	Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja (%)	3,53	4,35	100	100	92,00

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Nakersos Kab. Sleman 2012

2.4.1.15 Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Sleman meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman terlihat dari jumlah koperasi yang ada menunjukkan tren yang semakin meningkat yaitu 598 koperasi pada tahun 2010 menjadi 617 koperasi pada tahun 2012. Jumlah koperasi aktif juga meningkat dari 526 koperasi pada tahun 2010 menjadi 554 pada tahun 2012. Sementara jumlah koperasi beku semakin menurun dari 72 pada tahun 2010 menjadi 54 pada tahun 2012. Jumlah anggota semakin meningkat dari 233.362 orang pada tahun 2010 menjadi 240.522 orang pada tahun 2012.

Demikian juga dari hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari Rp.142.559.739.000 pada tahun 2010 menjadi Rp.211.178.096.000 pada tahun 2012. Jumlah volume usaha sebesar Rp.720.095.806.000 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.819.373.452.000 pada tahun 2012. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.15.895.654.000 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.18.927.502.000 pada tahun 2012.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman dapat diamati pada tabel berikut ini :

Tabel 2.38
Perkembangan Koperasi Tahun 2008-2012
di Kabupaten Sleman

KOPERASI DAN PKM	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
1) Jumlah koperasi	587	601	598	604	617
2) Kondisi Koperasi					
- Koperasi aktif	290	481	526	550	554
- Koperasi Tidak aktif	206	29	9	9	9

KOPERASI DAN PKM	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
- Koperasi Beku / Mati	91	91	72	54	54
3) Jumlah anggota koperasi	208.159	218.835	233.362	234.584	240.522
4) Jumlah Modal Sendiri (000)	118.189.567	129.099.038	142.559.739	173.695.120	211.178.096
Volume Usaha (000)	671.888.372	705.482.789	720.095.806	732.070.941	819.373.452
SHU (000)	16.064.961	16.868.208	15.895.654	16.508.855	18.927.502

Sumber : Dinas Indagkop, 2013

2.4.1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman di tahun 2012 meliputi investasi PMA 42 unit dengan nilai investasi US\$233.560.125,46 daya serap tenaga kerja 7.200 orang dan realisasi kenaikan investasinya dari tahun 2011 sebesar 26,12%. Sedangkan untuk PMDN jumlah usahanya sebanyak 32 unit, nilai investasi sebesar Rp1.083.065.390.147 daya serap tenaga kerja sebanyak 9.771 orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun 2011 sebesar 30,90%, dan untuk investasi Non PMA/PMDN jumlah unitnya sebanyak 32,452 unit, nilai investasi sebesar Rp.3.489.552.500.469 dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 259.396 orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun 2011 sebesar 13,77%.

Untuk perkembangan penanaman modal Kabupaten Sleman dari tahun 2010 sampai tahun 2012 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Perkembangan Penanaman Modal
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Unit Usaha (orang)					
	PMA	35	33	38	41	42
	PMDN	32	31	31	32	32
	Non PMA/PMDN	27,949	29,222	30,384	31,566	32,452
2	Nilai Investasi					
	PMA (juta US\$)	148,67	148,23	162,55	186	233,56
	PMDN (juta Rp)	323.071	321.546	333.175	827,390	1.083.065
	Non PMA/PMDN (juta Rp)	1.911.741	2.289.736	2.558.491	2.034.340	3.489.552
3	Daya serap Tenaga Kerja (orang)					
	PMA	6113	6107	6146	6.385	7.200
	PMDN	9131	9065	9065	9.269	9.771
	Non PMA/PMDN	211.803	228.268	238.940	249.189	259.396
4	Rasio daya serap tenaga kerja (orang)					

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
	PMA	175	185	162	155	171
	PMDN	285	292	292	289	305
	Non PMA/PMDN	8	8	8	8	8
5	Kenaikan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN (%)					
	PMA	-0,10	-0,29	9,66	13,92	26,12
	PMDN	-6,35	-0,47	3,61	148,33	30,90
	Non PMA/PMDN	11,60	19,77	11,73	12,46	13,77

Sumber : Kantor P3M Kab. Sleman 2012

2.4.1.17 Urusan Wajib Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.40
Perkembangan Seni budaya
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	5	5	5	4	9
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya*			129	135	141
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	107	118	124	124	170

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2012

Pada tahun 2011 penyelenggaraan festival seni budaya ada 4 macam yaitu: festival Sendratari, Kethoprak, Prajurit dan Festival Kesenian Sleman. Sedangkan pada tahun 2012 diselenggarakan sebanyak 9 festival, yaitu Sendratari, festival ketoprak, Festival Gelar Seni Pertunjukan, Parade Tari Daerah, Festival Pedalangan, Festival Reog Jathilan, Festival Kethoprak Lesung, Festival Langen Cerita, dan Festival Seni Religi.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya khusus gamelan pada tahun 2012 ada 141 set gamelan yang tersebar di seluruh kabupaten Sleman. Maksudnya adalah milik masyarakat, termasuk gamelan untuk karawitan maupun jathilan. Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa pada tahun 2011 yang dilestarikan sebanyak 124, pada tahun 2012 ada 170 yang dilestarikan.

Data sebesar 170 terdiri dari situs 135 buah, struktur 4 (Goa Sentonoharjo, Goa di Kompleks Ratu Boko, Goa di Kawasan Kaliurang dan Selokan Van der Wijk Banyurejo temple) serta Kawasan 3 tempat (Kawasan Kraton Ratu Boko, Kawasan Prambanan, dan Kawasan Ambarketawang).

2.4.1.18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.

Hasil penghitungan jumlah organisasi pemuda dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.41
Perkembangan Pemuda dan Olah raga
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah organisasi pemuda	10	10	17	20	95
2	Jumlah organisasi olah raga	33	34	37	37	34
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	17	13	12
4	Jumlah kegiatan olah raga	17	17	21	14	10
5	Lapangan olah raga*	420	141	141	194	375

Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga, 2012

*) Lapangan olah raga di sekolah dan di masyarakat

Berdasarkan data di atas terlihat perkembangan cukup signifikan pada jumlah organisasi pemuda. Pada tahun 2010 jumlah organisasi pemuda 17, selanjutnya meningkat menjadi 20 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 menjadi 95. Peningkatan sangat signifikan disebabkan sebelum tahun 2012 belum ada pendataan, sedangkan tahun 2012 dilakukan pendataan. Sedangkan untuk jumlah organisasi olah raga jumlahnya sesuai dengan jumlah cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sleman yaitu 34 cabang olahraga. Adapun kegiatan kepemudaan mengikuti jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Sleman. Sedangkan kegiatan olah raga adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan di sekolah. Pada tahun 2010 sebanyak 21 kegiatan dan pada tahun 2012 sebanyak 10 kegiatan olahraga.

Data lapangan olah raga yang tercantum dalam tabel adalah lapangan olah raga yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat

khususnya lapangan sepakbola dan lapangan volley. Pada tahun 2011 tersedia 194 lapangan dan pada tahun 2012 menjadi 374 lapangan. Perbedaan cukup signifikan disebabkan pada tahun 2012 telah dilakukan pendataan sarana prasarana olahraga baik di sekolah maupun di masyarakat.

2.4.1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Sleman terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat.

Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban Pemkab Sleman juga meningkatkan jalinan hubungan dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres serta meningkatkan koordinasi melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).

Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti tabel 2.42:

Tabel 2.42
Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)			4	4	4
2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	6	8	5	3	4

Sumber : Badan Kesbanglinmas dan PB, 2012

2.4.1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Jumlah polisi pamong praja dan linmas menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, jumlah pos kamling menggambarkan ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Semakin meningkatnya rasio antara jumlah Pos Siskamling dibanding dengan jumlah penduduk menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengamanan diri meningkat.

Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan cepat dan jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang tetap menyebabkan rasio antara jumlah penduduk dan polisi Pamong Praja semakin meningkat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Satpol PP dibantu Anggota Linmas yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Sleman (6.813 orang). Rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah Linmas di Kabupaten Sleman sudah jauh melebihi apa yang dipersyaratkan dalam SPM yang seharusnya coverage 50% pada tahun 2015 tetapi di Sleman saat ini coveragenya sudah mencapai 66,85%.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah didukung adanya SIM Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintahan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman setiap tahun melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa layanan Pemerintah Kabupaten.

Cakupan pelayanan bahaya kebakaran di Kabupaten Sleman sudah cukup baik dengan gambaran sebagai berikut: sampai dengan tahun 2015 target cakupan pelayanan bencana kebakaran menurut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebesar 25%, namun dengan luas wilayah 574,82 km² dengan satu wilayah manajemen kerja (WMK) dengan radius 7,5 km. Jangkauan WKM Kabupaten Sleman adalah seluas 176,26 km sehingga cakupan pelayanan kebakaran sampai dengan tahun 2012 mencapai 30,66%.

Target tingkat waktu tanggap (RTR/Response Time Rate) sampai dengan tahun 2015 menurut SPM adalah sebesar 75% dan sampai dengan tahun 2010 RTR Kabupaten Sleman kondisinya adalah 83,3% dan tahun 2012 sebesar 91,66%. Hal ini terjadi karena suksesnya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat yang berarti juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencegah/menghindari dari bahaya kebakaran dan semakin meningkatnya sarpras kebakaran yang ada serta semakin profesionalnya petugas pemadam kebakaran sehingga response time rate semakin tinggi dan kedepan dengan rencana penambahan 1 WMK diharapkan seluruh wilayah rawan Kabupaten Sleman dapat tercover/masuk dalam WMK.

Terkait dengan penanganan bahaya kebakaran, cakupan pelayanan masih sangat kecil karena sarpras yang dimiliki sangat minim. Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel 2.43:

Tabel 2.43
Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No.	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,12	1,05	0,50	1,45	1,50
2.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	64,70	64,54	64,11	64,56	59,94
3.	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	40,30	43,14	43,14	43,41	37,53
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,13	4,48	4,49	5,19	5,45
5.	Penduduk Miskin (KK)	58.857	65.157	57.979	50.603	49.471
6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	Ada	Ada	Ada
7.	Penegakan PERDA	39,06 %	37,79 %	28,61 %	89,53	82,37%
8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 hari sekali	2 hari sekali	2 hari sekali	4 kali/minggu	2 kl/minggu
9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	64,34%	39,56%	37,79%	70%	71,26%
10.	Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,65 %),65 %	0,64 %	0,65%	0,60%
11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran			18,04%	18,04%	18,04%
12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	97,67 %	97,67 %	93 %	93%	93%
14.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	19	24	22	28	33
15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	75,25	75,34	78,67

Sumber : Badan Kesbanglinmas dan PB dan Kantor Satpol PP, 2012

2.4.1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang Aman Beragam, Bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Beberapa regulasi ketahanan pangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

- UU. No.7/1996 tentang pangan mengamanatkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari ketersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
 - PP. No.68/2002 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 7/1996 tentang ketahanan pangan
 - PP. No.3/2007 tentang Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan.
 - PP. No.38/2007 tentang ketahanan pangan termasuk urusan wajib
- Ketersediaan pangan pada tahun 2010 terjadi penurunan karena anomali cuaca dan serangan hama (OPT). Kondisi tahun 2011 mengalami penurunan dikarenakan serangan OPT/Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan produksi walau tidak signifikan dikarenakan terjadinya penambahan luas tanam seiring dengan datangnya musim penghujan sehingga terjadi peralihan komoditas dan penggunaan/aplikasi teknologi pengelolaan tanaman terpadu/PTT. Ketersediaan pangan adalah ketersediaan pangan berupa beras.

Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.44

Tabel 2.44
Perkembangan Ketersediaan Pangan
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Regulasi ketahanan pangan	UU No. 7 tahun 1996	UU No. 7 tahun 1996	UU No. 7 tahun 1996	UU No. 7 tahun 1996 Kep. Bupati No. 255/Kep. KDH/A/2 011 ttg Dewan Ketahanan Pangan	UU No.7 Tahun 1996
2	Ketersediaan pangan utama (ton)			168.158	147.074,62	197.073

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2012

2.4.1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Posyandu aktif. Adapun rata-rata kelompok binaan PKK dari tahun 2010 - 2012 mengalami kenaikan, hal ini menggambarkan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Sedangkan PKK aktif mengalami penurunan karena sebagian besar anggotanya sudah masuk kelompok binaan PKK di setiap RT/RW.

Untuk jumlah LSM dari tahun 2010 - 2012 sama, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka/transparan. Swadaya masyarakat dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2010 - 2012 mengalami kenaikan cukup tinggi, besaran kenaikannya tergantung pada dana stimulant yang diberikan. Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dititikberatkan pada pengabdian secara swadaya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.45:

Tabel 2.45
Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0,036	0,055	0,075	0,075	0,075
2	Jumlah kelompok binaan PKK	783	1.465	93	104	1.316
3	Jumlah LSM	61	72	124	124	124
4	PKK aktif	21.971	26.743	1.240	1.240	1.316
5	Jumlah PKK aktif	21.971	26.743	1.240	1.511	1.316
6	Posyandu aktif	1.484	1.484	1.484	1.484	1.127
7	Swadaya masyarakat terhadap program pemerintah (000)	7.180.110	13.877.488,8	36.159.123,5	19.771.000	27.246.590.279

Sumber : Badan KB, PM dan PP, 2012
Kantor Kesbang 2012
Bagian APP Setda 2012

2.4.1.23 Urusan Wajib Statistik

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistik yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik diantaranya; buku Sleman Dalam Angka, buku PDRB kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku indeks pembangunan gender, buku inflasi, buku penduduk pertengahan, buku statistik harga bangunan, buku IPM, buku statistik industri, buku kecamatan dalam angka, buku informasi pembangunan, dan buku Sistem Informasi Profil Daerah.

2.4.1.24 Urusan Wajib Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

Pelaksanaan SKPB tahun 2012 yang diterapkan di 46 SKPD mencapai 60,87%. Sedangkan pada tahun 2011 mencapai 58,69%.

Penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel 2.46:

Tabel 2.46
Pengelolaan Kearsipan Tahun 2008-2012
Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	63,91	63,59	63,31	68,02	66,67
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	41	44	26	26	26
3	Persentase SKPD menerapkan arsip secara baik (%)			54,35	58,69	60,87

Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2012

Rata-rata pengelolaan arsip secara baku mengalami penurunan persentase untuk kondisi tahun 2011 yaitu dari 68,02% sedangkan tahun 2012 mencapai 66,67%. Hal ini disebabkan karena dalam penilaian kearsipan tahun 2012 kualitas kriterianya ditingkatkan, namun secara umum pelaksanaan kearsipan tetap berjalan baik.

2.4.1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kabupaten Sleman untuk tahun 2012 adalah sebesar 0,00055. Angka rasio warnet/wartel tahun 2012 bertambah karena kebutuhan akan akses internet saat ini sudah sangat mudah, antara lain melalui free hotspot dan modem GSM/CDMA dengan biaya relative murah.

Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.47:

Tabel 2.47
Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi
Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,000481	0,000475	0,00055	0,00055	0,00055
2	Jumlah Surat Kabar Nasional	15	16	17	17	17
	Jumlah Surat Kabar Lokal	5	6	6	7	7
3	Jumlah penyiaran :					
	Radio Nasional (jaringan ke daerah)	5	5	5	5	5
	Radio Lokal	21	21	21	21	21
	TV lokal	5	5	5	5	5
	TV Nasional	11	11	11	11	11
4	Web site milik pemerintah daerah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
5	Pameran /expo yang diikuti oleh SKPD Pemerintah Daerah					

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Sleman sebagai partisipan berdasar tingkatan event :	14	14	14	9	10
	- Skala Event tingkat lokal/ daerah/ Kabupaten	16	16	16	4	4
	- Skala Event tingkat Regional	12	12	12	12	12
	- Skala Event tingkat Nasional	8	8	8	4	4
	- Skala Event tingkat Internasional					

Sumber : Dinas Hubkominfo dan Bagian Humas Setda, Bagian Perekonomian, 2012

2.4.1.26 Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka.

Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Jumlah perpustakaan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 850 unit dan dilengkapi dengan 4 armada perpustakaan keliling. Peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah jam/hari buka perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan mengikutkan petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel 2.48:

Tabel 2.48
Jumlah Pengunjung dan Koleksi Perpustakaan
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	59.965	74.216	89.427	100.044	102.710
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	42.721	47.520	50.163	51.278	54.114
	Fiksi (eksemplar)	10.949	12.085	12.812	13.138	14.402
	Non Fiksi (eksemplar)	28.068	31.274	32.820	33.383	34.541
	Majalah (eksemplar)	1.894	2.185	2.425	2.663	2.924
	Referensi (eksemplar)	1.810	1.976	2.106	2.118	2.107

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah, 2012

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.2.1 Urusan Pilihan Pertanian

Produktivitas padi dan bahan pangan utama meningkat dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi. Perkembangan indikator pertanian selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.49:

Tabel 2.49
Produktivitas Padi dan Kontribusi Per Sektor
Terhadap PDRB
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman (ADHB)

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012*
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	61,62	60,72	59,34	56,65	67,56
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	16,91	16,47	13,02	12,74	12,90
	Tanaman bahan makanan	13,30	12,89	12,37	9,11	9,45
	Tanaman perkebunan	0,45	0,44	0,44	0,38	0,37
	Peternakan dan hasil-hasilnya	2,10	2,06	1,99	2,12	2,17
	Kehutanan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	perikanan	1,01	1,03	1,10	1,10	0,94
2	Cakupan bina kelompok petani (kelompok)					
	TPH	220	172	943	1.063	1.174
	Ikan	315	315	387	427	507
	Ternak	518	504	598	666	737
	kebun	161	177	178	138	144

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2012

*) Angka sementara

2.4.2.2 Urusan Pilihan Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sleman sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi hutan produksi dan hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Masyarakat di Kabupaten Sleman selain membudidayakan jenis tanaman kayu juga telah mengembangkan hasil produksi kehutanan non kayu seperti madu yang dapat memberikan kontribusi

sektor kehutanan terhadap PDRB. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.50:

Tabel 2.50
Luas Lahan Kritis dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	6.237,00	6.237,00	4.248,8	3.948,5	3.723,8
2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,06	0,06	0,06	0,01	0,06

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2012

2.4.2.3 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber daya mineral yang dapat ditambang di Kabupaten Sleman adalah bahan galian golongan C (BGGC) meliputi pasir dan batu, andesit, breksi batu apung, dan tanah liat. Bahan Galian Golongan C pasir dan batu di Kabupaten Sleman pasokannya bergantung dari aktivitas Gunung Merapi.

Bahan galian gamping di Kabupaten Sleman tidak boleh ditambang karena lokasinya hanya terdapat di Kecamatan Gamping dan telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam atau Taman Wisata Alam Gunung Gamping dengan SK Menteri Pertanian Nomor: 526/KPTS/UM/7/1982 tanggal 21 Juli 1982. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya mineral dalam hal ini BGGC masih ditemui kegiatan penambangan yang tanpa izin dan sulit dikendalikan. Sektor pertambangan ini juga memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Semua padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari PLN tetapi masih terdapat kelompok rumah yang belum terjangkau yaitu terutama pada daerah terpencil dan pemukiman baru. Penyediaan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan penggunaan listrik tenaga surya. Sampai tahun 2012 telah terpasang 161 PLTS (sebagian rusak karena erupsi Merapi), selain itu juga dikembangkan pemanfaatan energi biogas sebanyak 163 unit. Sumberdaya mineral yang terdapat di Kabupaten Sleman semua masuk kategori bahan galian

golongan C. Potensi yang paling besar adalah pasir dan batu terutama yang berasal dari gunung merapi.

2.4.2.4 Urusan Pilihan Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman selama tahun 2010 - 2012 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,93% per tahun. Setelah mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2012 akibat erupsi Merapi, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 1,57 % dari tahun 2010. Pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan sebesar 4,29% dari tahun 2011.

Apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB, sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 - 2012 rata-rata sebesar 14,88% per tahun. Perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2010 - 2012 sebagai berikut:

Tabel 2.51
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor
Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2008 – 2012

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kunjungan wisatawan (orang)	2.276.478	3.595.924	3.226.976	3.277.728	3.418.254
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Hb (%)	14,66	15,07	14,91	15,03	15,30

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2012

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2012

2.4.2.5 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan konsumsi ikan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan dicapai melalui pembinaan kelompok perikanan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.52:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan produksi ikan. Peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2012 sebesar 3,36% terjadi karena adanya peningkatan produktivitas kolam, jumlah kelompok pembudidaya

meningkat 18,74% menjadi 507 kelompok, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan umum, serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidayaan ikan.

Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2012 meningkat 2,95% menjadi 28,60 kg/kapita/tahun dari 27,78 kg/kapita/tahun pada tahun 2011. Tingkat konsumsi tahun 2012 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi Provinsi DIY sebesar 23,01 kg/kapita/tahun.

Produksi ikan hias rata-rata tahun 2012 naik sebesar 11% dengan tujuan pemasaran Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta. Sementara, peningkatan produksi benih ikan sebesar 7,92% dipasarkan untuk kebutuhan Sleman, waduk di Jawa Tengah dan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat (seluruh data masih angka sementara).

Tabel 2.52
Indikator Urusan Perikanan
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Produksi perikanan (ton)	10.297,78	12.405	14.574,88	18.364,10	21.899,20
2	Konsumsi ikan	24,80%	25,95%	26,73%	27,78	78,65
3	Cakupan bina kelompok nelayan	315	315	387	427	507*)
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (benih)	704.545.500	748.435.700	785.857.500	893.611.580	908.012.110

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2012

*) angka sementara

2.4.2.6 Urusan Pilihan Perdagangan

Selama tahun 2010-2012, sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 8,09% per tahun. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 - 2012 mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 25,64% per tahun, yaitu dari US\$ 23.614.793 pada tahun 2010 menjadi US\$ 37.039.270 pada tahun 2012.

Tabel 2.53
Kontribusi Terhadap PDRB dan Nilai Ekspor Sektor
Perdagangan
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)	7,71	8,00	8,11	8,11	8,15
2	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)	33.831.618	35.191.539	23.614.793	32.023.058	37.039.270
3	Cakupan bina usaha informal (PKL)	1.001	911	935	804	991

Sumber: - BPS Kab. Sleman
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Dinas Pasar, 2013

Jumlah usaha informal (PKL) di Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2012 mengalami kenaikan yaitu dari 935 pada tahun 2010, naik menjadi 959 pada tahun 2011 dan naik lagi menjadi 991 pada tahun 2012.

2.4.2.7 Urusan Pilihan Perindustrian

Selama tahun 2010- 2012, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 14,32% per tahun. Jumlah industri di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,42%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga mengalami kenaikan rata-rata 1,36% yaitu dari 15.289 unit pada tahun 2010 menjadi 15.707 unit pada tahun 2012. Jumlah pengrajin yang dibina selama tahun 2010 - 2012 juga meningkat yaitu sebesar 13,05% pada tahun 2010 menjadi 17,41% pada tahun 2012. Data tersebut sebagaimana pada tabel 2.54:

Tabel 2.54
Indikator Urusan Perindustrian
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb (%)	14,33	14,18	14,16	14,39	13,62
2	Pertumbuhan Industri (%)	0,39	2,80	1,88	1,09	1,74
3	Jumlah industri kecil & rumah tangga (buah)	14.610	15.012	15.289	15.449	15.707
4	Cakupan bina	6,13	8,99	13,05	14,27	17,41

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
	pengrajin (%)					

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2012

- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Sleman, 2012

2.4.2.8 Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Untuk pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui transmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa.

Untuk transmigrasi swakarsa di kabupaten mulai memberangkatkan di tahun 2007. Pada tahun 2012 ini mencapai 33,33% dari jumlah transmigran yang terkirim adalah transmigrasi swakarsa. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.55:

Tabel 2.55
Persentase Transmigran Swakarsa
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Transmigran swakarsa (%)	16,33	18,52	33,33	33,33	33,33

Sumber : Dinas Nakerosos Kab. Sleman 2012

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 - 2012 mengalami kenaikan sebesar 10,17% per tahun yaitu dari Rp. 20.813.980 pada tahun 2010 menjadi Rp. 25.260.699 pada tahun 2012.

Peningkatan konsumsi rumahtangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat.

Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan

per kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun 2010 - 2012 rata-rata sebesar 52,68%.

Produktivitas total Kabupaten Sleman selama tahun 2010 - 2012 menunjukkan kenaikan sebesar 8,97% per tahun, yaitu dari Rp. 23.705.217 per angkatan kerja pada tahun 2010 menjadi Rp. 29.004.746 per angkatan kerja pada tahun 2012. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.56:

Tabel 2.56
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per Kapita
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012*
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Hb)	17.235.325	25.254.039	20.813.986	22.925.637	25.552.069
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Hb)	51,99	52,35	52,52	52,68	52,59
3	Produktivitas total daerah	20.197.939	21.913.162	23.705.217	25.457.722	29.004.746

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2012

*Angka proyeksi

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sleman. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya:

1) Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah.

Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik. Data dapat dilihat sebagaimana tabel 2.57:

Tabel 2.57
Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,140 km/kend	0,140 km/kend	0,130 km/kend	0,130 km/kend	0,130 km/kend
2	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	5.584.375	5.611.705	5.705.876	5.641.029	4.463.688

Sumber : Dinas Hubkominfo, 2012 ,

2) Sarana Perekonomian

Jumlah restoran di Kabupaten Sleman lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah makan. Pada tahun 2010, persentase jumlah restoran sebesar 20,00%, sedangkan jumlah rumah makan sebesar 80,00%. Pada tahun 2012, persentase jumlah restoran mengalami kenaikan menjadi 21,30%, sedangkan prosentase jumlah rumah makan menjadi 78,70%.

Persentase jumlah penginapan di Kabupaten Sleman terbesar adalah pondok wisata, yaitu sebesar 61,43% pada tahun 2010 menjadi 60,00% pada tahun 2012. Persentase hotel melati di Kabupaten Sleman sebesar 34,44% pada tahun 2010 menjadi 34,39% pada tahun 2012. Demikian juga jumlah hotel berbintang di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebesar 4,13% menjadi 5,61% pada tahun 2012. Persentase tersebut dapat dilihat pada tabel 2.58:

Tabel 2.58
Persentase Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jenis dan jumlah restoran					
	- restoran (%)	20,65	21,49	20,00	21,21	21,30
	- rumah makan (%)	79,35	78,51	80,00	78,79	78,70
2	Jenis dan Jumlah hotel					
	- hotel berbintang (%)	3,75	3,78	4,13	5,04	5,61
	- hotel melati (%)	29,76	32,43	34,44	34,76	34,39
	- pondok wisata (%)	66,49	63,78	61,43	60,20	60,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2012

3) Jaringan Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman. Data rasio elektrifikasi berdasarkan data PT PLN (Persero) APJ Yogyakarta, Desember 2012 99,07% (Dinas PUP-ESDM DIY, 2012).

2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan Daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas.

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Sleman.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Kondisi iklim investasi dapat dilihat pada tabel 2.59:

Tabel 2.59
Indikator Iklim Investasi
Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka kriminalitas	11,36	16,30	12,08	6,63	13,76
2	Jumlah demo (kali)	100	77	56	9	15
3	Lama proses perijinan (hari)	13,8 hr	13,8 hr	11,6	11,6	11,6
4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	37	38	39	39	39
5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	2	5	5	7

Sumber : data diolah dari berbagai sumber, 2012.

2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

1) Ketenagakerjaan

Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Sleman tahun 2010 mencapai angka 41,75%, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 41 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas) demikian juga di Tahun 2012 rasio ketergantungan mencapai angka 41,82% berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 41 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.60:

Tabel 2.60
Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2008 - 2012
Kabupaten Sleman

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan (%)		
	0-14 tahun	15-64 tahun	≥ 65 tahun	Anak	Lansia	Total
2008	212.191	727.910	100.118	29	14	43
2009	198.399	782.624	72.542	25	9	34
2010	238.931	771797	83.294	31	11	42
2011	242.134	744.947	90.223	31	12	43
2012	243.527	790.740	80.566	31	10	41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2012

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama periode 5 tahun, yaitu sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Otonomi daerah berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

1. Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah dilihat dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kab. Sleman
Tahun Anggaran 2008-2012

Uraian	Rencana Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian %	Kontribusi terhadap pendapatan
Pendapatan Asli Daerah				
2008	106.758.631.343,00	140.631.359.142,43	131,73	14,85
2009	128.918.153.263,99	157.231.267.811,84	121,96	15,78
2010	147.072.535.017,99	163.056.459.137,93	110,86	14,88
2011	203.390.183.768,00	226.686.250.221,47	111,45	17,28
2012	237.016.799.892,71	241.003.081.720,31	101,68	16,33
Dana Perimbangan				
2008	758.169.621.359,00	785.937.430.122,00	103,66	83,04
2009	724.463.105.588,00	717.703.169.280,00	99,07	72,05
2010	737.807.079.540,00	740.198.028.398,00	100,32	67,55
2011	743.620.254.911,00	753.889.009.957,00	101,38	57,48
2012	916.800.329.387,00	916.800.268.049,00	99,99	62,15
Lain-lain Pendapatan yang sah				
2008	19.407.929.690,00	19.907.238.828,00	102,57	2,11
2009	101.651.966.200,00	121.248.277.600,00	119,28	12,17
2010	100.524.544.200,00	192.374.400.024,00	191,37	17,55
2011	291.260.241.975,50	330.861.266.810,00	113,59	25,22
2012	245.272.422.360,00	317.325.128.078,00	129,37	21,51
Total Pendapatan Daerah				
2008	884.336.182.392	946.476.028.092,43	107,03	100
2009	955.033.225.051,99	996.182.714.691,84	104,31	100
2010	985.404.158.757,99	1.095.628.887.559,93	111,18	100
2011	1.238.270.680.654,50	1.311.436.526.988,47	105,90	100
2012	1.462.912.184.629,71	1.475.128.477.847,31	100,83	100

Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kab. Sleman Tahun 2008-2012

Berdasarkan data perkembangan pendapatan asli daerah dari tahun 2008-2012 terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp140.630.000.000 pada tahun 2008 menjadi Rp241.000.000.000 pada tahun 2012.

Penerimaan daerah dari Dana perimbangan pada tahun 2008 mencapai Rp785.900.000.000 menjadi Rp916.800.000.000 pada tahun 2012. Sedangkan lain-lain pendapatan jumlahnya terus meningkat dari Rp19.900.000.000 pada tahun 2008, menjadi Rp317.300.000.000 pada tahun 2012.

Pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp946.470.000.000 pada tahun 2008 menjadi Rp1.475.000.000.000 pada tahun 2012 atau rata-rata kenaikan sebesar 11,85%.

Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu 5 tahun, realisasi pendapatan selalu melampaui target, untuk PAD rata-rata sebesar 115,53%, dana perimbangan sebesar 100,88%, lain-lain pendapatan

rata-rata sebesar 131,23% dan total pendapatan rata-rata mencapai 105,85% dari target.

Dana perimbangan memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan daerah, rata-rata sebesar 68,45%, yang berarti ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Sumbangan pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 15,82%.

Tabel 3.2
Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Tahun 2008-2012

Uraian	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Kemampuan %
Pendapatan asli Daerah			
2008	140.631.359.142,43	906.618.990.410,50	15,51
2009	157.231.267.811,84	1.016.026.601.135,37	15,47
2010	163.056.459.137,93	1.131.602.398.904,14	14,40
2011	226.686.250.221,47	1.278.166.681.380,30	17,73
2012	241.003.081.720,31	1.595.739.879.570,00	15,10
Dana Perimbangan			
2008	785.937.430.122,00	906.618.990.410,50	86,68
2009	717.703.169.280,00	1.016.026.601.135,37	70,63
2010	740.198.028.398,00	1.131.602.398.904,14	65,41
2011	753.889.009.957,00	1.278.166.681.380,30	58,98
2012	916.800.268.049,00	1.595.739.879.570,00	57,45
Lain-lain Pendapatan yang sah			
2008	19.907.238.828,00	906.618.990.410,50	2,19
2009	121.248.277.600,00	1.016.026.601.135,37	11,93
2010	192.374.400.024,00	1.131.602.398.904,14	17,00
2011	330.861.266.810,00	1.278.166.681.380,30	25,88
2012	317.325.128.078,00	1.595.739.879.570,00	19,88
Total Pendapatan Daerah			
2008	946.476.028.092,43	906.618.990.410,50	104,39
2009	996.182.714.691,84	1.016.026.601.135,37	98,04
2010	1.095.628.887.559,93	1.131.602.398.904,14	96,82
2011	1.311.436.526.988,47	1.278.166.681.380,30	102,60
2012	1.475.128.477.847,31	1.595.739.879.570,00	92,44

Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kab. Sleman Tahun 2008-2012

Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, dapat dilihat dari rasio PAD terhadap realisasi belanja. PAD hanya mampu membiayai rata-rata 15,64% dari kebutuhan belanja. Proporsi terbesar untuk pembiayaan pembangunan berasal dari dana perimbangan rata-rata 67,83%.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman yaitu :

- a. Retribusi mengalami penurunan diantaranya yang sangat signifikan adalah hilangnya potensi penerimaan dari retribusi IPPT sebesar Rp6.000.000.000 pada tahun 2011;
- b. Pajak daerah mengalami kenaikan karena ada penambahan pajak (air tanah, BPHTB, PBB) dan perluasan basis pajak (hotel, restoran dan hiburan).

Adanya tambahan kewenangan pengelolaan pajak daerah berupa pajak air tanah, BPHTB dan PBB yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah, memiliki dampak yang luas dalam pengelolaan keuangan secara lebih mandiri namun di sisi lain juga dituntut peningkatan profesionalitas para pengelolanya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Perkembangan belanja daerah dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sleman
Tahun anggaran 2008-2012

N	Tahun/Uraian	Rencana	Realisasi	Penca- paian %	Pro por- si Ter- ha- dap total belanj- a %
1	2008				
	Belanja Tidak Langsung	665.822.250.989,06	599.135.141.635,50	89,98	66,08
	Belanja Pegawai	552.847.881.367,47	506.121.542.451,11	91,55	55,83
	Belanja Bunga	144.000.000,00	120.031.476,89	83,35	0,01
	Belanja Subsidi	10.058.273.700,00	10.042.470.518,00	99,84	1,11
	Belanja Hibah	0	0	0	0
	Belanja Bantuan Sosial	56.901.857.739,00	45.390.060.594,50	79,76	5,01
	Belanja Bagi hasil/ Keuangan bagi Pemdes	37.719.167.145,59	37.154.739.595,00	98,50	4,09
	Belanja Tak Terduga	8.151.071.037,00	306.297.000,00	3,75	0,03

N	Tahun/Uraian	Rencana	Realisasi	Penca- paian %	Pro por- si Terha- dap total belanj- a %
	Belanja Langsung	385.046.179.566,00	307.483.849.775,00	82,4 5	33,92
	Jumlah Belanja 2008	1.050.868.430.555,06	906.618.990.410,50	86,2 7	100
2	2009				
	Belanja Tidak Langsung	738.515.507.832,57	672.284.745.483,73	91,0 3	66,16
	Belanja Pegawai	599.980.207.667,00	556.313.854.100,82	92,7 2	54,75
	Belanja Bunga	144.000.000,00	102.458.156,61	71,1 5	0,01
	Belanja Subsidi	10.800.000.000,00	10.188.094.637,00	94,3 5	1,01
	Belanja Hibah	19.411.418.350,00	19.401.427.758,00	99,9 5	1,90
	Belanja Bantuan Sosial	59.779.802.439,00	46.289.206.623,30	77,4 3	3,71
	Belanja Bagi hasil/ Keuangan bagi Pemdes	41.990.404.067,40	39.989.704.208,00	95,2 4	1,50
	Belanja Tak Terduga	6.409.675.309,17	0	0	0
	Belanja Langsung	400.486.975.131,01	343.740.331.808,64	85,8 3	33,84
	Jumlah Belanja 2009	1.139.002.482.963,58	016.026.601.135,37	89,2 1	100
3	2010				
	Belanja Tidak Langsung	714.414.696.411,85	782.307.301.323,83	109,50	69,14
	Belanja Pegawai	571.211.809.040,33	688.994.947.281,52	120,61	60,88
	Belanja Bunga	144.000.000,00	77.980.369,31	54,15	0,006
	Belanja Subsidi	78.268.930.600,00	18.413.622.487,0 0	23,52	1,62
	Belanja Hibah	29.208.271.343,20	32.161.755.577,0 0	110,11	11,36
	Belanja Bantuan Sosial	16.316.145.467,40	19.528.558.295,0 0	119,68	1,72
	Belanja Bagi hasil/ bantuan Keuangan	14.939.060.733,00	18.726.347.000,0 0	125,35	1,65

N	Tahun/Uraian	Rencana	Realisasi	Penca- paian %	Pro por- si Ter- ha- dap total belanj- a %
	bagi Pemdes				
	- Belanja Tak Terduga	4.326.479.227,92	4.404.090.314,00	101,79	0,38
	- Belanja Langsung	314.161.660.480,00	349.295.097.580, 31	111,18	30,86
	Jumlah Belanja 2010	1.028.576.356.891, 52	131.602.398.904,14	110,01	100
4	2011				
	- Belanja Tidak Langsung	909.392.149.319,55	883.296.136.268, 22	97,13	69,10
	- Belanja Pegawai	800.542.516.815,55	776.376.372.436, 07	96,98	60,74
	- Belanja Bunga	144.000.000	61.570.548,15	42,75	0,004
	- Belanja Subsidi	0	0	0	0
	- Belanja Hibah	32.647.347.000,00	36.819.419.800,0 0	112,77	2,88
	- Belanja Bantuan Sosial	30.760.489.225,00	30.102.115.317,0 0	97,8 5	2,35
	- Belanja Bagi hasil/bant uan Keuangan bagi Pemdes	40.593.514.959,00	39.447.435.167,0 0	97,1 7	3,08
	- Belanja Tak Terduga	4.704.281.320,00	489.223.000,00	10,3 9	0,03
	- Belanja Langsung	430.653.909.458,00	394.870.545.112,08	91,6 9	30,90
	Jumlah Belanja 2011	1.340.046.058.777,55	1.278.166.681.380,30	95,3 8	100
5	2012				
	- Belanja Tidak Langsung	1.077.461.921.321,40	1.094.707.553.577,51	101,60	67,87
	- Belanja Pegawai	957.531.161.852,64	958.072.749.327,51	100,05	59,39
	- Belanja Bunga	144.000.000,00	144.000.000,00	100	0,008
	- Belanja Subsidi	0	0	0	0
	- Belanja Hibah	58.935.910.990,00	50.562.429.581,00	85,79	3,13
	- Belanja Bantuan Sosial	6.514.899.500,00	17.211.724.500,00	264,19	1,06

N	Tahun/Uraian	Rencana	Realisasi	Penca- paian %	Pro por- si Terha- dap total belanj a %
	Belanja Bagi hasil/Bantuan Keuangan bagi Pmdes	46.722.471.862,32	47.779.471.860,00	102,26	2,96
	Belanja Tak Terduga	7.613.477.116	3.725.453.809,00	48,93	0,23
	Belanja Langsung	507.360.357.604,31	518.244.050.492,40	102,14	32,13
	Jumlah Belanja 2012	1.584.822.278.925,71	1.612.951.604.069,91	101,77	100

Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kab. Sleman Tahun 2008-2012

Dari data yang ada terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja rata-rata sebesar 67,67%, sedang belanja langsung rata-rata sebesar 32,33%. Proporsi terbesar dari belanja tidak langsung adalah untuk membiayai belanja pegawai. Sedangkan dana tak terduga di Kabupaten Sleman dialokasikan relatif sama besar setiap tahunnya dengan asumsi terjadi bencana rutin terkait siklus erupsi Merapi 4 tahunan hingga 6 tahunan.

3. Pembiayaan Daerah

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan Pasal 17 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 83 ayat (2) berikut penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, APBD serta Jumlah Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 % dari produk domestik regional brutto tahun bersangkutan. Pinjaman daerah direncanakan untuk memenuhi belanja yang merupakan prioritas dan diakhir tahun pinjaman tersebut seringkali tidak terealisasi karena kekurangan tersebut dapat ditutup dengan SILPA yang ada. Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008-2012 seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Sleman
Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Surplus / Defisit	39.857.037.681,99	(19.843.886.443,53)	(151.664.430.348)	38.545.970.947,00	10,00
2	Penerimaan Pembiayaan	196.057.953.958,06	213.907.757.911,59	164.125.626.539,66	111.413.870.267,05	138.548.094.296,00
3	Pengeluaran Pembiayaan	22.007.233.728,40	29.938.244.928,40	16.738.244.928,40	6.137.744.928,40	17.936.692.583,31
4	Pembiayaan netto	174.050.720.229,66	183.969.512.983,19	147.387.381.611,26	105.276.125.338,65	120.611.401.712,69
5	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	213.907.757.911,59	164.125.626.539,66	111.592.571.433,88	111.413.870.267,05	138.548.094.296,00

Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kab. Sleman Tahun 2008-2012

3.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 5
Neraca Konsolidasi Tahun 2008-2012

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
ASET					
ASET LANCAR					
Kas	164,994,670,100.09	216,941,621,405.69	111,947,483,939.22	139,891,052,527.78	290,117,255,146.22
Piutang Pajak	7,848,218,609.20	8,850,086,581.67	1,759,611,790.16	5,077,124,558.46	2,514,659,138.37
Piutang Retribusi	1,774,449,904.00	3,326,952,145.00	4,974,217,895.67	3,315,000,440.00	4,217,416,127.80
Piutang lainnya	403,142,035.00	389,237,485.00	1,668,129,024.00	4,139,252,258.00	4,928,627,569.06
Persediaan	16,234,253,541.45	12,364,198,657.93	19,130,114,970.02	17,968,908,392.17	56,983,232,635.18
Jumlah Aset Lancar	191,254,734,189.74	241,872,096,275.29	139,479,557,619.07	170,391,338,176.41	355,171,289,883.86
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen	49,659,493,820.00	42,305,663,320.00	55,166,126,822.00	54,942,952,578.00	50,856,069,417.00
Investasi Permanen	92,433,495,216.07	69,233,995,223.07	88,047,222,471.07	97,511,074,727.57	117,351,601,825.85
Jumlah Investasi Jangka Panjang	142,092,989,036.07	111,539,658,543.07	143,213,349,293.07	152,454,027,305.57	168,207,671,242.85
ASET TETAP					
Tanah	147,082,172,175.00	119,214,439,510.00	146,650,422,175.00	565,033,403,925.00	595,243,658,586.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,189,966,885,662.00	1,167,247,289,291.00	1,260,888,832,882.00	912,082,540,538.77	903,722,855,942.07
Gedung dan Bangunan	638,707,543,646.00	524,205,224,391.00	536,826,809,034.81	696,437,089,546.60	734,813,161,419.60

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
Peralatan dan Mesin	230,988,634,405.00	145,015,407,520.00	243,045,178,830.00	283,152,815,265.64	333,341,799,815.69
Aset Tetap Lainnya	23,038,553,227.00	61,615,135,783.00	37,364,532,291.00	47,467,773,292.96	52,379,231,183.30
Konstruksi dalam Pengerjaan	9,143,579,016.00	1,156,541,000.00	4,816,651,570.00	327,704,550.00	193,329,000.00
Jumlah Aset Tetap	2,238,927,368,131.00	2,018,454,037,495.00	2,229,592,426,782.81	2,504,501,327,118.97	2,619,694,035,946.66
ASET LAINNYA					
Sistem Informasi	2,264,444,875.00	1,376,294,000.00	2,684,219,875.00	3,149,450,875.00	3,803,738,937.00
Aktiva lainnya	3,542,802,004.00	2,380,282,663.00	3,008,691,329.00	3,744,782,029.00	19,492,646,966.00
Built Operating Transfer (BOT)	272,874,000.00	4,926,000,000.00	272,874,000.00	272,874,000.00	272,874,000.00
Jumlah Aset Lainnya	6,080,120,879.00	8,682,576,663.00	5,965,785,204.00	7,167,106,904.00	23,569,259,903.00
JUMLAH ASET	2,578,355,212,235.81	2,380,548,368,976.36	2,518,251,118,898.95	2,834,513,799,504.95	3,166,642,256,976.37

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Menjamin ketersediaan pendataan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional;
- c. Menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan, dengan alternatif melakukan pinjaman kepada pihak-pihak lainnya dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan resiko fiskal lainnya;
- d. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin;
- e. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- f. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

3.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, maka kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Terkait dengan pos pendapatan daerah, dalam lima tahun ke depan perlu diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah, antara lain menyangkut permasalahan: aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga perbankan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita agar kinerja perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target dan skenario yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal;
- 3) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan penerimaan daerah pada umumnya;
- 4) Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

b. Perbaikan manajemen

Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.

Salah satu upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pengembangan BUMD dan BLUD. Strategi pengembangan

BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah melalui penyertaan modal yang dialokasikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Terdapat 2 BUMD yaitu PDAM Sleman dan PD BPR Bank Sleman.

Bagi PDAM, penyertaan modal dipergunakan untuk mengoptimalkan potensi dan diversifikasi produk, sehingga cakupan luas wilayah yang terlayani meningkat dan kualitas produk meningkat.

Bagi PD BPR Bank Sleman, penyertaan modal dipergunakan untuk menambah cakupan pelayanan, sehingga masyarakat yang terlayani lebih banyak.

Sedangkan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam pelayanan termasuk pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan mekanisme PPK – BLUD.

Sebagai salah satu langkah efisiensi birokrasi pemerintahan mulai tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sleman memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Dengan sistem ini diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Organisasi pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

c. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.

d. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat dilaksanakan dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai melalui perbaikan administrasi aset, peningkatan *turnover*, bekerjasama dengan swasta, dan perlu didukung rencana untuk membentuk badan usaha baru

Optimalisasi aset Pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui sensus aset dan dilakukan *up date* setiap tahun, sedangkan untuk pengelolaan rutinnya telah dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan perundangan terkait aset. Hasil sensus aset dapat diketahui aset yang belum optimal pemanfaatannya sehingga diperlukan kebijakan untuk mendayagunakan aset secara lebih optimal.

e. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Penghitungan DAU didasarkan pada celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi (IKK), indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks PDRB. Sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas penerimaan asli daerah (PAD) ditambah dana bagi hasil pajak dan SDA yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah.

Analisis tentang celah fiskal ini tidak merupakan acuan utama Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memproyeksikan DAU. Sebagai gambaran, pada tahun 2009, IKK Kabupaten Sleman sebesar 199,11 (lebih rendah 32,49 dari IKK rata-rata nasional sebesar 231,60), kenaikan jumlah penduduk rata-rata pertahun sebesar 2,40%, dan besaran dana bagi hasil yang fluktuatif dengan pertumbuhan PAD sebesar rata-rata 15,43 % per tahun, maka proyeksi celah fiskal Pemerintah Kabupaten Sleman selama lima tahun kedepan diperkirakan akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan kebutuhan fiskal daerah dapat diimbangi dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah. Namun untuk alokasi dasar cenderung semakin besar mengingat semakin meningkatnya jumlah PNS daerah yang tentu saja akan memperbesar

jumlah anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar gaji PNS daerah.

Sumber dana dari dana alokasi khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan asli daerah, dapat berdampak yang tanpa disadari akan melupakan substansi dari nilai-nilai pelayanan. Hal tersebut terjadi apabila satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga SKPD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu segenap unsur pemerintah perlu menyadari dan konsisten dalam menjalankan kebijakan terutama terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai fungsi-fungsi kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Sleman menyadari hal tersebut sehingga kebijakan yang diterapkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah akan tetap memperhatikan aspek pelayanan dan senantiasa menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha, serta memperhatikan kepentingan masyarakat miskin.

Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman, proporsi sumber pendapatan asli daerah rata-rata dibawah 20% dari

total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Di samping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba badan usaha milik daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

3.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2011-2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas

dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

e. **Transparan dan Akuntabel**

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (*efisiensi*). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (*efektivitas*). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (*transparansi*). Sehingga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (*akuntabilitas*).

3.2.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus yang diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2011-2015, adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat;
- c. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada:
 - 1) Pemanfaatan pendapatan asli daerah secara proporsional pada program prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - 2) Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah;

- 3) Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelolaan pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum;
- 4) Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial.

3.3.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada periode 5 (lima) tahun kedepan (2011-2015) akan melanjutkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga trend kedepan komposisinya untuk pelayanan publik semakin bertambah besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifat *cost recovery* dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah.

Perhitungan secara teoritis dengan asumsi dasar yang kuat tentang kedua kebijakan diatas yang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja daerah akan sangat strategis di dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2011-2015.

Guna mewujudkan Kabupaten Sleman yang mandiri, sebagai antisipasi kemungkinan terus menurunnya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, perlu diusahakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan tetap mengusahakan semaksimal mungkin berbagai kebijakan yang akan dilakukan tidak membebani masyarakat.

a. Kebijakan belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah komponen belanja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya meliputi gaji pegawai dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

- 1) Belanja Gaji
 - a) Penganggaran Gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan kenaikan accres gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - d) Bunga
Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - e) Subsidi
Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
 - f) Hibah
Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah;
 - g) Bantuan Sosial
Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya;
 - h) Bagi hasil
Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi

kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa;

i) Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan;

j) Belanja tidak terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).

b. Kebijakan belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sleman,

Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Sleman.

Tabel 3.5a

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi
1	Pendapatan	2.027.483.794.413
2	Belanja	2.160.857.840.659,43
	Surplus/(defisit)	(133.374.046.246,43)
3	Pembiayaan:	
	Penerimaan pembiayaan	152.374.046.246,43
	Pengeluaran Pembiayaan	19.000.000.000
	Pembiayaan netto	133.374.046.246,43

Penggunaan kapasitas riil keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai belanja prioritas yang terbagi menjadi 3, yaitu:

Prioritas I

Prioritas I berisi program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala Daerah dan amanat/kebijakan nasional yang didalamnya termasuk kewajiban untuk anggaran pendidikan sebesar 20% serta anggaran kesehatan yang secara bertahap dianggarkan sebesar 10%. Selain itu, prioritas I juga berisi belanja yang wajib dan mengikat termasuk didalamnya adalah anggaran untuk gaji pegawai di lingkungan Kabupaten Sleman.

Prioritas II

Program prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Dengan demikian belanja pada prioritas II berisi belanja langsung di semua SKPD dikurangi belanja yang sudah dianggarkan pada prioritas I

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksud untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

3.3.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh

lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.6
Prediksi Keuangan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2013-2015 (Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	PAPBD	RAPBD	PREDIKSI APBD
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1,768,438,488,350	1,815,743,353,957	2,027,483.794,413
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	342,895,307,198	383,497,911,987	550,537,911,987
4.1.1.	Pajak Daerah	223,900,000,000	234,300,000,000	223,900,000,000
4.1.2.	Retribusi Daerah	26,304,202,320	32,537,957,280	48,537,957,280
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14,355,000,000	18,732,733,000	25,732,733,000
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	78,336,104,878	97,927,221,707	127,927,221,707
4.2.	Dana Perimbangan	992,417,480,016	1,050,578,931,090	1,076,025,111,546
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50,004,238,016	49,803,219,090	49,569,399,546
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	891,589,912,000	952,102,502,000	952,102,502,000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	50,823,330,000	48,673,210,000	48,673,210,000
1.2.5.	Dana Insentif Daerah			25,680,000,000
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	433,125,701,136	381,666,510,880	400,920,770,880
4.3.1.	Hibah			
4.3.2.	Dana Darurat			
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	125,109,605,256	108,917,233,000	125,000,000,000
4.3.4.	Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS)			
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	29,050,000,000		29,050,000,000
4.3.6.	Dana Tunjangan Pendidikan (Sertifikasi + insentif)	246,870,770,880	246,870,770,880	246,870,770,880
1.2.5	Dana Insentif Daerah	32,095,325,000	25,878,507,000	
5	BELANJA DAERAH	1,946,380,363,065	1,924,625,245,404	2,160,857,840,659,43

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	URAIAN	PAPBD	RAPBD	PREDIKSI APBD
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
5.1.	Belanja Tidak Langsung	1,215,579,447,777	1,192,675,297,400	1,260,721,840,659,43
5.1.1.	Belanja Pegawai	1,025,827,941,557	1,049,047,527,338	1,099,715,698,938
5.1.2.	Belanja Bunga	144,000,000	144,000,000	
5.1.3.	Belanja Subsidi	34,745,931,658	0	22,380,096,030
5.1.4.	Belanja Hibah	45,430,797,100	14,636,645,800	25,113,485,950
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	28,581,731,500	33,197,077,000	28,431,731,500
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	33,879,052,827	34,947,552,827	36,879,052,826,99
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah	34,574,225,000	40,302,900,000	
5.1.7.1	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten			1,507,600,000
5.1.7.2	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa			38,066,625,000
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	12,395,768,135	20,399,594,435	8,627550414,44
5.2.	Belanja Langsung	730,800,915,288	731,949,948,004	900,136,000,000
5.2.1	Belanja Pegawai	135,696,427,280	138,031,269,170	
5.2.2	Belanja barang dan Jasa	334,114,081,863	312,600,011,234	
5.2.3	Belanja Modal	260,990,406,145	281,318,667,600	
	Surplus/(Defisit)	(177,941,874,715)	(108,881,891,447)	(133,374,046,246,43)
		(0.10)	(0.06)	(0.06)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	289,079,874,715	109,019,891,448	152,374,046,246,43
6.1.3	Perkiraan SILPA	289,079,874,715	109,019,891,448	117,374,046,246,43
	Penerimaan pinjaman daerah			35,000,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	289,079,874,715	109,019,891,448	152,374,046,246,43
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	111,138,000,000	138,000,000	19,000,000,000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	111,000,000,000		10,000,000,000
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	138,000,000	138,000,000	9,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	111,138,000,000	138,000,000	19,000,000,000
	Pembiayaan Netto	177,941,874,715	108,881,891,448	133,374,046,246,43
				(0.06)

Asumsi prediksi keuangan tahun 2013-2015 sebagai berikut:

- a. Access gaji pegawai per tahun sebesar 2%;
- b. Belanja gaji pegawai tahun 2015 diasumsikan naik 5% dari tahun 2014;
- c. Belanja bunga tetap;

- d. DAU 2015 diasumsikan sama dengan DAU 2014;
- e. DAK diasumsikan tetap.

Formulasi kegiatan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2013-2015 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 10,40% dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen pajak daerah.

Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah 2 faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2015 atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah dirinci sebagai dasar perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan untuk lima tahun ke depan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Pelayanan Umum

4.1.1.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman saat ini dilakukan dengan diawali dari musyawarah pembangunan desa, musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Dengan dilakukannya proses tersebut diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Sleman dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) perhatian SKPD terhadap pentingnya dokumen perencanaan masih kurang;
- 2) kemampuan SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang;
- 3) kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan masih terbatas;
- 4) data pendukung perencanaan pembangunan kurang akurat;

- 5) kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masih kurang;
- 6) tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah;
- 7) belum sinerginya proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik;
- 8) dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, cenderung masih berupa *wishing list*, serta program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran;
- 9) adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya;
- 10) adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar wilayah;
- 11) proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah;
- 12) masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya;
- 13) belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasinya pembangunan.

4.1.1.2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 belum seperti yang diharapkan. Otonomi Daerah mengandung makna mengatur segala

sesuatunya secara mandiri, baik pengelolaan pemerintahan maupun pembiayaannya. Namun pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten masih tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengaturan sumberdaya aparatur. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;
- 2) Pengadaan pegawai belum sesuai antara formasi riil dengan formasi pegawai yang ditetapkan Pemerintah;
- 3) Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil;
- 4) Penegakan hukum belum efektif;
- 5) Produk hukum daerah masih banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- 6) SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar Operasional;
- 7) Pelayanan perijinan belum optimal;
- 8) Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal;
- 9) Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan.

4.1.1.3. Statistik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Penetapan data tunggal belum disepakati;
- 2) Data sektoral dari SKPD kurang konsisten;
- 3) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah;
- 4) Kualitas SDM di bidang kestatistikan belum memadai;
- 5) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan statistik belum memadai.

4.1.1.4. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumentasi daerah. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) sarana dan prasarana kearsipan belum memadai;
- 2) kualitas dan kuantitas SDM belum memadai;
- 3) Manajemen arsip belum dilaksanakan secara menyeluruh;
- 4) Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal.

4.1.1.5. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perpustakaan. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan belum memadai;
- 2) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai;
- 3) Minat baca masyarakat masih rendah.

4.1.1.6. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
- 2) Sistem informasi manajemen yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal;
- 3) e-government belum diimplementasikan secara optimal;
- 4) Kualitas sumberdaya manusia belum memadai ;
- 5) Adanya ketentuan pada tahun 2011 semua software harus berlisensi harus diantisipasi untuk penggunaan *open source*.

4.1.2. Ketertiban dan Keamanan

4.1.2.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu penciptaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat;
- 2) Penegakan Perda belum optimal;
- 3) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal;
- 4) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang;
- 6) Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun;
- 7) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih kurang.

4.1.2.2. Penanggulangan Bencana

Penanganan bencana alam yang dilaksanakan umumnya hanya sampai pada tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. Kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana belum banyak dilakukan. Paradigma harus dirubah dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan bencana.

Perubahan menuju paradigma pengelolaan bencana tersebut setidaknya mencakup tiga aspek berikut ini; 1) penanganan bencana tidak lagi difokuskan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko; 2) perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata kewajiban pemerintah; 3) penanganan bencana bukan lagi menjadi semata-mata tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama (antara pemerintah dengan masyarakat). Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Kegiatan penanggulangan bencana masih pada tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi sehingga belum menjadikan kegiatan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas;
- 2) Kelembagaan penanggulangan bencana masih melekat di SKPD Kesbanglinmas sehingga untuk kegiatan yang

dilakukan hanya sebatas pada mitigasi non fisik, sedangkan kegiatan mitigasi fisik dilakukan oleh SKPD yang lain, hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian sarana yang seharusnya dibutuhkan;

- 3) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih kurang;
- 4) Proses identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan system peringatan dini masih kurang;
- 5) Pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana belum dimanfaatkan.

4.1.3. EKONOMI

4.1.3.1. Perhubungan

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat;
- 2) Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas;
- 3) Banyak simpang jalan yang belum memenuhi syarat;
- 4) Pelayanan angkutan umum belum memadai;
- 5) Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
- 6) Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan yang padat lalu lintas, masih banyak yang belum dilengkapi KWH meter, dan masih banyak LPJU tanpa ijin/illegal;
- 7) Ruas jalan di Kabupaten Sleman belum diklasifikasikan berdasar kelas jalan;
- 8) Terminal angkutan barang dan *rest area* kendaraan barang belum tersedia;
- 9) Pemilik kendaraan wajib uji belum semua melakukan pengujian kendaraannya secara berkala.

4.1.3.2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja. Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- 3) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- 4) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai;

4.1.3.3. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Kualitas SDM pengelola koperasi/UMKM masih rendah;
- 2) Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah;
- 3) Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas;
- 4) Akses modal bagi UMKM masih terbatas.

4.1.3.4. Penanaman Modal

Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor. Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Pengelolaan promosi investasi belum optimal;
- 2) Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan;
- 3) Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas.

4.1.3.5. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di tingkat rumah tangga, distribusi pangan yang lancar dan konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan kualitas SDM. Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal;
- 2) Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan masih banyak;
- 3) Penegakan hukum distribusi pangan masih belum optimal;
- 4) Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun;
- 5) Peranan penyuluh pertanian dalam mendampingi petani belum optimal;
- 6) Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal.

4.1.3.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
- 2) Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal;
- 3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan cenderung menurun;
- 4) Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal;
- 5) Peran perempuan dalam pembangunan belum optimal;
- 6) Kemampuan keuangan desa dalam pembangunan masih terbatas;
- 7) Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib.

4.1.3.7. Pertanian

Penduduk Kabupaten Sleman mayoritas masih tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Sleman mengalami penurunan, tetapi dalam penyerapan tenaga kerja masih cukup tinggi. Pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya yang dimiliki. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;
- 2) Sarana dan prasarana produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani;
- 3) Serangan hama dan penyakit pertanian masih cukup tinggi;
- 4) Harga hasil produksi pertanian tidak stabil;
- 5) Pengelolaan lahan tegalan belum optimal;
- 6) Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah;
- 7) Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal;
- 8) Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal;
- 9) Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal;
- 10) Tata guna dan tata kelola air belum optimal;
- 11) Akses permodalan bagi petani belum merata.

4.1.3.8. Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sleman sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi, bukan produksi. Pada lereng Gunung Merapi bagian selatan, terdapat kawasan hutan lindung yang pengelolaannya dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Disamping kawasan hutan lindung, sebagian masyarakat di kabupaten Sleman juga membudidayakan beberapa jenis tanaman kayu sebagai kawasan konservasi dan hutan tanaman industri yang banyak terdapat di Prambanan, Cangkringan, Pakem, dan Gamping bagian selatan. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Ancaman kerusakan hutan oleh bencana letusan gunung merapi;
- 2) Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal;

- 3) Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang;
- 4) Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat dari kegiatan penambangan;
- 5) Luas lahan kritis masih cukup banyak.

4.1.3.9. Perikanan

Secara Geografis Sleman tidak mempunyai wilayah perairan laut, tetapi Perkembangan komoditas perikanan budidaya produksinya meningkat. Hal ini tidak terlepas dari melimpahnya potensi air yang berasal dari sumber mata air lereng Gunung Merapi maupun Selokan Mataram.

Dibandingkan dengan komoditas pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi, pelaku usaha di bidang perikanan lebih menarik. Pasar komoditas perikanan khususnya ikan konsumsi untuk wilayah dalam dan luar propinsi DIY masih terbuka lebar. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tata guna dan tata kelola air belum optimal;
- 2) Fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan belum optimal;
- 3) Produksi ikan konsumsi belum mampu mencukupi kebutuhan konsumen;
- 4) Akses permodalan petani perikanan masih kurang;
- 5) Kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan umum masih kurang.

4.1.3.10. Perdagangan

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Daya saing produk Sleman di pasar nasional maupun global masih rendah;
- 2) Kelancaran distribusi bahan pokok / barang strategis belum optimal;
- 3) Pelaku usaha dalam membaca peluang pasar kurang optimal;
- 4) Perlindungan konsumen belum optimal;
- 5) Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai.

4.1.3.11. Industri

Sebagai daerah penyangga bagi daerah lain yang secara geografis berada di bawahnya, Sleman tidak mungkin mempunyai kawasan industri besar yang sebenarnya secara ekonomis mampu meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu industri di Sleman diutamakan bagi industri yang ramah lingkungan dan padat karya. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Penguasaan dan penerapan teknologi bagi UMKM masih kurang;
- 2) Kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM masih rendah;
- 3) Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar;
- 4) Akses permodalan bagi UMKM masih rendah;
- 5) Ketersediaan bahan baku industri masih terbatas;
- 6) Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal.

4.1.3.12. Energi dan Sumberdaya Mineral

Semua padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari PLN, tetapi masih terdapat beberapa kelompok rumah yang belum terjangkau. Kelompok rumah yang belum terjangkau aliran listrik terutama pada daerah terpencil dan permukiman baru.

Sumberdaya mineral yang terdapat di Kabupaten Sleman semua masuk kategori bahan galian golongan C (BGGC). Potensi yang paling besar adalah pasir dan batu terutama yang berasal dari gunung merapi. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
- 2) Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal;
- 3) Perubahan pola penggunaan energi fosil dan kayu bakar ke gas LPG belum semua dilakukan oleh masyarakat;
- 4) Kelangkaan gas LPG kadang masih terjadi;
- 5) Kegiatan penambangan rakyat tidak berijin masih cukup banyak;
- 6) Kegiatan penambangan rakyat pada lahan produktif masih cukup banyak;
- 7) Kegiatan penambangan banyak tidak menggunakan kaidah teknis yang benar;

- 8) Kerusakan lahan akibat penambangan yang tidak diikuti dengan reklamasi masih cukup banyak.

4.1.3.13. Ketransmigrasian

Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Sleman selama ini mendasarkan pada kerjasama antara pemerintah daerah (baik pengirim maupun penerima) dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya sedangkan pola transmigrasi yang dilaksanakan adalah melalui Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM). Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat;
- 2) Relatif tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang tidak sebanding dengan jumlah kuota dari pemerintah pusat;
- 3) Lokasi tujuan transmigrasi seringkali belum siap, baik sarana dan prasarana dan administrasi pertanahan.

4.1.4. LINGKUNGAN HIDUP

4.1.4.1. Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan visi penataan ruang: yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, nyaman untuk menjalankan aktivitas dalam suasana yang tenang dan damai, produktif sehingga proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas lingkungan fisik untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh Kabupaten Sleman;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dan Rencana Rinci Tata Ruang yang telah disusun sampai saat ini ada yang belum ditetapkan menjadi produk hukum;
- 3) Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- 4) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;

- 5) Pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan masih banyak;
- 6) Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan kegiatan masih kurang.

4.1.4.2. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan di Kabupaten Sleman secara umum masih cukup baik. Ini terbukti dari hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara yang dilakukan oleh KPDL hampir semua parameter masih dibawah baku mutu, walaupun ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan semakin terbatas;
- 2) Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi;
- 3) Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi;
- 4) Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin berkurang;
- 5) Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan;
- 6) Penanganan air limbah rumah tangga /domestik belum dilakukan secara terpadu;
- 7) Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
- 8) Dampak pemanasan global semakin meningkat.

4.1.4.3. Pertanahan

Penatagunaan tanah meliputi pengaturan penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan penguasaan tanah. Kebijakan pemanfaatan tanah di Kabupaten Sleman dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui proses perizinan peruntukan penggunaan tanah, sedangkan pengadministrasian penggunaan tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan.

Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pensertifikatan tanah pada masyarakat, telah dilaksanakan program LARASITA (Pelayanan Rakyat untuk Pensertifikatan Tanah). Yaitu pelayanan pensertifikatan tanah dengan menggunakan mobil keliling ke wilayah-wilayah yang jauh

dari kantor pertanahan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Sertifikasi tanah kas desa, tanah pemda maupun tanah hak milik masih rendah;
- 2) Pengelolaan tanah pemerintah (Negara, Pemkab, Kas Desa) belum baik;
- 3) Pengelolaan sistem informasi pertanahan belum optimal;
- 4) Pelayanan perijinan dan sertifikasi pertanahan belum optimal;

4.1.5. PERUMAHAN

4.1.5.1. Pekerjaan Umum

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum meliputi pengelolaan jalan, jembatan, dan irigasi. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan perkembangan perekonomian daerah. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi terus diupayakan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Sebagai daerah penyangga air bagi daerah di bawahnya Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk menjadikan wilayahnya menjadi daerah konservasi dengan memperbanyak tampungan air melalui pembangunan embung. Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan;
- 2) Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan;
- 3) Pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan masih banyak terjadi;
- 4) Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
- 6) Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang;
- 7) Konflik kepentingan pemanfaatan air irigasi masih sering terjadi;

4.1.5.2. Perumahan

Permukiman akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pelaksanaan urusan perumahan meliputi penataan perumahan dan prasarana dan sarana lingkungan perumahan seperti air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, permakaman. Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan masih banyak yang belum diserahkan pada Pemerintah Daerah;
- 2) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana permukiman masih kurang;
- 3) Pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman;
- 4) Pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat;
- 5) Rumah tidak layak huni masih cukup banyak;
- 6) Penyediaan tempat pemakaman umum bagi perumahan masih kurang;
- 7) Pengelolaan sistem drainase belum memadai;
- 8) Rumah yang belum ber IMB masih cukup banyak.

4.1.6. Kesehatan

4.1.6.1. Kesehatan

Dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan telah dicapai kemajuan penting berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai beberapa indikator yaitu meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir, menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu dan berkurangnya persentase balita dengan gizi buruk. Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Ketersediaan sumberdaya kesehatan yang belum memadai;
- 2) Pelayanan kesehatan belum optimal;
- 3) Kasus balita gizi buruk masih ada;
- 4) Ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular masih terjadi;
- 5) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang;

- 6) Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai;
- 7) Penduduk miskin belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan.

4.1.6.2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Sleman cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
- 2) Tingkat partisipasi KB pria masih rendah;
- 3) Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang;
- 4) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- 5) Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB cukup tinggi;
- 6) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal;
- 7) Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal.

4.1.7. Pariwisata dan Budaya

4.1.7.1. Kebudayaan

Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sleman bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional,

inovasi dan kreativitas dalam mengelola museum, serta penempatan bahasa dan sastra jawa sebagai asset daerah yang bernilai tinggi.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah;
- 2) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal;
- 3) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- 4) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;
- 5) Kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya masih terbatas;
- 6) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial..

4.1.7.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian dari gaya hidup memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Data statistik angka kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Sleman menunjukkan peningkatan. Dengan segala potensi yang ada, baik potensi alam, budaya, maupun potensi pendidikan tinggi yang menjadi obyek dan daya tarik wisata (ODTW), sehingga berpengaruh pada angka kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang;
- 2) Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang;
- 3) Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal;
- 4) Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal;
- 5) Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.

4.1.8. Pendidikan

4.1.8.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tanggung jawab

penyelenggaraan pendidikan berada pada pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan relevan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan berbagai program yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Warga masyarakat yang buta huruf masih sebanyak 7,01%;
- 2) Anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak sebanyak 33,60%;
- 3) Anak putus sekolah SD/MI sebesar 0,04%, SMP/MTs sebesar 0,12% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,19%;
- 4) Pendidik yang baru memenuhi standar kualifikasi DIV/S1 jenjang TK 14%, SD 20%, SMP 66%, SMA/SMK 88%;
- 5) Sarana prasarana minimal pada jenjang TK dan SD terutama perpustakaan dan laboratorium serta mebelair masih kurang;
- 6) Etika dan penguasaan bahasa Jawa di lingkungan peserta didik masih rendah;
- 7) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang;
- 8) Kompetensi lulusan siswa SMA belum sesuai dengan pasar kerja.

4.1.8.2. Kepemudaan dan Olah Raga

Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai dalam pembangunan sumberdaya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sleman. Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah;
- 2) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV masih cukup tinggi;
- 3) Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga belum mencukupi;
- 4) Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah;
- 5) Pemuda belum sebagai “*agent of change*”;

- 6) Pembinaan olah raga belum optimal;
- 7) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.

4.1.9. Perlindungan Sosial

4.1.9.1. Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sleman lebih dipengaruhi oleh migrasi dari pada kelahiran/kematian. Hal ini mengakibatkan pengelolaan administrasi kependudukan menjadi lebih rumit. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Validitas data penduduk masih rendah;
- 2) Migrasi penduduk antar wilayah cukup tinggi;
- 3) Sistem administrasi kependudukan sering mengalami perubahan;
- 4) Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas;
- 5) Petugas khusus yang menangani administrasi kependudukan di tingkat desa belum tersedia;
- 6) Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang;

4.1.9.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumberdaya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun gap nya tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang;
- 2) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi;
- 3) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah;
- 4) Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada;
- 5) Perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media masih kurang.

4.1.9.3. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Prosentase KK miskin masih cukup tinggi;
- 2) Gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi masih ada;
- 3) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah;
- 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai;
- 5) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 6) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 7) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada 34 urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Isu strategis pada urusan perencanaan pembangunan adalah belum efektifnya perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
2. Isu strategis pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan

- kebutuhan riil dan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan
3. Isu strategis pada urusan statistik adalah belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik.
 4. Isu-isu strategis pada urusan kearsipan adalah belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan. Hal ini ditunjukkan oleh masih sedikitnya SDM pengelola kearsipan dimana pada tahun 2013 hanya berjumlah 28 orang dan masih rendahnya persentase SKPD yang menerapkan arsip secara baik, yang pada tahun 2013 hanya mencapai 60,42%.
 5. Isu Strategis pada urusan perpustakaan adalah belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan.
 6. isu strategis pada urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan perijinan telekomunikasi.
 7. Isu strategis pada urusan penanggulangan bencana adalah perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis. Seperti diketahui bersama bahwa Kabupaten Sleman memiliki indeks kebencanaan yang tinggi, namun prasarana dan sarana penanggulangan bencana belum memadai. Idealnya semua padukuhan di radius km 4-6 dari puncak Gunung Merapi terdapat *Early Warning System (EWS)* awan panas. Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana yang ada, jumlah EWS awan panas yang diperlukan sebanyak 26 buah untuk 26 titik lokasi. Namun yang ada baru sebanyak 8 lokasi dan hanya 4 buah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman atau 30,77%. Selanjutnya untuk EWS banjir lahar diperlukan sebanyak 16 EWS sedangkan yang dimiliki baru 9 buah (56,25%). Untuk EWS tanah longsor diperlukan 9 titik yakni Desa Gayamharjo 2 lokasi, Sambirejo 4 lokasi dan Desa Wukirharjo 3 lokasi. Namun Kabupaten Sleman belum memiliki EWS tanah longsor (0%). Jalur evakuasi yang rusak saat ini masih sekitar 30% dan hal ini sangat berkaitan dengan kebijakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir). Untuk penanggulangan bahaya kebakaran saat ini Pemerintah

- Kabupaten Sleman baru memiliki 3 unit mobil dengan kapasitas 3.000-5.000 liter, idealnya memiliki 6 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk meningkatkan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) perlu dibentuk 2 Wilayah Manajemen Kebakaran yakni Depok untuk wilayah tengah dan timur dan Godean untuk wilayah barat.
8. Isu strategis pada urusan perhubungan adalah perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana lalu lintas, terminal dan angkutan jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kendaraan bermotor berkala. Peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi menyebabkan penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum dari 5.611.705 orang per tahun di tahun 2008 menjadi 4.463.688 orang per tahun di tahun 2012. Penurunan jumlah arus penumpang berdampak pada penurunan ijin trayek dan jumlah uji kendaraan bermotor. Kondisi tersebut akan merugikan dan membahayakan keselamatan penumpang dan lingkungan. Selain itu, peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi yang cukup signifikan menyebabkan lalu lintas menjadi semakin ramai, sehingga resiko kecelakaan lalu lintas semakin besar dan muncul titik – titik kemacetan di beberapa ruas jalan yang tingkatan dan kualitasnya sudah tidak sesuai dengan jumlah pengguna jalan.
 9. Isu strategis pada urusan ketenagakerjaan adalah masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Sleman. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2013 di Kabupaten Sleman masih tinggi yaitu sebesar 6,47%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,25%. Jika melihat rata – rata pertumbuhan lapangan kerja di Sleman per tahun yang mencapai lebih dari 24.000 lapangan kerja, dan rata-rata pertumbuhan angkatan kerja di Sleman per tahun hanya sekitar 8.200 orang, seharusnya tingkat pengangguran bisa ditekan. Masih tingginya tingkat pengangguran ini disebabkan oleh beberapa hal seperti; pertama, adanya ketidaksesuaian antara kualitas yang dimiliki oleh calon tenaga kerja, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan, dengan kebutuhan pasar kerja yang ada. Kedua, rendahnya motivasi calon tenaga kerja, dari hasil observasi yang dilakukan oleh Dewan Riset Daerah Sleman diketahui bahwa calon tenaga kerja di Sleman

- sangat selektif dalam memilih pekerjaan dan kurang memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja. Ketiga, tingginya persaingan dan minat pencari kerja dari Sleman untuk bekerja di Sleman sehingga banyak lapangan kerja yang ada justru diisi oleh tenaga kerja dari luar Sleman.
10. Isu strategis pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah perlunya peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM, perluasan pasar dan penggunaan teknologi dalam pengembangan produk dan layanan dalam mengantisipasi dampak negatif dari pemberlakuan perjanjian pasar bebas. Sejak tahun 2010 banyak industri besar dan UKM yang gulung tikar dikarenakan pemberlakuan “Asean – China Free Trade Area Agreement” (ACFTA) yang menyebabkan banjirnya produk Cina di pasar domestik. Tahun 2015 akan menjadi tahun yang sulit bagi UKM karena selain pemberlakuan ACFTA secara penuh, juga akan diberlakukan Asean Economic Community (AEC) yang memungkinkan produk dan berbagai sumber daya dari negara-negara yang tergabung di dalam Asean bisa secara bebas masuk dan keluar dari dan ke setiap negara anggotanya. Hal ini akan meningkatkan persaingan tidak hanya di skala ekspor tetapi juga di skala pasar domestik. Jumlah UKM produk ekspor di Kabupaten Sleman tahun 2012 turun sebesar 39% jika dibandingkan dengan tahun 2008, penurunan jumlah UKM ini akan menambah jumlah pengangguran di Sleman.
 11. Isu strategis pada urusan penanaman modal adalah belum optimalnya pengelolaan investasi mulai dari perencanaan dan pengembangan investasi yang kurang inklusif sampai dengan birokrasi dan pelayanan perizinan yang belum optimal. Penanaman modal di Kabupaten Sleman belum memberikan multiplier effect yang diharapkan, sehingga belum berkontribusi maksimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi Sleman secara inklusif. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Sleman sebesar 5,45% masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional yaitu sebesar 6,23%. Dari sisi perizinan, rata-rata lama pengurusan perizinan di Kabupaten Sleman untuk tahun 2012 mencapai 11,6 hari, hal ini menjadikan iklim investasi di Sleman kurang kondusif.

12. Isu strategis pada urusan ketahanan pangan adalah belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, masih banyaknya penggunaan bahan aditif yang berpengaruh pada keamanan pangan, dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun. Kabupaten Sleman merupakan lumbung padi di Derah Istimewa Yogyakarta dengan nilai produktivitas sebesar 67,94 kw/ha di tahun 2012. Produktivitas ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata DIY dan Kabupaten lain di DIY (Kulonprogo sebesar 69,57 kw/ha, Bantul sebesar 68,17 kw/ha). Rendahnya produktivitas padi disebabkan antara lain karena sudah berkurangnya daya dukung lahan (kandungan unsur hara tanah di lahan sawah rendah akibat penggunaan pupuk anorganik tidak disertai pupuk organik yang seimbang) dan gangguan OPT terutama di daerah Sleman barat sebagai penyangga utama produksi padi.
13. Isu strategis pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintah desa dan optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan masyarakat desa seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi secara swadaya. Total dana dari swadaya masyarakat yang dialokasikan untuk menunjang program pembangunan daerah di tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 19.947.195.695,- atau naik sebesar 177,8% dari tahun 2008 yang jumlahnya baru mencapai Rp. 7.180.110.000,-.
14. Isu strategis pada urusan pertanian adalah perlunya penegakkan aturan mengenai alih fungsi lahan, fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian bagi petani, fasilitasi akses permodalan dan optimalisasi manajemen agribisnis. Sleman memiliki kawasan peruntukkan pertanian yang terdiri dari kawasan peruntukkan pertanian lahan basah seluas 21.113 hektar dan lahan kering seluas 9.117 hektar yang tersebar di 17 kecamatan. Konversi penggunaan lahan sawah di Sleman mencapai 0,11% per tahun, penurunan lahan ini akan berdampak pada penurunan produksi hasil pertanian. Sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB, dari 15,95% di tahun 2010 menjadi 12,96% di tahun 2012.

15. Isu strategis pada urusan kehutanan adalah semakin berkurangnya luas hutan rakyat dan masih cukup luasnya lahan kritis. Sleman memiliki hutan seluas 5.934,54 hektar atau 10,32% dari luas Kabupaten Sleman, erupsi merapi dan kegiatan penambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian hutan di Sleman. Selain itu kontribusi sub sektor kehutanan baru sebesar 0,06% di tahun 2012, perlu dikaji potensi pemanfaatan hutan disamping untuk tujuan konservasi, agar bisa dikelola dan diperoleh manfaat lebih berupa hasil hutan tanpa mengurangi tujuan konservasi.
16. Isu strategis pada urusan perikanan adalah terjadinya peningkatan aktivitas dan produksi komoditas perikanan budidaya oleh masyarakat Sleman, untuk itu diperlukan optimalisasi tataguna dan tata kelola air agar permasalahan kelangkaan air di musim kemarau tidak menjadi kendala baik bagi aktivitas produksi perikanan budidaya maupun aktivitas pertanian. Selain itu diperlukan upaya untuk memperkuat fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan agar bisa meningkatkan produksi dan menjaga kelestarian ekosistem perairan. Produksi perikanan untuk konsumsi di tahun 2012 mencapai 18.980,40 ton, meningkat rata-rata sebesar 21,08% per tahun dari tahun 2008 yang jumlahnya baru mencapai 10.297,78 ton. Sedangkan produksi perikanan untuk benih di tahun 2012 mencapai 906.701.500 ekor, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,17% per tahun dari tahun 2008 yang jumlahnya baru mencapai 704.545.500 ekor.
17. Isu strategis pada urusan perdagangan adalah perlunya perluasan jaringan pemasaran dan peningkatan daya saing produk di pasar domestik dan internasional, peningkatan pengawasan bagi kelancaran distribusi bahan pokok / barang strategis, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. Perluasan jaringan pemasaran dan peningkatan daya saing produk sangat diperlukan, khususnya untuk pasar internasional. Realisasi ekspor tahun 2012 di Kabupaten Sleman menurun sebanyak 17,34% dibandingkan dengan tahun 2008, dengan penurunan jumlah komoditi sebesar 40,48%. Untuk pasar tradisional, di Kabupaten Sleman terdapat 41 unit pasar

- tradisional, dari total jumlah tersebut hanya 12 unit pasar atau 29,27% pasar yang kondisinya baik, selebihnya, 70,73% atau sebanyak 29 unit pasar masih perlu perbaikan / rehabilitasi.
18. Isu strategis pada urusan industri adalah perlunya bimbingan teknis bagi manajemen IKM dan tenaga teknis industri, perlunya fasilitasi adopsi dan transfer teknologi bagi IKM agar IKM bisa melakukan inovasi dan diversifikasi produk serta meningkatkan kapasitas usaha dan eksistensi industrinya secara berkelanjutan. Sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 14,32% per tahun, pertumbuhan jumlah industri rata-rata mencapai 1,42% per tahun dengan jumlah industri kecil dan rumah tangga di tahun 2012 mencapai 15.707 unit. Berbeda dengan industri besar yang bisa mengakses teknologi dengan mudah, industri kecil dan rumah tangga memerlukan pembinaan dan fasilitasi agar bisa dan terbiasa menggunakan teknologi sebagai prasarana untuk melakukan inovasi dan diversifikasi produk
19. Isu strategis pada urusan energi dan sumberdaya mineral adalah perlunya peningkatan cakupan layanan listrik terutama di wilayah terpencil yang masih terdapat rumah tanpa listrik, perlunya eksplorasi potensi energi terbarukan yang ramah lingkungan serta maraknya aktivitas penambangan yang tidak berizin dan tidak ramah lingkungan. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sleman mencapai 290.505 pelanggan, sebagian rumah di daerah terpencil memperoleh listrik dari 161 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dimana sebagian PLTS tersebut rusak terkena erupsi merapi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga mengembangkan 163 unit instalasi untuk pemanfaatan biogas sebagai energi alternatif bagi masyarakat. Untuk aktivitas penambangan, bahan galian utama di Kabupaten Sleman adalah pasir, yang berasal dari Gunung Merapi dengan jumlah produksi mencapai lebih dari 1,8 juta meter kubik per tahun. Besarnya permintaan untuk pasir dari Merapi menyebabkan banyak penambang yang berasal dari masyarakat sekitar maupun dari luar yang melakukan aktivitas penambangan di lereng Merapi baik secara legal maupun ilegal. Proses penambangan di Merapi sudah beralih dari cara penambangan

- tradisional ke modern dengan menggunakan alat – alat berat. Banyak dan padatnya lalu lintas truk dan bego menyebabkan kerusakan lingkungan, jalan dan jalur evakuasi, penggunaan back hoe untuk mengeruk pasir bisa mengubah bentang alam di lereng Merapi dengan cepat dan bisa membahayakan keselamatan penduduk.
20. Isu strategis pada urusan transmigrasi adalah perlunya peningkatan kesiapan sistem dan perangkat daerah dalam mengawal keberhasilan program transmigrasi, baik transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa. Animo masyarakat untuk bertransmigrasi relatif tinggi, sementara itu kuota transmigrasi dari pemerintah pusat selaku fasilitator terbatas dan lokasi untuk transmigrasi seringkali tidak siap. Penempatan transmigrasi dibedakan menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Barat yang meliputi provinsi DI. Aceh, Riau, Sumut, Jambi, Bengkulu dan Sumsel. Kawasan Timur meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Dari tahun 2008 sampai 2012 kuota yang ditetapkan untuk Sleman kurang lebih mencapai 260 jiwa untuk transmigran umum. Kuota tersebut belum sebanding dengan besarnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi, oleh karena itu sebagian masyarakat berpartisipasi dalam program transmigrasi melalui transmigrasi swakarsa. Di tahun 2012, 33,3% dari jumlah transmigran yang dikirim dari Kabupaten Sleman adalah transmigran swakarsa.
 21. Isu strategis pada urusan penataan ruang adalah pesatnya permohonan alih fungsi lahan oleh masyarakat. Menjadi hal yang tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk mengizinkan setiap permohonan alih fungsi lahan karena perlu mempertimbangkan kebijakan tata ruang Kabupaten Sleman karena diamanatkan bahwa Sleman merupakan kawasan resapan air untuk wilayah Kota Yogyakarta dan Bantul, pun pula penataan ruang Kabupaten Sleman mempunyai kebijakan untuk tetap memelihara kelestarian lingkungan dan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan.
 22. Isu strategis pada urusan lingkungan hidup adalah terjadinya degradasi lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam

- pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak pemanasan global. Selain itu masalah penanganan persampahan juga perlu dioptimalkan. Timbunan sampah di Kabupaten Sleman ± 1.119.014 m³ per tahun. Dari total jumlah tersebut, sampah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebanyak 139.047 m³ per tahun atau 12,42%, sampah yang dikelola secara mandiri sejumlah ± 238.072 m³ per tahun atau 21,27%, sedangkan sisa sampah yang masih belum tertangani ± 741.895 m³ per tahun atau 66,30%.
23. Isu Strategis pada urusan pertanahan adalah belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah. Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Sleman berubah tiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan adalah 428.572, pada tahun 2011 sejumlah 444.108, dan tahun 2012 sejumlah 455.193 bidang. Untuk penyelesaian ijin lokasi di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, pada tahun 2010 sejumlah 10 buah, tahun 2011 sejumlah 11 buah, dan tahun 2012 sejumlah 19 buah.
24. Isu strategis pada urusan pekerjaan umum adalah tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik hanya sebesar 54,06% dari panjang jalan kabupaten yang mencapai 699,5 km.
25. Isu Strategis pada urusan perumahan adalah belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. Persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2010 baru mencapai 67,20%, pada tahun 2011 sebesar 65,12%, serta pada tahun 2012 tercatat sebesar 74,28%. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 masih sebanyak 22.839 rumah atau 8,76% dari keseluruhan jumlah rumah yang ada di Kabupaten Sleman.

26. Isu Strategis pada urusan kesehatan adalah terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, dan masih banyaknya penduduk yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan. Selain itu Prosentase cakupan jaminan kesehatan masih sebesar 61.66%, yaitu sebanyak 653.228 jiwa (melalui Askes PNS, TNI, POLRI, Jamkesmas, Jamsostek dan Jamkesda) dari total jumlah penduduk 1.059.383 jiwa. Khusus kepesertaan Jamkesda penduduk miskin sebanyak 168.872 jiwa. Diperlukan upaya perluasan *coverage* untuk menjamin seluruh penduduk Sleman telah masuk dalam jaminan kesehatan masyarakat.
27. Isu Strategis pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB. Kondisi tersebut tergambar dalam data kepesertaan KB oleh PUS. Jumlah PUS pada tahun 2010, 2011 dan 2012 berturut-turut adalah 151.572, 150.009 dan 152.392. Sedangkan proporsi peserta KB aktif dari PUS adalah 79,99% pada tahun 2010, 78,95% pada tahun 2011 dan 79,11% pada tahun 2012.
28. Isu strategis pada urusan kebudayaan adalah masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya.
29. Isu strategis pada urusan pariwisata adalah belum optimalnya sinergi dan keterlibatan antara masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata sebagai unsur pelaku dan pendukung pengembangan pariwisata, minimnya kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan kompetensi dan daya saing ODTW serta perlunya peningkatan kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata agar bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada wisatawan, dengan demikian diharapkan aktivitas pariwisata yang ada bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

30. Isu Strategis pada urusan pendidikan adalah belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut didukung oleh data tahun 2012 yang menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs cukup bagus ialah sebesar 112,88 dan 110,81 sedangkan APS untuk jenjang SMA/MA/SMK masih rendah yakni sebesar 58,96%. Rendahnya APS jenjang SMA/MA/SMK dimungkinkan karena (1) tidak semua penduduk usia SMA bersekolah, (2) penduduk usia SMA yang bersekolah tidak semuanya bersekolah di wilayah Kabupaten Sleman.
31. Isu Strategis pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah banyaknya masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olah raga.
32. Isu Strategis pada urusan kependudukan dan catatan sipil banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah Kabupaten Sleman yang tidak tercatat di register kependudukan. Sebagai kota tujuan pendidikan dan pariwisata, Sleman mempunyai daya tarik yang kuat untuk penduduk luar Sleman menetap di Sleman dalam rangka belajar maupun bekerja. Namun status kependudukan para pendatang itu tidak tercatat sebagai penduduk Sleman.
33. Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. Data tahun 2012 menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan baru mencapai 55,70%, partisipasi perempuan di lembaga swasta 38,37%. Tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman mempunyai kecenderungan yang meningkat di mana rasio KDRT pada tahun 2011 adalah 0,012 bertambah menjadi 0,0312 pada tahun 2012.
34. Isu Strategis pada urusan sosial adalah masih cukup tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Persentase penduduk miskin tahun 2013 sebesar 13,89%.

Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 15,85 %. Oleh karena masih diperlukan upaya-upaya yang serius untuk menurunkan angka tersebut Selain itu jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sleman masih tinggi. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tahun 2013 menyebutkan masih ada 32.336 orang di Sleman sebagai PMKS yang terbagi dalam 12 jenis, mulai dari balita terlantar sampai dengan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. Diperlukan penanganan yang lebih optimal dengan pelibatan berbagai pihak termasuk pemerintah DIY untuk menyelesaikan masalah PMKS ini.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. DASAR FILOSOFIS

Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah memerlukan satu filosofi pembangunan yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan.

Filosofi pembangunan daerah Sleman digali dari filosofi luhur nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu *"Gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem karta raharja"* dengan pengertian sebagai berikut:

- Gemah ripah : perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin;
- Loh jinawi : perwujudan keadaan lahan (tanah) beserta tanam-tanaman yang ada di atasnya sangat subur;
- Tata tentrem : suatu kondisi masyarakat yang taat pada aturan, disiplin, demokratis, bijak dalam bertindak, aman, tentram, dan damai;
- Karta raharja : tercapainya tingkat kemakmuran/kesejahteraan di masyarakat yang berpedoman pada keselamatan lahir dan batin;

Filosofi pembangunan Kabupaten Sleman ini selaras dengan filosofi pembangunan daerah DIY yaitu *"Hamemayu Hayuning Bawana"*, bahwa ada kewajiban untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang memiliki kemakmuran, kesejahteraan dengan penuh rasa kedamaian, keamanan, dan keteraturan.

Implementasi filosofis juga diwujudkan dalam slogan pembangunan desa terpadu di Kabupaten Sleman, yakni "SLEMAN SEMBADA". Secara harfiah SEMBADA dapat dipahami sebagai suatu sikap dan perilaku yang berwatak kesatria, bertanggungjawab, taat azas, setia menepati janji, pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, bulat tekad, kukuh mempertahankan kebenaran menghindari dari perbuatan tercela, mampu menangkal dan mengatasi segala masalah, tantangan dan ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, rela berkorban, dan mengabdikan bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Sebagai slogan untuk upaya pembangunan, **SEMBADA** merupakan singkatan yang dapat diuraikan atas arti masing-masing hurufnya sebagai berikut:

S : Sehat

Yaitu kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial, dan lingkungan.

E : Elok dan Edi

Elok adalah aspek keindahan yang alami yang hanya diciptakan oleh Pencipta Alam, misalnya pemandangan alam; sedang Edi adalah aspek keindahan sebagai hasil rekayasa manusia, misalnya pertamanan.

M: Makmur dan Merata

Yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat.

B: Bersih dan Berbudaya

Yaitu kondisi lingkungan yang terbebas dari segala bentuk pencemaran, kondisi masyarakat yang bersih lahir batin, bebas dari cerca cela, tak berprasangka buruk, menjauhi berbagai bentuk kecemburuan. Di samping itu juga berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

A: Aman dan Adil

Yaitu kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin karena terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan.

D: Damai dan Dinamis

Yaitu kondisi masyarakat yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, mantap dalam menciptakan berbagai bentuk kerukunan, semua permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, namun tetap menggalakkan dinamika masyarakat secara individu maupun kelompok merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan.

A: Agamis

Yaitu kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak demi terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, makmur yang merata, berbudaya, aman dan adil, damai dan dinamis, serta kondisi alam yang bersih, elok dan edi.

SEMBADA, berfungsi sebagai wahana untuk mencapai kondisi SLeMan yang Sejahtera, Lestari, dan Mandiri.

Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat.

Lestari dimaksudkan tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai dengan perkembangan.

Mandiri dimaksudkan berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan.

Dengan demikian, secara keseluruhan SEMBADA berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat, tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai dengan perkembangan, berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan.

Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Sleman tersebut dapat diambil kesepakatan bersama selama 5 tahun berupa visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sleman.

5.2. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2011-2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”.

Penjelasan Visi:

Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang lebih sehat, cerdas dan berkemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan

spiritualnya dengan baik. Secara kuantitatif keadaan 'lebih' ini terwujud dalam angka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun sebelumnya adalah 78 diharapkan menjadi 80 pada akhir tahun 2015.

Masyarakat Sleman yang lebih berdaya saing adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional. Secara kuantitatif pencapaian dari daya saing ini terwujud dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,98%.

Masyarakat yang lebih berkeadilan gender adalah masyarakat yang mampu menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

5.3. MISI

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

Penjelasan masing-masing misi:

1. Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Dengan tekad untuk menjaga tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Langkah utama yang diambil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah membangun birokrasi yang kokoh, birokrasi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi. Birokrasi sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima.

Tiga pilar pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta memiliki peran yang sama pentingnya dalam aktivitas pembangunan. Misi ini menjiwai dan menjadi dasar implementasi misi-misi yang lain.

2. Misi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif,

dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.

3. Misi meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Fokus utama pada peningkatan ekonomi rakyat yang dicapai melalui pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

4. Misi memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.

5. Misi meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

Misi ini merupakan peningkatan intensitas perhatian terhadap permasalahan kesenjangan peran perempuan dalam pembangunan. Langkah untuk memberdayakan dan meningkatkan perlindungan serta meningkatkan peran perempuan dilakukan melalui peningkatan akses di segala bidang : ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga diharapkan perempuan dapat berkiprah di sektor domestik dan di sektor publik.

5.4. PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI (CORE VALUES)

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi dan misi daerah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

5.4.1. Prinsip-prinsip

- Demokrasi : Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat.
- Partisipasi : Setiap warga memiliki hak yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- Transparansi : Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- Akuntabilitas : Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya.
- Inovasi : proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah.

5.4.2. Nilai-nilai

- Keadilan : Sikap dan tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.
- Profesional : Terampil, handal, dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.
- Integritas : Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.
- Tanggung jawab : Kesiediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.

- Kemandirian : Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain.
- Disiplin : Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu.
- Kerjasama : Komitmen di antara anggota masyarakat/ organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri.
- Kesetaraan : Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.
- Kebersamaan : Sikap dan perilaku yang secara bersama-sama dalam pada suatu ruang atau waktu yang sama keragaman menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan bersama.

5.5. ANALISA LINGKUNGAN

Untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu dilakukan analisa lingkungan yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisa ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

5.5.1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan

agar Pemerintah Kabupaten dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan daerah. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Kekuatan

Kekuatan yang teridentifikasi sebagai berikut :

- 1) Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat;
- 2) Posisi strategis sebagai jalur transportasi yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur;
- 3) Potensi wisata cukup beragam yang didukung sarana dan prasarana yang memadai;
- 4) Luas lahan pertanian yang subur didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
- 5) Penduduk usia produktif cukup tinggi;
- 6) Derajat kesehatan masyarakat cukup tinggi;
- 7) Budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat cukup tinggi;
- 8) Akses media komunikasi dan informasi cukup mudah dan merata;
- 9) Usaha mikro, kecil dan menengah cukup banyak dan beragam;
- 10) Kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman.

b. Kelemahan

Kelemahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

- 1) Prosentase KK miskin yang cukup tinggi;
- 2) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang;
- 3) Angka pengangguran yang cukup banyak;
- 4) Kualitas sumberdaya manusia masih kurang;
- 5) Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal;
- 6) Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang;
- 7) Manajemen UMKM masih rendah;
- 8) Sarana dan prasarana publik belum memadai;
- 9) Kualitas dan akurasi data masih kurang.

5.5.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis terhadap lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang ada diluar organisasi yang dapat berpotensi mengganggu atau sebaliknya mempercepat upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Identifikasi tersebut terdiri dari identifikasi atas unsur peluang dan ancaman yang sedang atau kemungkinan dihadapi. Hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peluang

Peluang yang teridentifikasi sebagai berikut :

- 1) Pengembangan kerjasama antar daerah dan swasta;
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah;
- 3) Minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi;
- 4) Program-program pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup banyak;
- 5) Kesempatan kerja di luar daerah yang cukup tinggi;
- 6) Penerapan prinsip-prinsip good governance;
- 7) Lembaga pendidikan dan penelitian cukup banyak.

b. Ancaman

Ancaman yang teridentifikasi sebagai berikut :

- 1) Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung meningkat;
- 2) Kemungkinan terjadinya bencana alam;
- 3) Dampak Kebijakan *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA);
- 4) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat;
- 5) Beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah pusat yang tidak harmonis antara satu dengan yang lain;
- 6) Alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk sektor publik cenderung menurun;
- 7) Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang.

- 8) Persaingan antar daerah cukup tinggi.

5.6. ANALISIS STRATEGI PILIHAN

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (*strength*, S) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (*weakness*, W) dengan peluang (*opportunity*, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (*strength*, S) dengan ancaman (*threath*, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O)

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat; 2. Posisi strategis sebagai jalur transportasi yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur; 3. Potensi wisata cukup beragam yang didukung sarana dan prasarana yang memadai; 4. Luas lahan pertanian yang subur didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; 5. Penduduk usia produktif cukup tinggi; 6. Derajat kesehatan masyarakat cukup tinggi; 7. Budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat cukup tinggi; 8. Akses media komunikasi dan informasi cukup mudah dan merata; 9. Usaha mikro, kecil dan menengah cukup banyak dan beragam; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kerjasama antar daerah dan swasta; 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah; 3. Minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi; 4. Program-program pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup banyak; 5. Kesempatan kerja di luar daerah yang masih cukup tinggi. 6. Penerapan prinsip-prinsip good governance 7. Lembaga pendidikan dan penelitian cukup banyak; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi OPD untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah, lembaga pendidikan dan swasta dan pemanfaatan iptek berlandaskan prinsip-prinsip good governance 2. Memanfaatkan posisi strategis, dan potensi sumberdaya wilayah yang tersedia untuk menarik investasi 3. Mengefektifkan potensi sumberdaya manusia untuk memperoleh kesempatan kerja 4. Memanfaatkan modal sosial masyarakat untuk menarik investasi dan mendukung program-program pembangunan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance 5. Memanfaatkan media komunikasi dan informasi untuk menarik investasi dalam mendukung

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
10. Kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman.		program-program pembangunan 6. Meningkatkan pemberdayaan UKM untuk penyediaan lapangan kerja melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama

2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O)

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase KK miskin masih cukup tinggi; 2. Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang; 3. Angka pengangguran masih cukup banyak; 4. Kualitas sumberdaya manusia masih kurang; 5. Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal; 6. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang; 7. Manajemen UMKM masih rendah; 8. Sarana dan prasarana publik belum memadai; 9. Kualitas dan akurasi data masih kurang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kerjasama antar daerah dan swasta; 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah; 3. Minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi; 4. Program-program pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup banyak; 5. Kesempatan kerja di luar daerah yang masih cukup tinggi; 6. Penerapan prinsip-prinsip good governance; 7. Lembaga pendidikan dan penelitian cukup banyak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat 2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui keterpaduan program dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan 4. Memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan kerjasama antar daerah 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas dan penerapan good governance 6. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi 7. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
		teknologi 8. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama daerah dan swasta

3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi S-T
1. Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat; 2. Posisi strategis sebagai jalur transportasi yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur; 3. Potensi wisata cukup beragam yang didukung sarana dan prasarana yang memadai; 4. Luas lahan pertanian yang subur didukung oleh prasarana dan	1. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung meningkat; 2. Kemungkinan terjadinya bencana alam yang masih cukup tinggi; 3. Dampak Kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA); 4. Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat; 5. Peraturan perundang-undangan dari Pemerintah pusat seringkali tidak sinkron; 6. Alokasi dana perimbangan dari	1. Mengoptimalkan peran dan fungsi OPD untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, bencana, dampak kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), dan masuknya nilai-nilai dan budaya asing serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan 2. Memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, sumberdaya manusia dan modal sosial yang tersedia untuk meningkatkan daya saing serta mengantisipasi gangguan

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi S-T
<p>sarana yang memadai;</p> <p>5. Penduduk usia produktif cukup tinggi;</p> <p>6. Derajat kesehatan masyarakat cukup tinggi;</p> <p>7. Budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat cukup tinggi;</p> <p>8. Akses media komunikasi dan informasi cukup mudah dan merata;</p> <p>9. Usaha mikro, kecil dan menengah cukup banyak dan beragam;</p> <p>10. Kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman.</p>	<p>pemerintah pusat untuk sektor publik cenderung menurun;</p> <p>7. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang;</p> <p>8. Persaingan antar daerah cukup tinggi.</p>	<p>kamtibmas, bencana, dampak kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), dan masuknya nilai-nilai dan budaya asing</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas UMKM dengan pemanfaatan media komunikasi dan informasi untuk meningkatkan daya saing danantisipasi dampak ACFTA</p> <p>4. Mengoptimalkan potensi sumberdaya dan OPD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam rangkaantisipasi menurunnya dana perimbangan Pemerintah</p>

4. Strategi Antara Kelemahan dan Ancaman (W-T)

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi W-T
<p>1. Prosentase KK miskin masih cukup tinggi;</p> <p>2. Angka pengangguran masih cukup banyak;</p>	<p>1. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung meningkat;</p> <p>2. Kemungkinan terjadinya bencana</p>	<p>1. Memberdayakan keluarga miskin dan menciptakan kesempatan kerja untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban</p>

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi W-T
<p>3. Kualitas sumberdaya manusia masih kurang;</p> <p>4. Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal;</p> <p>5. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang;</p> <p>6. Manajemen UMKM masih rendah;</p> <p>7. Sarana dan prasarana publik belum memadai;</p> <p>8. Kualitas dan akurasi data masih kurang.</p>	<p>alam yang masih cukup tinggi;</p> <p>3. Dampak Kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA);</p> <p>4. Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat;</p> <p>5. Beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah pusat yang tidak harmionis antara satu dengan yang lain;</p> <p>6. Alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk sektor publik cenderung menurun;</p> <p>7. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang;</p> <p>8. Persaingan antar daerah cukup tinggi.</p>	<p>2. Mengoptimalkan sumberdaya manusia untuk mengantisipasi bencana, dampak kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat, dan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Mengoptimalkan pelayanan, sarana dan prasarana publik untuk mengantisipasi bencana, dampak kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), dan daya saing daerah</p> <p>4. Memberdayakan masyarakat dalam lingkungan hidup untuk mengantisipasi bencana</p> <p>5. Mengoptimalkan manajemen UMKM untuk mendorong kemandirian dan daya saing</p>

5.7. FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi pemerintah Kabupaten Sleman. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi pemerintah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil pilihan strategi yang diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi organisasi pemerintah Kabupaten Sleman, maka prioritas urutan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui keterpaduan program dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian
5. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing.
6. Memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, sumberdaya manusia dan modal sosial yang tersedia untuk meningkatkan daya saing serta mengantisipasi gangguan kamtibmas, bencana, dampak kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), dan masuknya nilai-nilai dan budaya asing
7. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5.8. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi.

5.8.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Misi Satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Tujuan:

- a) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah
- b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah
- c) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
- d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis

Misi Dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Tujuan:

- a) Meningkatkan kualitas hidup penduduk
- b) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial
- c) Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga
- d) Meningkatkan pelestarian budaya

Misi Tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan:

- a) Meningkatkan perekonomian daerah.
- b) Meningkatkan daya beli masyarakat.

Misi Empat : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tujuan:

- a) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik.
- b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari.

Misi Lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

Tujuan

- a) Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dan anak.

5.8.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Misi satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Tujuan:

- a) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas SDM aparat
- 2) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
- 3) Meningkatnya transparansi
- 4) Meningkatnya pelayanan masyarakat
- 5) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- 6) Meningkatnya kerjasama daerah
- 7) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

Tujuan:

- b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah

Sasaran:

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah

Tujuan:

- c) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat

Sasaran:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

- 2) Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
- 3) Meningkatnya kerukunan masyarakat
- 4) Meningkatnya penanggulangan bencana

Tujuan:

- d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis

Sasaran:

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
- 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM

Misi dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Tujuan:

- a) Meningkatkan kualitas hidup penduduk

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan
- 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Tujuan:

- b) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS

Tujuan:

- c) Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga

Sasaran:

- 1) Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga

Tujuan:

- d) Meningkatkan pelestarian budaya

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya

Misi tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan:

- a) Meningkatkan perekonomian daerah.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- 2) Meningkatnya penanaman modal

Tujuan:

- b) Meningkatkan daya beli masyarakat.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
- c) Meningkatkan Ketahanan Pangan
 - 1) Meningkatnya ketersediaan pangan

Misi empat : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tujuan:

- a) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan
- 2) Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi
- 3) Meningkatnya kualitas transportasi, komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi
- 4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
- 5) Meningkatnya prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana
- 6) Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
- 7) Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga
- 8) Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan
- 9) Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan

Tujuan:

- b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari

Sasaran:

- 1) Menjaga kualitas sumberdaya alam
- 2) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 3) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi

Misi lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

Tujuan:

- a) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
-

Sasaran:

- 1) Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
- 2) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Tabel 5.1
HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN SLEMAN

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Masy. Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015	Misi satu : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat	a) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah	1) Meningkatnya kualitas SDM aparat	1. Persentase peningkatan jumlah pegawai Berpendidikan S2 2. Kasus pelanggaran disiplin PNS 3. Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
			2) Meningkatnya efektifitas dan Efisiensi birokrasi	1. Tingkat capaian Indikator kinerja daerah 2. Persentase OPD yang memiliki SOP 3. SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik
			3) Meningkatnya transparansi	1. Penyediaan prasarana dan sarana informasi publik 2. Jenis informasi yang disajikan 3. Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
			4) Meningkatnya pelayanan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
			5) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Opini BPK 2. Persentase kontribusi PAD terhadap APBD
			6) Meningkatnya kerjasama daerah	1. Banyaknya kerjasama aktif
			7) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1. Cakupan penerbitan KTP
		b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan	1. Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan 2. Keterwakilan komponen masyarakat dalam

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		c) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	<p>pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 2) Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 3) Meningkatnya kerukunan masyarakat 4) Meningkatnya penanggulangan bencana 	<p>forum Musrenbang</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rasio swadaya masyarakat 4. Kasus tertangani <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) 2. Penyelesaian kasus permasalahan hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase menurunnya jumlah konflik di masyarakat <p>Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana 2. Regulasi penanggulangan bencana 3. Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana 4. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
		d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik. 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilkada, Pilkades, Pilduk 2. Persentase Ormas aktif <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kejadian pelanggaran HAM 2. Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD
	Misi dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat	a) Meningkatkan kualitas hidup penduduk	1) Meningkatnya kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Melek Huruf 2. Rata-rata lama sekolah 3. Rata-rata APK SD, SMP, SMA/K 4. Rata-rata APM SD, SMP, SMA/K 5. Kelayakan guru mengajar SD, SMP, SMA/K

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			<p>2) Meningkatnya derajat kesehatan</p> <p>3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk</p>	<p>6. Meningkatnya minat baca masyarakat</p> <p>7. Prestasi Siswa (Akademik/non akademik)</p> <p>1. Angka Harapan Hidup</p> <p>2. Angka kematian bayi</p> <p>3. Angka kematian Balita</p> <p>4. Angka kematian ibu</p> <p>1. Laju pertumbuhan penduduk</p> <p>2. Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif</p> <p>3. Pasangan Usia Subur sasaran KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)</p> <p>4. KB Pria</p> <p>5. KB Mandiri</p>
		b) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS	<p>1. Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS</p> <p>2. Sumber potensi kesejahteraan sosial (Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat)</p> <p>3. Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>4. Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial</p>
		c) Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga	<p>1. Persentase Ormas kepemudaan yang aktif</p> <p>2. Prestasi olah raga tingkat provinsi</p>
		d) Meningkatkan pelestarian budaya	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya	<p>1. Prestasi olah raga tingkat provinsi</p> <p>2. Pelestarian nilai-nilai tradisi</p> <p>3. Pelestarian warisan dan cagar budaya</p> <p>4. Kelompok kesenian perempuan</p>
	Misi tiga : Meningkatkan	a) Meningkatkan perekonomian	1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi sektor :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	kemandirian ekonomi pemberdayaan ekonomi rakyat dan Penanggulangan kemiskinan	daerah b) Meningkatkan daya beli masyarakat c) Meningkatkan ketahanan pangan	2) Meningkatnya penanaman modal 3) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan 4) Meningkatnya ketersediaan pangan	a. Primer b. Sekunder c. Tersier 1. Pertumbuhan nilai penanaman modal 1. Penduduk bekerja dari angkatan kerja 2. Tingkat pengangguran terbuka 3. Persentase KK miskin 4. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan 5. PDRB perkapita (ADHB, ribu rupiah) 6. Angka Gini Ratio 1. Ketersediaan energi perkapita 2. Ketersediaan protein perkapita
	Misi empat : Pengelolaan prasarana dan sarana sumberdaya alam dan lingkungan hidup	a) Mewujudkan ketersediaan	1) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan 2) Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi 3) Meningkatnya kualitas transportasi Komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi 4) Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman 5) Meningkatnya prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana	1. Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik 1. Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis 1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten 2. SKPD melaksanakan E-Gov 1. Persentase kondisi prasarana dan sarana Dasar pemukiman baik 2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 1. Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			6) Meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian	1. Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik
			7) Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga	1. Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah 2. Kelayakan prasarana dan sarana sekolah 3. Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik
			8) Meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan	1. Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik
			9) Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan	1. Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik
		b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari	1) Menjaga kualitas sumberdaya alam	1. Luas lahan kritis 2. Luas lahan rusak akibat penambangan 3. Luas hutan 4. Alih fungsi lahan pertanian 5. Tertib pemanfaatan tanah 6. Tertib administrasi pertanahan 7. RTH perkotaan 8. Tersedianya Informasi RTRW serta rencana rincinya melalui peta analog
			2) Menjaga kelestarian fungsi Lingkungan hidup	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air 2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara 3. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 4. Usaha yang memiliki IPAL 5. Usaha yang memiliki dokumen lingkungan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Misi lima : meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang	Meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan anak	3) Meningkatnya pemanfaatan Sumberdaya energi 1) Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak 2) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Rasio Elektrifikasi 2. Energi terbarukan 1. dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (100%) 2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50%) 3. Lembaga PUG yang aktif 4. Pemenuhan hak-hak Anak 1. dasar, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki 2. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf

Tabel 5.2
HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DIY DAN KABUPATEN SLEMAN

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN	
DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN
“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”	Terwujudnya Masy. Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015	Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya	Misi satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.	Terselenggaranya pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dengan: a) Menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. b) Meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel. c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	a) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah c) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	1) Meningkatnya tertib administrasi pertanahan 2) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan 3) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kondisi sosial 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik 5) Meningkatnya kualitas produk hukum daerah 6) Meningkatnya kecepatan dan ketepatan penanganan bencana 7) Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 8) Meningkatnya kualitas perangkat daerah 9) Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah 10) Meningkatnya kualitas pengelolaan persandian 11) Meningkatnya pengelolaan kearsipan secara optimal	1) Meningkatnya kualitas SDM aparat 2) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi 3) Meningkatnya transparansi 4) Meningkatnya pelayanan masyarakat 5) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 6) Meningkatnya kerjasama daerah 7) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah 1) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 2) Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 3) Meningkatnya kerukunan masyarakat

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN	
DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN
					d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis	12) Meningkatnya konsistensi antara program/kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	4) Meningkatnya penanggulangan bencana 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik. 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM
			Misi dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan: a) Menjadikan pendidikan sebagai proses tranformasi budaya yang merupakan bagian dari character building. b) Meningkatkan kemudahan dan kemampuan mengakses kesehatan yang bermutu secara adil dan merata bagi masyarakat agar hidup dalam lingkungan sehat serta berperilaku hidup bersih dan sehat.	a) Meningkatkan kualitas hidup penduduk b) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial c) Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga d) Meningkatkan pelestarian budaya	1) Kualitas sumberdaya manusia meningkat. 2) Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian 3) Kesejahteraan masyarakat meningkat.	1) Meningkatnya kualitas pendidikan 2) Meningkatnya derajat kesehatan 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya
				c) Menciptakan iklim yang memungkinkan perlindungan, rehabilitasi, jaminan sosial dan pemberdayaan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal sesuai dengan karakter lokal.			

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN	
DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN
			<p>Misi tiga :</p> <p>Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan</p> <p>Misi empat :</p> <p>pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>d) Menjadikan Yogyakarta sebagai laboratorium pengembangan budaya etnik nusantara.</p> <p>Meningkatnya produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih secara konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan dan mampu:</p> <p>a) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.</p> <p>b) Membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.</p> <p>Ketersediaan layanan publik yang tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p>	<p>a) Meningkatkan perekonomian daerah.</p> <p>b) Meningkatkan daya beli masyarakat</p> <p>c) Meningkatkan ketahanan pangan</p> <p>a) Mewujudkan ketersediaan</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas</p> <p>1) Terwujudnya ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas yang mengacu kesesuaian tata ruang.</p> <p>2) Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana publik.</p> <p>3) Terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.</p>	<p>1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</p> <p>2) Meningkatnya penanaman modal</p> <p>3) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunkan disparitas pendapatan</p> <p>4) Meningkatnya ketersediaan pangan</p> <p>1) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan</p> <p>2) Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi</p> <p>3) Meningkatnya kualitas transportasi komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman</p> <p>5) Meningkatnya prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana</p> <p>6) Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian</p> <p>7) Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga</p> <p>8) Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan</p>

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN	
DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN	DIY	SLEMAN
			Misi lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang		b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak		9) Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan 1) Menjaga kualitas sumberdaya alam 2) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 3) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi 1) Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak 2) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu perubahan secara mendasar, terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 mengacu pada tiga arus utama perubahan (*3R-Change*), yaitu dengan mengubah haluan (reorientasi), penempatan diri yang proporsional (reposisi), dan bersandar pada kekuatan rencana yang baik (revitalisasi).

6.1. REORIENTASI, REPOSISI DAN REVITALISASI

6.1.1. Reorientasi

Reorientasi dimaksudkan untuk mengubah haluan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi lebih cepat, mudah, bermutu dan adil. Reorientasi juga menyangkut perubahan cara pandang, cara mengelola sumberdaya dan cara bertindak aparat Pemerintah Kabupaten Sleman yang lebih efisien dan efektif dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Reorientasi dilakukan melalui berbagai upaya pengembangan sumberdaya manusia aparat pemerintah yang profesional, bersih, berwibawa, tunduk pada hukum, serta taat pada norma umum yang berlaku.

Reorientasi juga menyangkut pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang harus dirasakan adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, tetapi juga meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai adalah pertumbuhan yang lebih berkualitas yang disertai dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, manajemen pembangunan harus diarahkan untuk memacu pemerataan melalui pertumbuhan. Reorientasi dilakukan pula dengan mengutamakan pembangunan kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi, kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat

secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

6.1.2. Reposisi

Reposisi dimaksudkan untuk menegaskan dan menguatkan peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan. Reposisi berarti juga pelaksanaan peran dan fungsi Pemerintah Pusat dan Provinsi di daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sleman memegang peran sentral dalam percepatan, fasilitasi, integrasi dan distribusi pembangunan yang maju dengan tetap dalam konteks nasional. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong kemandirian daerah dengan pengelolaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan produktif. Reposisi juga berkaitan dengan perubahan paradigma dari penerima yang pasif menjadi penyumbang yang aktif pada pencapaian tujuan pembangunan, dan perubahan paradigma dari mengatur ke dalam (*inward looking*) menjadi mencari ke luar (*outward looking*).

Reposisi ini berarti kemajuan hanya dapat dicapai melalui upaya sinergis yang memadukan semua unsur kekuatan dan berbasis pada kemampuan daerah. Oleh karena itu, kerjasama nasional dan internasional yang saling menguntungkan harus dibangun secara intensif sebagai sarana percepatan pembangunan. Reposisi tersebut mengharuskan perbedaan pola kerja dari para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar tidak sepenuhnya menggantungkan pada kekuatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang tersedia, tetapi harus mampu membangun jejaring yang luas dalam pembiayaan, pengembangan pasar, dan investasi.

Konsekuensi dari paradigma baru tersebut adalah perbaikan pelayanan ke dalam dan kemudahan akses dan kepercayaan yang tinggi dari luar. Pimpinan daerah harus mampu menjadi pembangun birokrasi yang bersih dengan pelayanan efektif dan efisien. Pemikiran ini juga sejalan dengan arah baru pembangunan daerah yang menuju kemandirian ekonomi yang berarti menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri.

6.1.3 Revitalisasi

Bertolak dari pemikiran Reorientasi dan Reposisi, Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai perencana, pelaksana, dan penyedia dana pembangunan harus melakukan revitalisasi dalam merumuskan satu acuan pembangunan sebagai peta jalan (*road map*) menuju kesejahteraan. Perencanaan merupakan kewajiban pimpinan tertinggi di daerah yang didelegasikan kepada SKPD terkait. Kelemahan di masa lalu adalah perencanaan pembangunan dilakukan secara parsial menurut masing-masing sektor dan daerah sehingga mengesankan bahwa rencana pembangunan merupakan mosaik yang terlepas satu dengan lainnya.

Revitalisasi dimaksudkan untuk menguatkan kembali perencanaan pembangunan dan lembaga perencana. Dalam satu daerah hanya ada satu rencana pembangunan induk yang menjadi acuan semua pihak terkait dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan. Hal ini memungkinkan terjadinya keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga lebih efektif, efisien dan profesional. Selain itu, revitalisasi dimaksudkan untuk mengangkat nilai budaya dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga ciri khas daerah menjadi yang utama dan nyata.

Kedudukan pimpinan atau perencana tradisional perlu dilibatkan untuk mewarnai pembangunan dengan potensi dan kearifan lokal. Dalam perspektif ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sesuai dengan nilai-nilai budaya, norma, dan kearifan daerah.

6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Sleman

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah	1. Meningkatnya kualitas SDM aparat	1. Persentase peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	1. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
		2. Kasus pelanggaran disiplin	1. Meningkatkan kualitas	1. Penguatan

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		PNS	sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja.	kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
		3. Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	1. Melakukan evaluasi dan penataan ulang organisasi perangkat daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang ada.	1. Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
	2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	1. Tingkat capaian kinerja daerah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	1. Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja.	2. Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
		2. Persentase SKPD yang memiliki SOP	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	1. Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.
		3. SKPD yang telah menerapkan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) kategori baik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	1. Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Meningkatnya transparansi	1. Penyediaan informasi publik	1. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT
		2. Jenis Informasi yang disajikan	1. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Mendorong tersedianya data dan informasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan.
		3. Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Optimalisasi pelayanan kepada

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
	4. Meningkatnya pelayanan masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	1. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
	5. Meningkatnya	1. Opini BPK	1. Meningkatkan kualitas	1. Penguatan

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah		pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
		2. Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	1. Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.
	6. Meningkatnya kerjasama daerah	1. Banyaknya kerjasama aktif	1. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak	1. Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah, perguruan tinggi,

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				organisasi profesi dan swasta.
	7. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1. Cakupan penerbitan KTP	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	1. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
2. Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan,	1. Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah			
		2. Keterwakilan komponen masyarakat dalam forum Musrenbang	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.
		3. Rasio swadaya masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Kasus tertangani	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
		2. Penyelesaian kasus permasalahan hukum	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Persentase menurunnya jumlah konflik di masyarakat	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
	3. Meningkatnya kerukunan masyarakat	1. Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
	4. Meningkatnya penanggulangan bencana	1. Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	1. Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			daerah	peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.
		2. Regulasi penanggulangan bencana	1. Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3. Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana	1. Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.
		4. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	1. Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilkada, Pilkades, Pilduk	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
		2. Persentase Ormas aktif	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015				
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM	1. Angka kejadian pelanggaran HAM	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
		2. Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas hidup penduduk	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Angka Melek Huruf	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
		2. Rata-rata lama sekolah	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
		3. Rata-rata APK SD, SMP, SMA/K	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
		4. Rata-rata APM SD, SMP, SMA/K	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar,	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	bagi masyarakat
		5. Kelayakan guru mengajar SD, SMP, SMA/K	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
		6. Meningkatnya minat baca masyarakat	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
		7. Prestasi Siswa (Akademik/non akademik)	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Meningkatnya derajat kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		2. Angka kematian bayi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		3. Angka kematian Balita	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		4. Angka kematian ibu	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		5. Angka kesembuhan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,	1. Meningkatkan

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		penderita TB Paru BTA+	perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		6. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		7. Prevalensi HIV	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		8. Persentase Balita dengan gizi buruk	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		9. Persentase Balita gizi kurang	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	2. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		10. Presentase penduduk	1. Meningkatkan kualitas	2. Meningkatkan

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	kan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat
		11. Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat	2. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat
	3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat
		2. Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat
		3. Pasangan Usia Subur sasaran KB yang tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			kepesertaan KB mandiri	dan masyarakat
		4. KB Pria	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat
		5. KB Mandiri	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat
2. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS	1. Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat	1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PMKS.
		2. Sumber potensi kesejahteraan sosial (Karang Taruna dan Pekerja Sosial	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta	1. Meningkatkan kesejahteraan dan

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Masyarakat)	keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat	kemandiri an PMKS.
		3. Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat	1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandiri an PMKS.
		4. Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat
3. Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga	1. Persentase Ormas kepemudaan yang aktif	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga	1. Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Prestasi olah raga tingkat provinsi	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga	1. Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga
4. Meningkatkan pelestarian budaya	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya	1. Prestasi olah raga tingkat provinsi	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga	1. Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga
		2. Pelestarian nilai-nilai tradisi	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.	1. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.
		3. Pelestarian warisan dan cagar budaya	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.	1. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Kelompok kesenian perempuan	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.	1. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

MISI III : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan perekonomian daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi sektor :		
		a. Primer	1. Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
		b. Sekunder	1. Meningkatkan kualitas	1. Meningkatkan

			sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	kan keamanan dan kelancaran distribusi perdagangan.
		c. Tersier	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	1. Pengembangan dan pemasaran produk pariwisata
			2. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing	2. Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar
	2. Meningkatnya penanaman modal	Pertumbuhan nilai penanaman modal	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk	1. Meningkatkan Penanaman Modal yang berwawasan

			meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	lingkungan.
2. Meningkatkan daya beli masyarakat	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	1. Tingkat pengangguran terbuka	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja.
		2. Persentase KK miskin	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja
		3. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja

		4. PDRB perkapita (ADHB, ribu rupiah)	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja
				2. Meningkatkan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan.
			2. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing	3. Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar
		5. Angka Gini Ratio	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja.

			program pemerintah, swasta dan masyarakat.	
			2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	2. Meningkatkan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan	2. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Ketersediaan energi perkapita	1. Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
		2. Ketersediaan protein perkapita	1. Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan

				dan berwawasan lingkungan
--	--	--	--	---------------------------

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan	1. Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat	Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
	2. Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi	1. Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat	Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
	3. Meningkatnya kualitas transportasi,	1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail) dan	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui	Mendorong partisipasi masyarakat dan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	penerangan jalan umum pada jalan kabupaten	optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat	swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
		2. SKPD melaksanakan E-Gov		
	4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1. Persentase kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman baik	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman
		2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman
	5. Meningkatnya prasarana dan	1. Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana	Meningkatkan pengelolaan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	sarana dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana	bencana baik	dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
	6. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	1. Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
	7. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olah raga	1. Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Kelayakan prasarana dan sarana sekolah	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
		3. Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
	8. Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan	1. Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				pembangunan
	9. Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan	1. Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari	1. Menjaga kualitas sumber daya alam	1. Luas lahan kritis	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
		2. Luas lahan rusak akibat penambangan	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				pelaksanaan pembangunan
		3. Luas hutan	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
		4. Alih fungsi lahan pertanian	1. Peningkatan kinerja	Mewujudkan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
		5. Tertib pemanfaatan tanah	1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
		6. Tertib administrasi pertanahan	1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
		7. RTH perkotaan	1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
		8. Tersedianya Informasi RTRW serta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
	2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
		2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
		3. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui	Meningkatkan pengelolaan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.	sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
		4. Usaha yang memiliki IPAL	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
		5. Usaha yang memiliki dokumen lingkungan	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan

MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				pembangunan
	3. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi	1. Energi terbarukan terbangun	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Mendorong tersedianya energi listrik bagi seluruh masyarakat melalui pengembangan energi alternatif dan jaringan listrik negara
		2. Elektifikasi	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Mendorong tersedianya energi listrik bagi seluruh masyarakat melalui pengembangan energi alternatif dan jaringan

MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	1. Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak	1. Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (100%)	1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
		2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50%)	1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
		3. Lembaga PUG yang aktif	1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
		4. Pemenuhan hak-hak Anak	1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan	Meningkatkan kualitas perlindungan

MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
		5. Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki	1. Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
		6. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf	1. Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
	2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Partisipasi perempuan di eksekutif Pemerintah	1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.

MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Keterwakilan perempuan dalam DPRD	1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
		3. Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja	1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.

6.2.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Arah kebijakan pembangunan wilayah mengacu pada kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, yaitu :

- a. pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana;
- b. pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi;
- c. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan;
- e. pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;
- f. pengembangan kawasan pendidikan;
- g. pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan;
- h. pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan;
- i. pemantapan prasarana wilayah;
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Sebagai tindak lanjut penetapan arah kebijakan pembangunan wilayah, maka ditetapkan kawasan strategis kabupaten, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis tersebut terdiri dari :

- 1) Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, meliputi:
 - a. Kawasan strategis provinsi yang terdiri atas :
 - i. Kawasan perkotaan Kabupaten seluas kurang lebih 9.835 hektar yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), yaitu Kecamatan : Godean, Gamping, Mlati, Depok, Ngemplak dan Ngaglik.
 - ii. Kawasan koridor Yogyakarta-Piyungan-Wonosari-Rongkop-Sadeng

- iii. Kawasan koridor Temon-Wates-Yogyakarta-Prambanan
 - iv. Kawasan koridor Tempel-Parangtritis
 - b. Kawasan strategis kabupaten, seluas kurang lebih 4.886 (empat ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar berupa kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah berupa kawasan pertanian tanaman pangan beririgasi di Selatan Selokan Mataram meliputi :
 - i. Kecamatan Moyudan;
 - ii. Kecamatan Minggir;
 - iii. Kecamatan Seyegan;
 - iv. Kecamatan Godean;
 - v. Kecamatan Mlati; dan
 - vi. Kecamatan Tempel
- 2) Kawasan strategis sosial budaya, meliputi :
- a. Kawasan strategis nasional, yaitu kawasan peninggalan arkeologis berupa situs peninggalan purbakala kompleks Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko yang berada di Kecamatan Prambanan;
 - b. Kawasan strategis provinsi berupa situs peninggalan purbakala candi meliputi
 - i. Kecamatan Berbah,
 - ii. Kecamatan Kalasan
 - iii. Kecamatan Prambanan
- 3) Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan strategis provinsi berupa kawasan teknologi tinggi di wilayah Gunungapi Merapi
- 4) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang meliputi :
- a. Kawasan strategis nasional berupa kawasan Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.728,38 hektar meliputi :
 - i. Kecamatan Turi;
 - ii. Kecamatan Pakem;
 - iii. Kecamatan Cangkringan

b. Kawasan strategis kabupaten seluas kurang lebih 23.683 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar berupa kawasan resapan air meliputi:

- i. Kecamatan Seyegan;
- ii. Kecamatan Mlati;
- iii. Kecamatan Ngemplak.
- iv. Kecamatan Ngaglik;
- v. Kecamatan Sleman;
- vi. Kecamatan Tempel;
- vii. Kecamatan Turi;
- viii. Kecamatan Pakem; dan
- ix. Kecamatan Cangkringan.

Rencana pengembangan kawasan dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Rencana Pengembangan Kawasan

Rencana Pengembangan Kawasan Zona Pengembangan	Ketentuan Pemanfaatan	Pembagian Rencana Pengembangan
<p>Kawasan Pengembangan BAGIAN UTARA</p> <p>Cakupan: Kec. Cangkringan, Turi, Pakem, sebagian Ngaglik, sebagian Ngemplak, Sleman, Kec. Tempel.</p> <p>Bagian selatan berbatasan dengan Kawasan APY</p> <p>Karakteristik Khusus: Merupakan kawasan hutan lindung yang ditetapkan dalam TNGM, resapan air serta potensi rawan bencana Gunung Merapi.</p>	<p>Kawasan hutan lindung, Kawasan pertanian lahan kering,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan ▪ Merupakan kawasan lindung bagian dari TN Gunung Merapi dengan wilayah sekitarnya menjadi wilayah penyangga yang dapat menjadi kawasan budidaya terbatas. ▪ Kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata. ▪ Pusat Pelayanan di Desa Margorejo (Kec. Tempel) dan Pakem binangun (Kec. Pakem). ▪ Meliputi Kec. Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan.
	<p>Kawasan pertambangan pasir secara terbatas</p> <p>Kawasan permukiman pedesaan.</p> <p>Kepadatan penduduk diarahkan untuk rendah di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p> <p>Kepadatan sedang untuk kawasan yang ditetapkan sebagai sub pusat pengembangan.</p>	

Rencana Pengembangan Kawasan Zona Pengembangan	Ketentuan Pemanfaatan	Pembagian Rencana Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan II ▪ Kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata. ▪ Pusat pelayanan di Desa Sardonoarjo dan kawasan perdagangan di sepanjang jalan kolektor primer. ▪ Meliputi Desa Sardonoarjo, Sukoharjo (Kec. Ngaglik), Umbulmartani, Widodomartani, Bimomartani dan Sindumartani (Kec. Ngemplak).
<p>Kawasan Pengembangan BAGIAN TIMUR</p> <p>Cakupan: Kec. Prambanan, Kalasan, Berbah</p> <p>Bagian barat berbatasan dengan Kawasan APY</p> <p>Karakteristik Khusus: Banyak ditemukan situs peninggalan arkeologis terutama candi-candi.</p>	<p>Kawasan lindung cagar budaya serta wisata budaya minat khusus.</p> <p>Kawasan permukiman pedesaan.</p> <p>Kepadatan penduduk diarahkan untuk rendah di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung serta kawasan perdesaan.</p> <p>Kepadatan sedang untuk kawasan yang ditetapkan sebagai sub pusat pengembangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya (candi): ▪ Kegiatan dominan perlindungan untuk Kompleks Candi Prambanan yang merupakan Kawasan Strategis Sosio Kultural sebagai kebanggaan nasional. ▪ Kawasan pengembangan pertanian. ▪ Pusat pelayanan di Desa Bokoharjo (Kec. Prambanan) dan kawasan perdagangan di sepanjang jalan arteri primer. ▪ Meliputi Desa Tamanmartani (Kec. Kalasan), Bokoharjo, Sambirejo, Madurejo, Sumberharjo, Wukirharjo, Gayamharjo (Kec. Prambanan).
		<p>Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan III</p> <p>Pusat pelayanan di Desa Purwomartani (Kec. Kalasan) dan kawasan perdagangan di sepanjang jalan arteri primer. Meliputi Desa Selomartani, Purwomartani, Tirtomartani (Kec. Kalasan), Kalitirto, Sendangtirto, Tegaltirto dan Jogotirto (Kec. Berbah)</p>
<p>Kawasan Pengembangan BAGIAN SELATAN</p> <p>Cakupan: Kec. Depok, beberapa bagian Kec. Gamping, Godean, Mlati, Ngaglik dan Ngemplak.</p> <p>Karakteristik Khusus: Merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang berkembang sebagai kawasan budidaya dan pusat berbagai kegiatan.</p>	<p>Kawasan permukiman perkotaan.</p> <p>Kepadatan penduduk diarahkan untuk tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta: ▪ Pusat pelayanan perdagangan ▪ Fasilitas pendidikan tinggi ▪ Bandara sebagai bandara PP dan kawasan strategis hankam ▪ Terminal tipe A ▪ Meliputi Desa Caturtunggal, Maguwoharjo dan Condongcatur (Kec. Depok), Desa Banyuraden, Ambarketawang, Trihanggo dan Nogotirto (Kec. Gamping), Desa Sidoarum (Kec. Godean), Desa Sinduadi dan Sendangadi (Kec. Mlati), Desa Minomartani, Sinduharjo dan Sariharjo (Kec. Ngaglik), Desa Wedomartani (Kec.

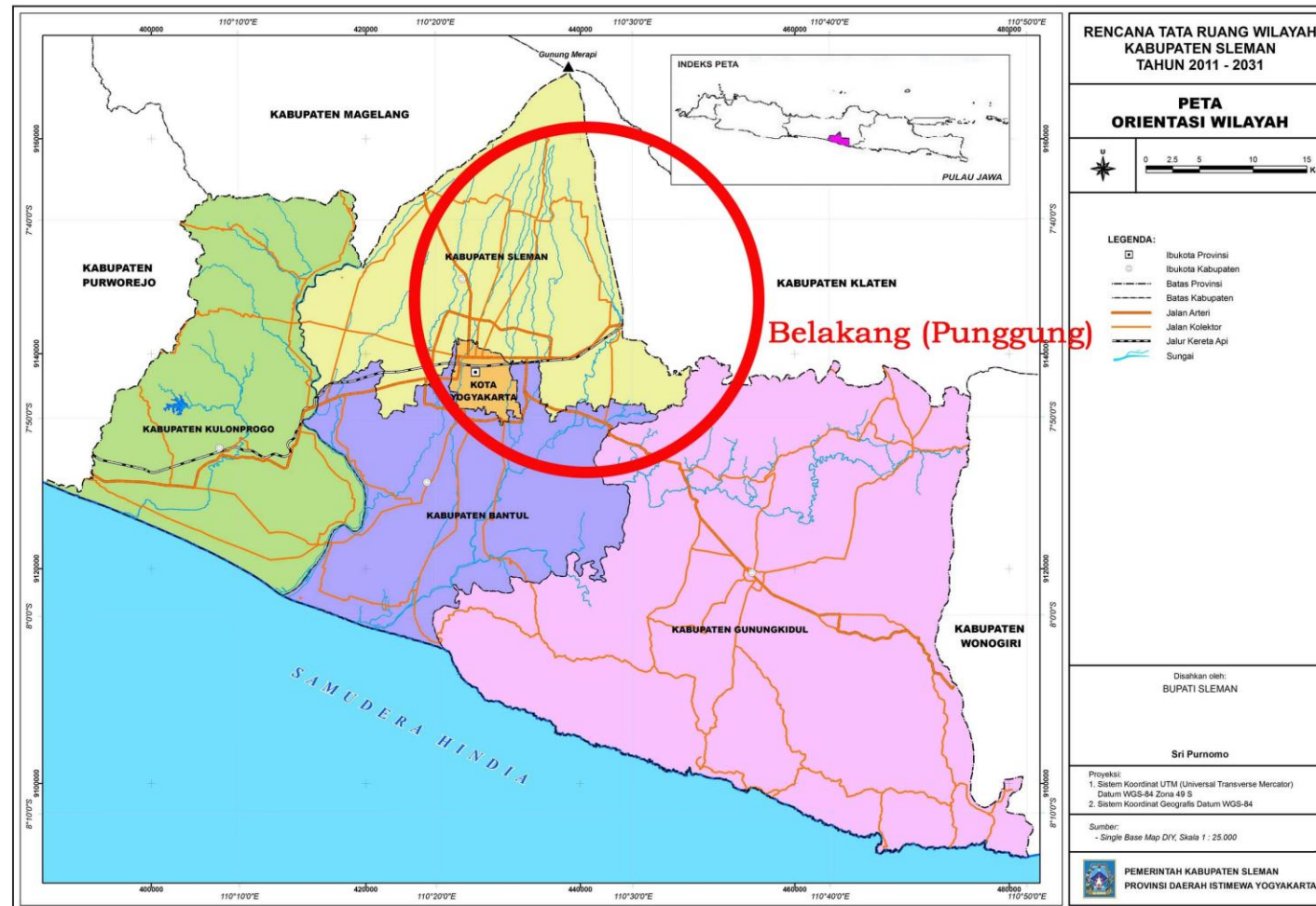
Rencana Pengembangan Kawasan Zona Pengembangan	Ketentuan Pemanfaatan	Pembagian Rencana Pengembangan
		Ngemplak).
<p>Kawasan Pengembangan BAGIAN BARAT</p> <p>Cakupan: Kec. Moyudan, Minggir, Seyegan, beberapa bagian Kec. Mlati dan Godean</p> <p>Bagian timur berbatasan dengan Kawasan APY</p> <p>Karakteristik Khusus Kawasan pertanian dan industri terutama IKRT.</p>	<p>Kawasan pertanian dengan desa wisata untuk mendukung budidaya pertanian yang lebih berdayaguna.</p> <p>Kawasan peruntukan industri terutama IKRT.</p> <p>Kawasan permukiman pedesaan. Kepadatan penduduk diarahkan untuk rendah di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p> <p>Kepadatan sedang untuk kawasan yang ditetapkan sebagai sub pusat pengembangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan IV: ▪ Pusat pelayanan di Desa Sidoagung dan kawasan perdagangan di sepanjang jalan arteri primer. ▪ Kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata. ▪ Meliputi Desa Balecatur, Margoluwih (Kec. Seyegan), Sumberadi, Tlogoadi, Tirtoadi (Kec. Mlati), Desa Sidolahur, Sidoagung, Sidokarto, Summersari, Sidomulyo, Sidomoyo dan Balecatur (Kec. Gamping). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian (Sawah Abadi): ▪ Pusat pelayanan di Desa Sumberagung dan kawasan perdagangan di sepanjang jalan arteri primer. ▪ Kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata. ▪ Meliputi Desa Margoagung, Margomulyo, Margokaton, Margoadi (Kec. Seyegan), Desa Sendangsari, Sendangagung, Sendangrejo, Sidorejo, Sendangmulyo (Kec. Minggir), Desa Sumberarum, Sumberagung, Sumber Rahayu (Kec. Moyudan). Desa Sidorejo (Kec. Godean).

Sumber: Diolah dari Kabupaten Sleman dalam Angka 2009, RTRW DIY 2009-2028 dan sumber lainnya

6.2.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SLEMAN DALAM PARADIGMA “AMONG TANI DAGANG LAYAR”

Dalam paradigma *Among Tani Dagang Layar*, Kabupaten Sleman memiliki posisi sebagai bagian belakang DIY yang berperan menjaga keberlanjutan sistem budaya dan kelestarian lingkungan. Sebagai kawasan di belakang, Kabupaten Sleman memiliki potensi untuk dikembangkan terutama potensi wisata, perdagangan dan jasa.

Konsep pengembangan untuk mendukung paradigma ini adalah Kebijakan Pengembangan wilayah dan Kebijakan Pengembangan perekonomian.



Kedudukan Kabupaten Sleman Sebagai Halaman Belakang Wilayah DIY

A. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Sleman secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) strategi, yaitu :

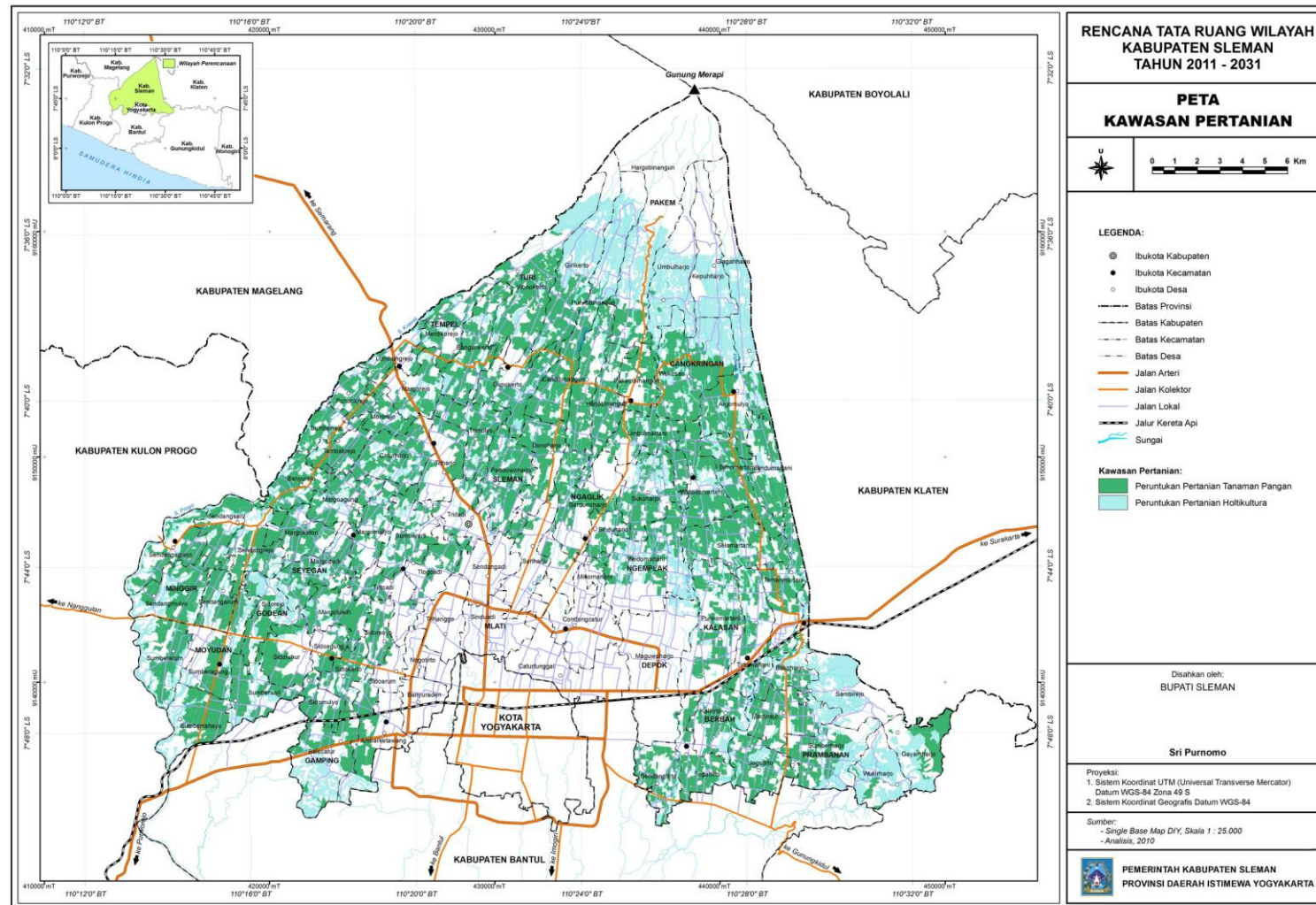
1. Wilayah untuk konservasi/dijaga

Kabupaten Sleman berperan sebagai wilayah **bagian belakang**, untuk menjaga fungsi wilayah DIY secara keseluruhan, antara lain sebagai :

- a. Kawasan lindung daerah bawahan
- b. Kawasan lindung Merapi
- c. Kawasan lumbung pangan
- d. Kawasan peninggalan budaya

2. Wilayah untuk dikembangkan

Pengembangan wilayah difokuskan pada area desa wisata, kawasan perkotaan Yogyakarta, dan koridor-koridor tertentu Kabupaten Sleman



Kawasan Pertanian

B. Kebijakan Pengembangan Perekonomian

Konsep pengembangan perekonomian Kabupaten Sleman difokuskan pada kegiatan sebagai berikut :

1. Perluasan Lahan Pertanian, dengan strategi :
 - a. Optimalisasi Lahan Pertanian Perkotaan
 - b. Plotting Minapolitan
 - c. Penerapan Insentif dan disinsentif
 - d. Jaminan keberlanjutan aktivitas pertanian melalui *Agricultural land banking*

2. Optimalisasi Wisata

Potensi wisata amat beragam, mulai dari desa wisata, wisata pendidikan, wisata pendidikan kebencanaan, wisata cagar budaya, dan masih banyak potensi wisata lainnya. Strategi optimalisasi wisata ditempuh dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan fasilitas desa wisata
 - Perluasan pemasaran desa wisata
 - b. Wisata pendidikan bencana
 - Laboratorium Gunungapi Merapi
 - Laboratorium Gempa
 - c. Wisata cagar budaya
3. Pengembangan *feeder* pada koridor tertentu
Pengembangan *feeder* ini ditujukan sebagai salah satu persiapan pengalihan bandar udara ke wilayah kabupaten Kulon Progo. Strategi yang ditempuh melalui kegiatan :
 - Pengembangan pusat oleh-oleh
 - Pengembangan informasi wisata
 - Pengembangan sistem transportasi terpadu

4. Pengembangan kawasan terpadu

Kawasan terpadu di Kabupaten Sleman direncanakan terletak di 2 lokasi, yaitu :

- a. Kawasan Terpadu Babarsari/Seturan, Caturtunggal, Depok;
Kegiatan dalam kawasan ini merupakan kombinasi antara kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pemukiman dengan strategi
 - 1) Pengembangan pusat-pusat kegiatan
 - 2) Rekayasa lalu lintas

3) *Pedestrian walk*

4) Pengembangan transportasi massal dalam kawasan

b. Kawasan Terpadu Maguwoharjo

Kegiatan dalam kawasan merupakan kombinasi antara kegiatan wisata, budaya, olahraga, dan Ruang Terbuka Hijau dengan strategi :

1) Penatan kawasan embung

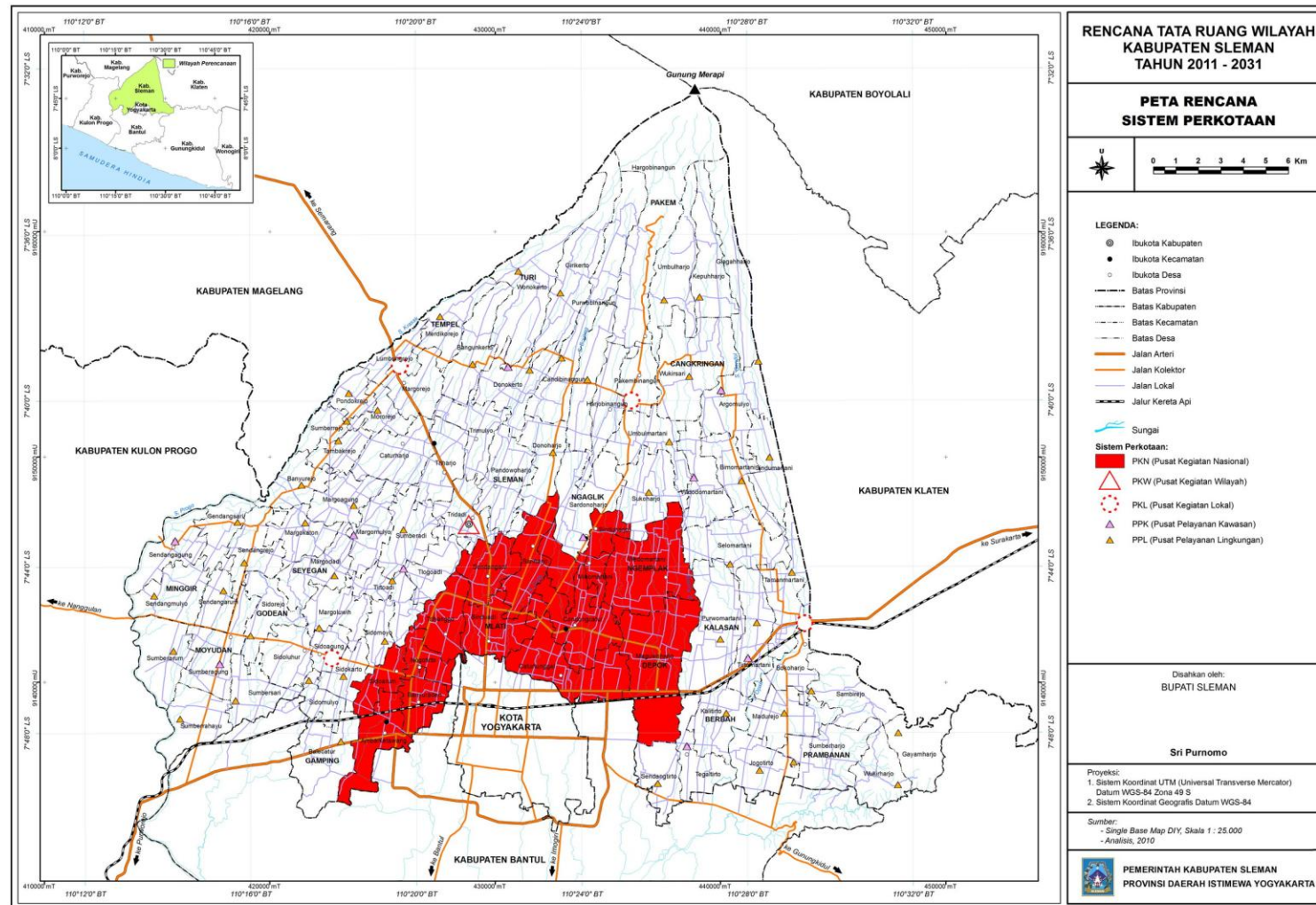
2) Pengembangan wisata terpadu

3) Pengembangan sarana olahraga

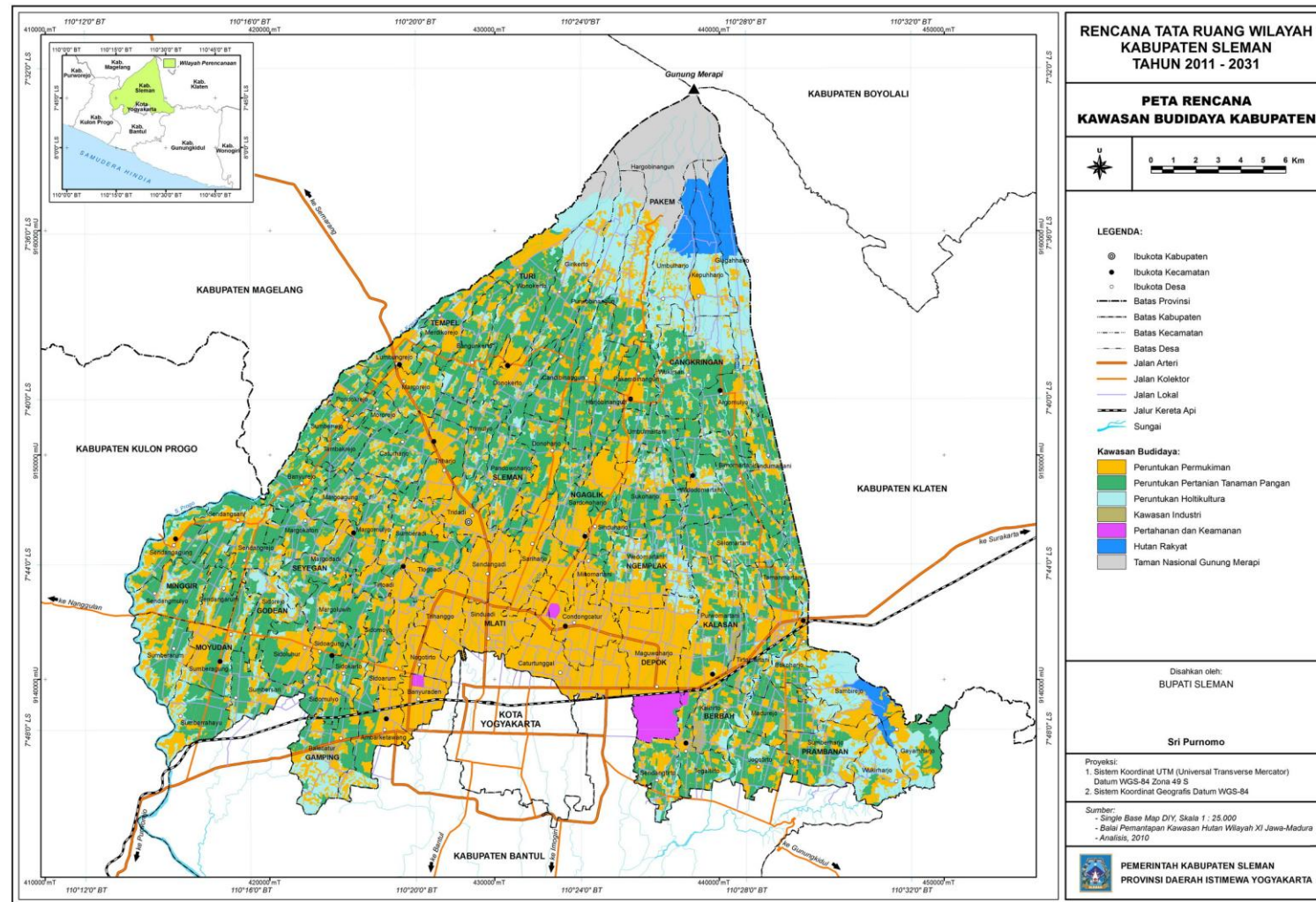
4) Penataan Permukiman

5) Pengembangan kawasan budaya

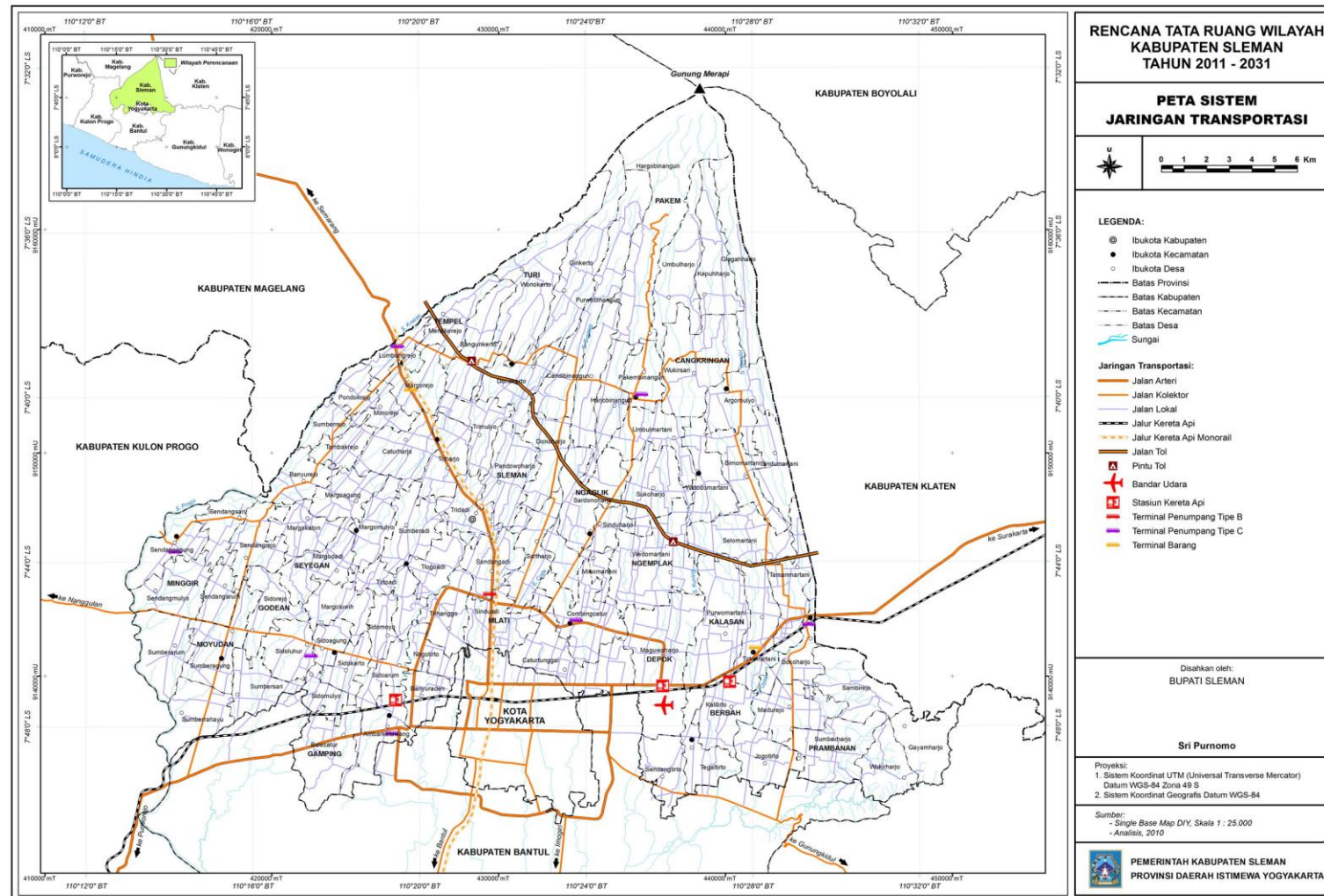
6) Pengembangan RTH



Rencana Sistem Perkotaan



Kawasan Budaya



Sistem Jaringan Transportasi

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai dengan target kinerja yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan umum dan program-program pembangunan daerah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalam pelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sleman baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Pada tahun 2011 pembangunan diarahkan pada pemulihan paska bencana alam gunung Merapi pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memantapkan pencapaian aspek pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2012 pembangunan masih tetap diarahkan pada pemulihan paska bencana alam gunung Merapi dan bencana lainnya pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dengan menjaga dan memantapkan pencapaian pada aspek pendidikan, kesehatan dan ketersediaan infrastruktur.

Pada tahun 2013 pembangunan diarahkan pada penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur.

Pada tahun 2014 pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh peningkatan infrastruktur wilayah yang lebih memadai dan keadaan sosial dan keamanan yang kondusif.

Pada tahun 2015 pembangunan diarahkan pada pemantapan ekonomi yang didukung oleh pemantapan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan

7.1.1. Kebijakan Umum

- a. Mempertahankan Wajar 9 tahun dan melaksanakan Wajar 12 tahun;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
- c. Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu;
- d. Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan;
- e. Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan budi pekerti;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- g. Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD.

7.1.2. Program Pembangunan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Program Pendidikan Menengah;
- d. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal;
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan
- g. Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru.

7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesehatan

7.2.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- c. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat;
- d. Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit; dan
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

- f. Memantapkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan

7.2.2. Kebijakan Umum

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- j. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
- k. Program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- l. Program pemeliharaan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- m. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- n. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
- o. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
- p. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; dan
- q. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pekerjaan Umum

7.3.1. Kebijakan Umum

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat;

- c. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana; dan
- d. Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

7.3.2. Program Pembangunan

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- c. Program pembangunan turap/talud/bronjong;
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
- f. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
- g. Program peningkatan prasarana dan sarana kebinamargaan;
- h. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- i. Program penyediaan dan pengolahan air baku;
- j. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
- k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- l. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- m. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; dan
- n. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah.

7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perumahan

7.4.1. Kebijakan Umum

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat;
- b. Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin; dan
- c. Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

7.4.2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan Perumahan;
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan;

- c. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan;
- d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
- e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; dan
- f. Program pengelolaan areal pemakaman.

7.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang

7.5.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b. Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan;

7.5.2. Program Pembangunan

- a. Program Perencanaan Tata Ruang;
- b. Program Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

7.6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

7.6.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. Meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan.

7.6.2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan data/informasi;
- b. Program Kerjasama Pembangunan;
- c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
- d. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Program perencanaan pembangunan daerah;
- g. Program perencanaan pembangunan ekonomi;

- h. Program perencanaan sosial budaya;
- i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam; dan
- j. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

7.7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perhubungan

7.7.1. Kebijakan Umum

- a. Menjaga dan meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta
- b. Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

7.7.2. Program Pembangunan

- a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- c. Program peningkatan pelayanan angkutan;
- d. Program Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan;
- e. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan
- f. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

7.8. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup

7.8.1. Kebijakan Umum

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;
- b. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat; dan
- c. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

7.8.2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam;
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; dan
- g. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

7.9. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pertanahan

7.9.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; dan
- c. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.

7.9.2. Program Pembangunan

- a. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; dan
- c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

7.10. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

7.10.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi kependudukan.

7.10.2. Program Pembangunan

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

7.11. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7.11.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender; dan
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

7.11.2. Program Pembangunan

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan;
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
- d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

7.12. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

7.12.1. Kebijakan Umum

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
- b. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera; dan
- c. Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

7.12.2. Program Pembangunan

- a. Program Keluarga Berencana;
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- c. Program pelayanan kontrasepsi;
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;

- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS;
- h. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; dan
- i. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

7.13. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Sosial

7.13.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pemberdayaan;
- b. Meningkatkan pembinaan kerukunan kehidupan beragama;
- c. Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat; dan
- d. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napza melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat.

7.13.2. Program Pembangunan

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Program pembinaan anak terlantar;
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- e. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
- f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
- h. Program Penanggulangan Kemiskinan.

7.14. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Tenaga Kerja

7.14.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta; dan

- b. Meningkatkan daya saing, perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial.

7.14.2. Program Pembangunan

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

7.15. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

7.15.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota; dan
- b. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.

7.15.2. Program Pembangunan

- a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

7.16. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah

7.16.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan minat investasi melalui promosi;
- b. Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi; dan
- c. Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

7.16.2. Program Pembangunan

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
- c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah.

7.17. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kebudayaan

7.17.1. Kebijakan Umum

- a. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisional;
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; dan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional.

7.17.2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

7.18. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

7.18.1. Kebijakan Umum

- a. Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi muda; dan
- c. Meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana olah raga melalui peran serta masyarakat dan swasta.

7.18.2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- b. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
- c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga;
- f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan

- g. Program Peningkatan Prasarana dan sarana Olahraga.

7.19. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

7.19.1. Kebijakan Umum

- a. Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
- b. Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila;
- c. Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

7.19.2. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
- g. Program pendidikan politik masyarakat; dan
- h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

7.20. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

7.20.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
- d. Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- e. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- f. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan masyarakat; dan
- g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.

7.20.2. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
- e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- g. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- j. Program peningkatan kerjasama natar pemerintah daerah;
- k. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Program Pendidikan Kedinasan;
- m. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- n. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- o. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- p. Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik;
- q. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- r. Program Peningkatan Administrasi pemerintahan;

- s. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek;
- t. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;
- u. Program Penegakan Hukum; dan
- v. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

7.21. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Ketahanan Pangan

7.21.1. Kebijakan Umum

Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan.

7.21.2. Program Pembangunan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

7.22. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

7.22.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa;
- b. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; dan
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

7.22.2. Program Pembangunan

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
- e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.

7.23. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Statistik

7.23.1. Kebijakan Umum

Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pembangunan.

7.23.2. Program Pembangunan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

7.24. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kearsipan

7.24.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip; dan
- b. Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

7.24.2. Program Pembangunan

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana kearsipan; dan
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

7.25. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

7.25.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat; dan
- b. Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

7.25.2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
- c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; dan
- d. Program kerjasama informasi dan media massa.

7.26. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan

7.26.1. Kebijakan Umum

Meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan dan minat baca masyarakat.

7.26.2. Program Pembangunan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

7.27. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pertanian

7.27.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan;
- b. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan; dan
- c. Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

7.27.2. Program Pembangunan

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- g. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan
- i. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

7.28. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kehutanan

7.28.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan; dan
- b. Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air (*catchment area*).

7.28.2. Program Pembangunan

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan;

- c. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; dan
- d. Program perencanaan dan pengembangan hutan.

7.29. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

7.29.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat;
- b. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- c. Meningkatkan cakupan pelayanan energi; dan
- d. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan

7.29.2. Program Pembangunan

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
- b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
- c. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
- d. Program Pengembangan Energi Terbarukan.

7.30. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pariwisata

7.30.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata; dan
- b. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata.
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana obyek wisata dengan memperhatikan kearifan lokal

7.30.2. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- c. Program Pengembangan Kemitraan.

7.31. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

7.31.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan; dan

- b. Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan.

7.31.2. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan budidaya perikanan;
- b. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;
- c. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; dan
- d. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

7.32. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan

7.32.1. Kebijakan Umum

- a. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pasar tradisional;
- b. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- c. Meningkatkan perlindungan terhadap pedagang tradisional; dan
- d. Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.

7.32.2. Program Pembangunan

- a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri;
- d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- e. Program Pembangunan Prasarana dan sarana Ekonomi; dan
- f. Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar.

7.33. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perindustrian

7.33.1. Kebijakan Umum

- 1) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri; dan
- 2) Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran.

7.33.2. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
- d. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

7.34. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Transmigrasi

7.34.1. Kebijakan Umum

Meningkatkan ketrampilan, kerjasama dan fasilitasi calon transmigran.

7.34.2. Program Pembangunan

Program Transmigrasi Regional.

Tabel 7.1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Kinerja		Urusan/ Program	SKPD Penanggung Jawab*)
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
					2011	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat								
1	Meningkatnya kualitas SDM aparat	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	1. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.	1. Persentase peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2	0,25%	0,33%	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	INSPEKTORAT KABUPATEN
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .					Program Pendidikan Kedinasan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	1. Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah	2. Kasus pelanggaran disiplin PNS	0,26%	0,26%	Program Pendidikan Kedinasan	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1. Melakukan evaluasi dan penataan ulang organisasi perangkat daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang ada.	1. Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah	3. Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	70%	90%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	DINAS PASAR
							Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KANTOR ARSIP DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS KESEHATAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KANTOR KESATUAN BANGSA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	INSPEKTORAT KABUPATEN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS PASAR
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN MOYUDAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN MINGGIR
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN GODEAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN MLATI
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN DEPOK
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN BERBAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN KALASAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN NGAGLIK
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN SLEMAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS PENDAPATAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN PAKEM
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN SEYEGAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN TURI
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	KECAMATAN TEMPEL
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS PENDAPATAN DAERAH
							Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	DINAS KESEHATAN
2.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	1. Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.	1. Tingkat capaian kinerja daerah	90%	90%	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak					Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	1. Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.	2. Persentase SKPD yang memiliki SOP	45%	100%	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	SEKRETARIAT DAERAH
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	1. Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.	3. SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik	55%	62,5%	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
							Program pengembangan kualitas kebijakan publik	SEKRETARIAT DAERAH
							Program pengembangan kualitas kebijakan publik	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN MLATI
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN MINGGIR
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN SEYEGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN MOYUDAN
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN GODEAN
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN SLEMAN
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN TEMPEL
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN TURI
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN PAKEM
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN DEPOK
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN KALASAN
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN NGEMPLAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN BERBAH
							Program peningkatan administrasi pemerintahan	KECAMATAN NGAGLIK
							Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	KECAMATAN TURI
							Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	KANTOR ARSIP DAERAH
							Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	SEKRETARIAT DAERAH
							Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	KANTOR ARSIP DAERAH
							Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	SEKRETARIAT DAERAH
							Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	KANTOR ARSIP DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya transparansi	1. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT	1. Penyediaan informasi publik	9	10	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	SEKRETARIAT DAERAH
		1. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Mendorong tersedianya data dan informasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan.	2. Jenis Informasi yang disajikan	3	3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	KANTOR ARSIP DAERAH
		1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.	3. Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	60	100	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DINAS KESEHATAN
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DINAS PASAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program kerjasama informasi dan media massa	SEKRETARIAT DAERAH
							Program kerjasama informasi dan media massa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program kerjasama informasi dan media massa	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	DINAS PASAR
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN MOYUDAN
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN SEYEGAN
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN GODEAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN GAMPING
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN MLATI
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN DEPOK
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN BERBAH
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN NGAGLIK
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN SLEMAN
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN TEMPEL
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN TURI
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN PAKEM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN KALASAN
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN MINGGIR
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	SEKRETARIAT DAERAH
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	SEKRETARIAT DAERAH
4.	Meningkatnya pelayanan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	1. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	75	79	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN MINGGIR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	SEKRETARIAT DAERAH
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN DEPOK
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	DINAS KESEHATAN
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	DINAS PASAR
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN MOYUDAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN SEYEGAN
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN GODEAN
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN MLATI
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN BERBAH
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN KALASAN
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN NGAGLIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN SLEMAN
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN TEMPEL
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN TURI
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN PAKEM
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program peningkatan kualitas pelayanan publik	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KESEHATAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KANTOR KESATUAN BANGSA
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT KABUPATEN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PASAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN MOYUDAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN MINGGIR
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN SEYEGAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN GODEAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN GAMPING
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN MLATI
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN DEPOK
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN BERBAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN KALASAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN NGAGLIK
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN SLEMAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN TEMPEL
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN TURI
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN PAKEM
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PENDAPATAN DAERAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KANTOR ARSIP DAERAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN PAKEM
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	SEKRETARIAT DAERAH
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN MLATI
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS KESEHATAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS PASAR
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN SEYEGAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN GODEAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN NGAGLIK
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN SLEMAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN TEMPEL
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN MOYUDAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN KALASAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN BERBAH
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KANTOR KESATUAN BANGSA
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	INSPEKTORAT KABUPATEN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN DEPOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN TURI
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS PENDAPATAN DAERAH
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KANTOR ARSIP DAERAH
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	KECAMATAN MINGGIR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN MINGGIR
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KANTOR KESATUAN BANGSA
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	INSPEKTORAT KABUPATEN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN DEPOK
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN BERBAH
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN PRAMBANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS PENDAPATAN DAERAH
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KANTOR ARSIP DAERAH
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS KESEHATAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS PASAR
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN MOYUDAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN SEYEGAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN GODEAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN MLATI
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN KALASAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN NGAGLIK
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN SLEMAN
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN TEMPEL
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN TURI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KECAMATAN PAKEM
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SEKRETARIAT DAERAH
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	SEKRETARIAT DAERAH
5.	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	1. Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah	1. Opini BPK	WDP	WTP	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	1. Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.	2. Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	14,77	21	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	DINAS KESEHATAN
							Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
							Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	SEKRETARIAT DAERAH
							Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	DINAS PENDAPATAN DAERAH
							Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	DINAS PASAR
							Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	DINAS PASAR
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	DINAS PENDAPATAN DAERAH
6.	Meningkatnya kerjasama daerah	1. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak	1. Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah, perguruan tinggi, organisasi profesi dan swasta.	1. Banyaknya kerjasama aktif	50	95	Program Kerjasama Pembangunan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program Kerjasama Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	SEKRETARIAT DAERAH
7.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Mendorong tersedianya data dan informasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan.	1. Cakupan penerbitan KTP	94%	99%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN SEYEGAN
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN BERBAH
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN MOYUDAN
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN MINGGIR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN GODEAN
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN GAMPING
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN MLATI
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN DEPOK
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN KALASAN
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN NGAGLIK
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN SLEMAN
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN TEMPEL
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN TURI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	KECAMATAN PAKEM
8.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.	1. Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan	92%	96%	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN PAKEM
		1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.	2. Keterwakilan komponen masyarakat dalam forum Musrenbang	8	8	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN DEPOK
		1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.	3. Rasio swadaya masyarakat	1 : 7.5	1 : 5	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN SEYEGAN
		1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.	4. Kasus tertangani			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN BERBAH
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN SLEMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN TEMPEL
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN TURI
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN MOYUDAN
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN SEYEGAN
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN MLATI
							Program perencanaan pembangunan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program perencanaan pembangunan daerah	INSPEKTORAT KABUPATEN
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN MOYUDAN
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN GODEAN
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN GAMPING
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN DEPOK
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN KALASAN
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN NGAGLIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN SLEMAN
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN TEMPEL
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN TURI
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN PAKEM
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN BERBAH
							Program perencanaan pembangunan daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN MINGGIR
							Program perencanaan pembangunan daerah	SEKRETARIAT DAERAH
							Program perencanaan pembangunan daerah	KECAMATAN CANGKRINGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program perencanaan pembangunan daerah	DINAS PENDAPATAN DAERAH
							Program perencanaan sosial budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program perencanaan pembangunan ekonomi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program perencanaan pembangunan ekonomi	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program perencanaan pembangunan ekonomi	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							Program perencanaan pembangunan ekonomi	SEKRETARIAT DAERAH
							Program perencanaan pembangunan ekonomi	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Program perencanaan pembangunan ekonomi	DINAS PASAR
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN MINGGIR
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN BERBAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN MOYUDAN
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN SEYEGAN
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN GODEAN
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN MLATI
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN DEPOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN KALASAN
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN NGAGLIK
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN SLEMAN
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN TEMPEL
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN TURI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN PAKEM
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN MOYUDAN
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN SEYEGAN
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN GODEAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN DEPOK
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN BERBAH
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN KALASAN
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN NGAGLIK
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN SLEMAN
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN TEMPEL
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN TURI
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN PAKEM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN MLATI
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	SEKRETARIAT DAERAH
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN MOYUDAN
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN GODEAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN DEPOK
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN KALASAN
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN NGAGLIK
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN SLEMAN
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN TEMPEL
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN TURI
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN PAKEM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN SEYEGAN
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN BERBAH
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN MLATI
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN MINGGIR
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN SEYEGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	SEKRETARIAT DAERAH
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS PENDAPATAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	INSPEKTORAT KABUPATEN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN BERBAH
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS PASAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN MOYUDAN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN GODEAN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN DEPOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN KALASAN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN NGAGLIK
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN SLEMAN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN TEMPEL
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN TURI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN PAKEM
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KANTOR ARSIP DAERAH
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KANTOR KESATUAN BANGSA
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN MINGGIR
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	KECAMATAN MLATI
							Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	INSPEKTORAT KABUPATEN
9.	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.	1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	70%	90%	Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.	2. Penyelesaian kasus permasalahan hukum	100	100	Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
							Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program penegakan hukum	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program penegakan hukum	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program penegakan hukum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program penegakan hukum	KECAMATAN SEYEGAN
							Program penegakan hukum	KECAMATAN GODEAN
							Program penegakan hukum	KECAMATAN GAMPING
							Program penegakan hukum	KECAMATAN MLATI
							Program penegakan hukum	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program penegakan hukum	KECAMATAN KALASAN
							Program penegakan hukum	KECAMATAN NGEMPLAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program penegakan hukum	KECAMATAN NGAGLIK
							Program penegakan hukum	KECAMATAN SLEMAN
							Program penegakan hukum	KECAMATAN PAKEM
							Program penegakan hukum	KECAMATAN MINGGIR
							Program penegakan hukum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program penegakan hukum	KECAMATAN MOYUDAN
							Program penegakan hukum	KECAMATAN TEMPEL
							Program penegakan hukum	KECAMATAN TURI
							Program penegakan hukum	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program penegakan hukum	KECAMATAN DEPOK
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN MINGGIR
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN TURI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN PAKEM
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	DINAS KESEHATAN
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	DINAS PASAR
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN MOYUDAN
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN SEYEGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN GODEAN
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN GAMPING
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN MLATI
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN DEPOK
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN KALASAN
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN NGAGLIK
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN SLEMAN
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN TEMPEL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN NGEMPLAK
10.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.	1. Persentase menurunnya jumlah konflik di masyarakat	3,70%	7,14%	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN MINGGIR
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN TURI
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KANTOR KESATUAN BANGSA
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN TEMPEL
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN SEYEGAN
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN GODEAN
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN MLATI
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN DEPOK
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN KALASAN
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN NGAGLIK
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN SLEMAN
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN PAKEM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN MOYUDAN
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KECAMATAN BERBAH
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	DINAS PASAR
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN MOYUDAN
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN SEYEGAN
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN GODEAN
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN GAMPING
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN DEPOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN BERBAH
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN KALASAN
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN NGAGLIK
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN SLEMAN
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN TEMPEL
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN PAKEM
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KANTOR KESATUAN BANGSA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN MLATI
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN MINGGIR
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	SEKRETARIAT DAERAH
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KECAMATAN TURI
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN MOYUDAN
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN GODEAN
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN GAMPING

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN MLATI
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN DEPOK
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN BERBAH
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN KALASAN
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN NGAGLIK
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN SLEMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN TEMPEL
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN TURI
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN PAKEM
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
11.	Meningkatnya kerukunan masyarakat	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan	1. Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)	≤6	≤6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN MOYUDAN
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN GODEAN
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN GAMPING

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN MLATI
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN KALASAN
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN NGAGLIK
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN SLEMAN
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN TEMPEL
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN PAKEM
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KANTOR KESATUAN BANGSA
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN DEPOK
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN BERBAH
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN SEYEGAN
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN TURI
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN MINGGIR
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN MOYUDAN
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN MINGGIR
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN SEYEGAN
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN GODEAN
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN GAMPING

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN MLATI
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN DEPOK
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN BERBAH
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN KALASAN
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN NGAGLIK
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN SLEMAN
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN TEMPEL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN TURI
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN PAKEM
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	KANTOR KESATUAN BANGSA
12.	Meningkatnya penanggulangan bencana	1. Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.	1. Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	1990	3823	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		1. Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.	2. Regulasi penanggulangan bencana	3	6	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	KECAMATAN CANGKRINGAN
		1. Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.	3. Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana	10,06%	34,75%	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.	4. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	85,71%	75%	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN MINGGIR
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN TURI
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN BERBAH
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN SEYEGAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN GAMPING
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN DEPOK
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN KALASAN
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN MOYUDAN
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN GODEAN
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN MLATI
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN NGAGLIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN TEMPEL
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN PAKEM
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
13.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilkada, Pilkades, Pilduk	70%	79%	Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN SEYEGAN
		1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.	2. Persentase Ormas aktif	66	67	Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN GODEAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN GAMPING
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN DEPOK
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN BERBAH
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN KALASAN
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN NGAGLIK
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN SLEMAN
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN TEMPEL
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN PAKEM
							Program pendidikan politik masyarakat	KANTOR KESATUAN BANGSA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN MOYUDAN
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN TURI
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN MLATI
							Program pendidikan politik masyarakat	KECAMATAN MINGGIR
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	SEKRETARIAT DAERAH
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN MOYUDAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN MINGGIR
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN SEYEGAN
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN GODEAN
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN GAMPING
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN MLATI
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN DEPOK
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN BERBAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN KALASAN
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN NGAGLIK
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN SLEMAN
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN TEMPEL
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN TURI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN PAKEM
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	KANTOR KESATUAN BANGSA
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
14.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM	1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.	1. Angka kejadian pelanggaran HAM		5	1	
		1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.	1. Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.	2. Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD		80	90	
MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat								
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.	1. Angka Melek Huruf	92,36%	96,48%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN MOYUDAN
		1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	10,12	10,71%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN MINGGIR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat	3. Rata-rata APK SD, SMP, SMA/K	115.84, 115.88, 75.76	116.64, 113.76, 77.78	Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN SEYEGAN
		1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat	4. Rata-rata APM SD, SMP, SMA/K	99.16, 81.02, 53.91	101.52, 82.02, 55.17	Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN GODEAN
		1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat	5. Kelayakan guru mengajar SD, SMP, SMA/K	45, 79, 88	77, 91, 94	Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN GAMPING
		1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat	6. Meningkatnya minat baca masyarakat	27%	37%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN MLATI
		1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat	7. Prestasi Siswa (Akademik/non akademik)	5, 25	25, 49	Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN DEPOK
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN BERBAH
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN KALASAN
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN NGAGLIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN SLEMAN
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN TEMPEL
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN PAKEM
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
					115,84 %, 115,88 %, 99,16% , 81,02%	116,64 %, 113,76 %, 101,52 %, 82,02%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	SEKRETARIAT DAERAH
					115,84 %, 115,88 %, 99,16% , 81,02% ,	116,64 %, 113,76 %, 101,52 %, 82,02% ,	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					92,36%	96,48%	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
2.	Meningkatnya derajat kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	74,76	76,14	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2. Angka kematian bayi	4,08	5,22	Program Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	3. Angka kematian Balita	<2	2	Program Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4. Angka kematian ibu	≤69.31	≤69.31	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	5. Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+	82,95%	87%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	6. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	55%	50%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	7. Prevalensi HIV	< 0.50	0,5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	DINAS KESEHATAN
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	8. Persentase Balita dengan gizi buruk	0,53%	0,50%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	9. Persentase Balita gizi kurang	9%	9%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat	10. Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	49%	75%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINAS KESEHATAN
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat	11. Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin	100%	100%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINAS KESEHATAN
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
							Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	DINAS KESEHATAN
							Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	DINAS KESEHATAN
							Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	DINAS KESEHATAN
							Program peningkatan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN
							Program peningkatan pelayanan kesehatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
							Program peningkatan pelayanan kesehatan	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
							Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
3.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat	1. Laju pertumbuhan penduduk	1,69%	1,32%	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat	2. Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	79,10%	79,14%	Program Keluarga Berencana	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat	3. Pasangan Usia Subur sasaran KB yang tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	9%	7%	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat	4. KB Pria	5,36%	7,6%	Program pelayanan kontrasepsi	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat	5. KB Mandiri	58,21%	72%	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat	1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PMKS.	1. Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS	71	75	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah kesejahteraan Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
		1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat	1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PMKS.	2. Sumber potensi kesejahteraan sosial (Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat)	86 KTD 450 Orang	86 KTD 470 Orang	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan keakurasian data dan informasi kependudukan	1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PMKS.	3. Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	45	65	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan keakurasian data dan informasi kependudukan	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat	4. Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial	70%	74%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	SEKRETARIAT DAERAH
							Program pembinaan anak terlantar	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
							Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	SEKRETARIAT DAERAH
5.	Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga	1. Meningkatkan kualitas pelayanan keakurasian data dan informasi kependudukan	1. Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga	1. Persentase Ormas kepemudaan yang aktif	77	76	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga	1. Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga	2. Prestasi olah raga tingkat provinsi	2	2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	SEKRETARIAT DAERAH
6.	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga	1. Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga	1. Prestasi olah raga tingkat provinsi	2	2	Program Pengembangan Nilai Budaya	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
		1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.	1. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.	2. Pelestarian nilai-nilai tradisi	30%	57,50%	Program Pengembangan Nilai Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.	1. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.	3. Pelestarian warisan dan cagar budaya	15%, 15%	12%, 12.7%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.	1. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.	4. Kelompok kesenian perempuan	4	4	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
MISI 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan								
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi			1. Pertumbuhan ekonomi sektor :	5,19%	5,93%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
		1. Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	a. Primer	3,32%	2,26%	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
		1. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing	1. Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar.	b. Sekunder	4,75%	5,27%	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
			2. Pengembangan dan pemasaran produk pariwisata.				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	KECAMATAN TURI
		1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan	1. Meningkatkan keamanan dan kelancaran distribusi perdagangan.	c. Tersier	6,16%	7,09%	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
			2. Pengembangan dan pemasaran produk pariwisata.				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
		2. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing	1. Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar.				Program peningkatan produksi hasil peternakan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program pengembangan budidaya perikanan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program rehabilitasi hutan dan lahan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program perencanaan dan pengembangan hutan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
							Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PASAR
							Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	KECAMATAN NGAGLIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DINAS PASAR
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	DINAS PASAR
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN MOYUDAN
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN SEYEGAN
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN GODEAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN GAMPING
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN MLATI
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN DEPOK
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN BERBAH
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN KALASAN
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN NGAGLIK
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN SLEMAN
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN TEMPEL
							Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	KECAMATAN PAKEM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	DINAS PASAR
							Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Pengembangan Kemitraan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program Pengembangan Kemitraan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	Meningkatnya penanaman modal	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	1. Meningkatkan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan.	Pertumbuhan nilai penanaman modal	4,18%	30,50%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
			2. Meningkatkan keamanan dan kelancaran distribusi perdagangan.				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
							Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	DINAS PASAR
							Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
							Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
3.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja.	1. Penduduk bekerja dari angkatan kerja			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja.	2. Tingkat pengangguran terbuka	7,19%	5,10%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
		1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja	3. Persentase KK miskin	19%	13,40%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja	4. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	10,80%	10,30%	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
		1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja	5. PDRB perkapita (ADHB, ribu rupiah)	13635	19688	Program Transmigrasi Regional	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
			2. Meningkatkan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan.				Program Penanggulangan Kemiskinan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.	1. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja.	6. Angka Gini Ratio	0,30	0.3-0.5	Program Penanggulangan Kemiskinan	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program Penanggulangan Kemiskinan	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Penanggulangan Kemiskinan	DINAS PASAR
							Program Penanggulangan Kemiskinan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Program Penanggulangan Kemiskinan	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program Penanggulangan Kemiskinan	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penanggulangan Kemiskinan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Penanggulangan Kemiskinan	SEKRETARIAT DAERAH
4.	Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	1. Ketersediaan energi perkapita		130	140	
		1. Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	2. Ketersediaan protein perkapita		131	141	
MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup								
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat	Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum	1. Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	32,5%	50%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
							Program Pembangunan turap/talud/brojong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
							Program Pembangunan turap/talud/brojong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
							Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
2.	Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat	Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum	1. Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis	73,5%	73%	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program penyediaan dan pengolahan air baku	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program penyediaan dan pengolahan air baku	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program penyediaan dan pengolahan air baku	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program penyediaan dan pengolahan air baku	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program penyediaan dan pengolahan air baku	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
							Program penyediaan dan pengolahan air baku	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
							Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
3.	Meningkatnya kualitas transportasi, komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat	Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum	1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten	74%	79%	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				2. SKPD melaksanakan E-Gov	23	48	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	DINAS PASAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
							Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Program peningkatan pelayanan angkutan	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman	1. Persentase kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman baik	40%	55%	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
		1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman	2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,01%	96,30%	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
							Program Pengembangan Perumahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pengembangan Perumahan	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program Pengembangan Perumahan	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Program Lingkungan Sehat Perumahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program pengelolaan areal pemakaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
5.	Meningkatnya prasarana dan sarana dalam ranga peningkatan kemampuan penanggulangan bencana	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan	1. Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik			Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
6.	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan	1. Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik	10,80%	35%	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	DINAS PASAR
							Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
							Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
7.	Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olah raga	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan	1. Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah	76,50%	82,40%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan	2. Kelayakan prasarana dan sarana sekolah	73,50%	81%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
		1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan	3. Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik	80	85		
8.	Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan	1. Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik	64%	77%	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan	1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan	1. Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik	50%	69%	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	DINAS KESEHATAN
							Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
							Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	DINAS KESEHATAN
							Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
							Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
							Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Menjaga kualitas sumber daya alam	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	1. Luas lahan kritis	610	450	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
		1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	2. Luas lahan rusak akibat penambangan	190	150	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
		1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	3. Luas hutan	5950	6150	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	4. Alih fungsi lahan pertanian	0,30	0,18	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	5. Tertib pemanfaatan tanah	82%	78,5%	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
		1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	6. Tertib administrasi pertanahan	58%	82%	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
		1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	7. RTH perkotaan	>30%	54%	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	8. Tersedianya Informasi RTRW serta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	42,80%	89,29%	Program Pengembangan Energi Terbarukan	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program Perencanaan Tata Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Perencanaan Tata Ruang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Program Perencanaan Tata Ruang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program Pemanfaatan Ruang	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
							Program Pemanfaatan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pemanfaatan Ruang	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
							Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
							Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
							Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
							Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	KECAMATAN PRAMBANAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
							Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
							Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
							Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
11.	Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	20%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DINAS PASAR
		1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai	2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	20%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		1. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan	3. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	60%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan	4. Usaha yang memiliki IPAL	83%	89%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
		1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan	5. Usaha yang memiliki dokumen lingkungan	98,90%	99,30%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN NGEMPLAK
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN SEYEGAN
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN GODEAN
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN GAMPING
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN DEPOK
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN BERBAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN KALASAN
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN NGAGLIK
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN SLEMAN
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN TEMPEL
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN TURI
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN PAKEM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN MINGGIR
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN MLATI
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	KECAMATAN MOYUDAN
							Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
							Program Peningkatan Pengendalian Polusi	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
							Program Peningkatan Pengendalian Polusi	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak	1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.	1. Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (100%)	85%	100%	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50%)	50%	75%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN TEMPEL
		1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.	3. Lembaga PUG yang aktif	50%	77%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN NGEMPLAK
		1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik	Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.	4. Pemenuhan hak-hak Anak	74%	78%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN DEPOK
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN MOYUDAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN SEYEGAN
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN GODEAN
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN GAMPING
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN MLATI
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN BERBAH
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN PRAMBANAN
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN KALASAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN NGAGLIK
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN SLEMAN
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN TURI
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN PAKEM
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN CANGKRINGAN
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	KECAMATAN MINGGIR
							Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.	1. Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki	96,90	97,83	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		1. Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.	2. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf	84,76	99,60		

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode 5 (lima) tahun, maka ditetapkan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya.

Rencana program prioritas ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Sumber pendanaan yang disajikan pada tabel 8.1 berikut ini adalah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman.

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Sleman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1					339.839.168.856,04		372.204.137.318,52		404.569.105.781,00		436.935.074.243,48		469.301.042.705,96			
1	1	Pendidikan			64.703.338.560,00		70.865.561.280,00		77.027.784.000,00		83.190.006.720,00		89.352.229.440,00			
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	5.718.405.840,00	25%	6.263.015.920,00	25%	6.807.626.000,00	25%	7.352.236.080,00	25%	7.896.846.160,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	1	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	25%	25%	1.275.025.920,00	25%	1.396.456.960,00	25%	1.517.888.000,00	25%	1.639.319.040,00	25%	1.760.750.080,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	1	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	151.200.000,00	10%	165.600.000,00	10%	180.000.000,00	10%	194.400.000,00	10%	208.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	1	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	529.200.000,00	25%	579.600.000,00	25%	630.000.000,00	25%	680.400.000,00	25%	730.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	1	15	Program Pendidikan Usia Dini	Angka Partisipasi PAUD	72,00%	72%	1.925.938.560,00	73%	2.109.361.280,00	73%	2.292.784.000,00	74,94%	2.476.206.720,00	74,95%	2.659.629.440,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN CANGKRING AN	
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD; Angka Partisipasi Kasar SMP; Prosentase Kelulusan SD/MI; Prosentase Kelulusan SMP/MTs	116,45%; 113,68%; 99,90%; 99,10%	115,84%; 115,88%; 99,90%; 92,17%	22.323.786.240,00	115,86%; 115,89%; 99,59%; 99,93%	24.449.861.120,00	115,88%; 115,90%; 99,26%; 98,37%	26.575.936.000,00	114,79%; 108,95%; 98,94%; 93,74%	28.702.010.880,00	114,81%; 108,97%; 99,00%; 93,80%	30.828.085.760,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	1	17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK; Prosentase Kelulusan SMA/SMK	77,66%; 99,34%	75,76%; 99,34%	13.470.702.000,00	75,78%; 95,94%	14.753.626.000,00	75,80%; 95,46%	16.036.550.000,00	79,02%; 95,50%	17.319.474.000,00	79,04%; 95,55%	18.602.398.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	1	18	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	93,94%	92,36%	739.200.000,00	92,46%	809.600.000,00	92,56%	880.000.000,00	98,40%	950.400.000,00	98,50%	1.020.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pendidik bersertifikat; Kualifikasi pendidik	91,00%; 70,26%	91,4%; 70,66%	15.781.920.000,00	91,4%; 74,00%	17.284.960.000,00	91,4%; 77,33%	18.788.000.000,00	91,4%; 84,82%	20.291.040.000,00	91,4%; 85,75%	21.794.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA; BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sekolah yang sudah menerapkan manajemen mutu berbasis sekolah	79%	80%	1.263.360.000,00	82%	1.383.680.000,00	84%	1.504.000.000,00	86%	1.624.320.000,00	88%	1.744.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	1	23	Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru	Partisipasi guru dan siswa dalam pengembangan kreativitas	90%	90%	1.524.600.000,00	100%	1.669.800.000,00	100%	1.815.000.000,00	100%	1.960.200.000,00	100%	2.105.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	2		Kesehatan			41.993.252.463,12		45.992.609.840,56		49.991.967.218,00		53.991.324.595,44		57.990.681.972,88		
1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	1.430.349.144,00	25%	1.566.572.872,00	25%	1.702.796.600,00	25%	1.839.020.328,00	25%	1.975.244.056,00	DINAS KESEHATAN; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
1	2	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	25%	25%	753.644.220,00	25%	825.419.860,00	25%	897.195.500,00	25%	968.971.140,00	25%	1.040.746.780,00	DINAS KESEHATAN; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
1	2	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	25%	25%	1.326.484.572,00	25%	1.452.816.436,00	80%	1.579.148.300,00	10%	1.705.480.164,00	10%	1.831.812.028,00	DINAS KESEHATAN
1	2	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	278.564.160,00	25%	305.094.080,00	25%	331.624.000,00	25%	358.153.920,00	25%	384.683.840,00	DINAS KESEHATAN; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
1	2	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan baik	90%	91%	2.402.895.600,00	92%	2.631.742.800,00	93%	2.860.590.000,00	94%	3.089.437.200,00	95%	3.318.284.400,00	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)
						Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	kualitas kesehatan masyarakat baik 85%, Imunisasi hepatitis B 97%	85%	86%	15.923.737.404,12	87%	17.440.283.823,56	88%	18.956.830.243,00	89%	20.473.376.662,44	90%	21.989.923.081,88	DINAS KESEHATAN
1	2	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan dan Pengendalian Obat dan Makanan	90%	91%	239.165.799,60	92%	261.943.494,80	93%	284.721.190,00	94%	307.498.885,20	95%	330.276.580,40	DINAS KESEHATAN; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat	90%	90,5%	503.811.000,00	91%	551.793.000,00	91,5%	599.775.000,00	92%	647.757.000,00	92,5%	695.739.000,00	DINAS KESEHATAN
1	2	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Status gizi masyarakat baik	90%	91%	120.120.000,00	92%	131.560.000,00	93%	143.000.000,00	94%	154.440.000,00	95%	165.880.000,00	DINAS KESEHATAN
1	2	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kualitas Kesehatan Lingkungan baik	85%	85%	105.000.000,00	85%	115.000.000,00	85%	125.000.000,00	85%	135.000.000,00	85%	145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	2	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan : DBD : Malaria : Kesembuhan TB dan Penemuan penderita	55%	55%	907.200.000,00	53%	993.600.000,00	52%	1.080.000.000,00	51%	1.166.400.000,00	50%	1.252.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kualitas pelayanan kesehatan baik	90%	91%	386.836.170,00	92%	423.677.710,00	93%	460.519.250,00	94%	497.360.790,00	95%	534.202.330,00	DINAS KESEHATAN; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)
						Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kualitas kesehatan penduduk miskin baik	90%	91%	468.186.600,00	92%	512.775.800,00	93%	557.365.000,00	94%	601.954.200,00	95%	646.543.400,00	DINAS KESEHATAN
1	2	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Sarana prasarana pelayanan kesehatan baik	64%	65%	174.599.880,00	67,5%	191.228.440,00	71%	207.857.000,00	75,5%	224.485.560,00	81,5%	241.114.120,00	DINAS KESEHATAN
1	2	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana prasarana pelayanan kesehatan baik	63%	64%	7.862.400.000,00	66%	8.611.200.000,00	68%	9.360.000.000,00	70%	10.108.800.000,00	75 %	10.857.600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
1	2	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan balita gizi buruk	90%	91%	63.000.000,00	95%	69.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	81.000.000,00	100%	87.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	2	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Pelayanan kesehatan lansia	90%	91%	21.000.000,00	92%	23.000.000,00	93%	25.000.000,00	94%	27.000.000,00	95%	29.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	2	33	Program peningkatan pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat	80%	80%	9.026.257.913,40	80%	9.885.901.524,20	80%	10.745.545.135,00	80%	11.605.188.745,80	80%	12.464.832.356,60	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	3					58.399.265.316,00		63.961.100.108,00		69.522.934.900,00		75.084.769.692,00		80.646.604.484,00		
1	3	1	Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	680.620.500,00	25%	745.441.500,00	25%	810.262.500,00	25%	875.083.500,00	25%	939.904.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
1	3	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarpras Aparatur	25%	25%	1.465.007.040,00	25%	1.604.531.520,00	25%	1.744.056.000,00	25%	1.883.580.480,00	25%	2.023.104.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
1	3	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	105.840.000,00	10%	115.920.000,00	10%	126.000.000,00	10%	136.080.000,00	10%	146.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
1	3	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	437.749.200,00	25%	479.439.600,00	25%	521.130.000,00	25%	562.820.400,00	25%	604.510.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kondisi jalan dan jembatan baik	33,0%	32,5%	9.219.420.000,00	33,0%	10.097.460.000,00	33,5%	10.975.500.000,00	67,91%	11.853.540.000,00	70,05%	12.731.580.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	3	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Kondisi Drainase Baik	36,5%	37%	4.063.175.760,00	38%	4.450.144.880,00	39%	4.837.114.000,00	40%	5.224.083.120,00	41%	5.611.052.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	3	17	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Kondisi badan jalan baik	33,0%	33,0%	883.394.400,00	34%	967.527.200,00	35%	1.051.660.000,00	36%	1.135.792.800,00	37%	1.219.925.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	3	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan dan Jembatan kondisi baik	33%	32,5%	10.661.186.760,00	33%	11.676.537.880,00	33,5 %	12.691.889.000,00	67,91%	13.707.240.120,00	70,05%	14.722.591.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)
						Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	3	22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia	75%	76%	63.000.000,00	77%	69.000.000,00	78%	75.000.000,00	79%	81.000.000,00	80%	87.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	3	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik	75%	76%	389.841.480,00	77%	426.969.240,00	78%	464.097.000,00	79%	501.224.760,00	80%	538.352.520,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	3	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kondisi irigasi baik	73%	73,5%	3.270.318.576,00	75%	3.581.777.488,00	76,5%	3.893.236.400,00	78%	4.204.695.312,00	79,5%	4.516.154.224,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL; BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH
1	3	25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Kondisi sarana dan prasarana jaringan air baku baik	60%	61%	441.000.000,00	62%	483.000.000,00	63%	525.000.000,00	64%	567.000.000,00	65%	609.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL; BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH
1	3	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Embung, sungai, danau dan sumber daya air lainnya terkelola dengan baik	75%	76%	1.922.760.000,00	77%	2.105.880.000,00	78%	2.289.000.000,00	79%	2.472.120.000,00	80%	2.655.240.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL; BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	3	27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola limbah sesuai standar	80%	80%	2.948.064.000,00	85%	3.228.832.000,00	90%	3.509.600.000,00	95%	3.790.368.000,00	100%	4.071.136.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN; DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	3	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Infrastruktur perdesaaan kondisi baik	55%	55%	19.538.895.600,00	56%	21.399.742.800,00	57%	23.260.590.000,00	58%	25.121.437.200,00	59%	26.982.284.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	3	31	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Kondisi gedung dinas/kantor baik	50%	50%	2.308.992.000,00	52%	2.528.896.000,00	54%	2.748.800.000,00	59,8%	2.968.704.000,00	65,2%	3.188.608.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA; DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	4		Perumahan			4.857.446.160,00		5.320.060.080,00		5.782.674.000,00		6.245.287.920,00		6.707.901.840,00		
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya ketersediaan perumahan	44%	45%	3.697.260.000,00	46%	4.049.380.000,00	47%	4.401.500.000,00	48%	4.753.620.000,00	49%	5.105.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; KECAMATAN CANGKRING AN
1	4	18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana	70%	70%	240.660.000,00	72%	263.580.000,00	74%	286.500.000,00	76%	309.420.000,00	78%	332.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	4	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Menurunnya kejadian kebakaran	10%	20%	466.766.160,00	30%	511.220.080,00	40%	555.674.000,00	50%	600.127.920,00	50%	644.581.840,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	4	20	Program pengelolaan areal pemukiman	TPU terkelola baik	70%	72%	452.760.000,00	74%	495.880.000,00	76%	539.000.000,00	78%	582.120.000,00	80%	625.240.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	5		Penataan Ruang			1.806.840.000,00		1.978.920.000,00		2.151.000.000,00		2.323.080.000,00		2.495.160.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	5	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan wilayah yang punya rencana rinci	79,60%	82%	686.280.000,00	84%	751.640.000,00	88%	817.000.000,00	94%	882.360.000,00	100%	947.720.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH
1	5	16	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase tertib pemanfaatan tanah	80%	82%	144.900.000,00	84%	158.700.000,00	86%	172.500.000,00	78%	186.300.000,00	78,5%	200.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH
1	5	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang	70%	70%	975.660.000,00	70%	1.068.580.000,00	70%	1.161.500.000,00	70%	1.254.420.000,00	70%	1.347.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH
1	6		Perencanaan Pembangunan			3.891.667.920,00		4.262.302.960,00		4.632.938.000,00		5.003.573.040,00		5.374.208.080,00		
1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	426.300.000,00	25%	466.900.000,00	25%	507.500.000,00	25%	548.100.000,00	25%	588.700.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH
1	6	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarpras aparatur	25%	25%	260.400.000,00	25%	285.200.000,00	25%	310.000.000,00	25%	334.800.000,00	25%	359.600.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH
1	6	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	50.400.000,00	10%	55.200.000,00	10%	60.000.000,00	10%	64.800.000,00	10%	69.600.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH
1	6	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	198.408.000,00	25%	217.304.000,00	25%	236.200.000,00	25%	255.096.000,00	25%	273.992.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH
1	6	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang aktif	50%	50%	42.000.000,00	60%	46.000.000,00	70%	50.000.000,00	95%	54.000.000,00	95%	58.000.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH
1	6	18	Program Perencanaan Pengembangan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan wilayah	30%	31%	229.698.000,00	32%	251.574.000,00	33%	273.450.000,00	34%	295.326.000,00	35%	317.202.000,00	BADAN PERENCANA AN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
		Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Wilayah strategis cepat tumbuh strategis cepat tumbuh												PEMBANGUNAN DAERAH; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN	
1	6	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kemampuan perencanaan	10%	10%	105.000.000,00	10%	115.000.000,00	10%	125.000.000,00	10%	135.000.000,00	10%	145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	6	21	Program perencanaan pembangunan daerah	perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat	85%	86%	1.886.881.920,00	87%	2.066.584.960,00	88%	2.246.288.000,00	89%	2.425.991.040,00	90%	2.605.694.080,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; INSPEKTORAT KABUPATEN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING AN	
1	6	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya capaian indikator makro ekonomi	5%	5%	511.980.000,00	5%	560.740.000,00	5%	609.500.000,00	5%	658.260.000,00	5%	707.020.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH
1	6	23	Program perencanaan sosial budaya	meningkatnya capaian indikator sosial budaya	5%	5%	84.000.000,00	5%	92.000.000,00	5%	100.000.000,00	5%	108.000.000,00	5%	116.000.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH
1	6	25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	tersedianya kebijakan perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	2 bidang	3 bidang	96.600.000,00	4 bidang	105.800.000,00	5 bidang	115.000.000,00	6 bidang	124.200.000,00	7 bidang	133.400.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH; KECAMATAN CANGKRING AN
1	7		Perhubungan				12.824.234.640,00		14.045.590.320,00		15.266.946.000,00		16.488.301.680,00		17.709.657.360,00	
1	7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	6.413.013.600,00	25%	7.023.776.800,00	25%	7.634.540.000,00	25%	8.245.303.200,00	25%	8.856.066.400,00	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	7	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	25%	25%	336.000.000,00	25%	368.000.000,00	25%	400.000.000,00	25%	432.000.000,00	25%	464.000.000,00	DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	7	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	50.400.000,00	10%	55.200.000,00	10%	60.000.000,00	10 %	64.800.000,00	10 %	69.600.000,00	DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	7	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	151.200.000,00	25%	165.600.000,00	25%	180.000.000,00	25%	194.400.000,00	25%	208.800.000,00	DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	7	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kondisi prasarana & fasilitas perhubungan baik	73,5%	74%	463.680.000,00	75%	507.840.000,00	76%	552.000.000,00	78%	596.160.000,00	79%	640.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	7	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Fasilitas lalu lintas terjaga baik	72%	73%	2.340.240.000,00	74%	2.563.120.000,00	75%	2.786.000.000,00	76%	3.008.880.000,00	77%	3.231.760.000,00	DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	7	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Pelayanan angkutan berjalan baik	80%	81%	399.000.000,00	82%	437.000.000,00	83%	475.000.000,00	84%	513.000.000,00	85%	551.000.000,00	DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	7	19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kondisi fasilitas pengamanan lalu lintas baik	72%	73%	2.019.701.040,00	74%	2.212.053.520,00	75%	2.404.406.000,00	76%	2.596.758.480,00	77%	2.789.110.960,00	DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	7	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kendaraan umum diujikan	87%	88%	651.000.000,00	89%	713.000.000,00	90%	775.000.000,00	91%	837.000.000,00	92%	899.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	8		Lingkungan Hidup			8.679.826.932,00		9.506.477.116,00		10.333.127.300,00		11.159.777.484,00		11.986.427.668,00		
1	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	134.122.800,00	25%	146.896.400,00	25%	159.670.000,00	25%	172.443.600,00	25%	185.217.200,00	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1	8	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	25%	25%	60.513.600,00	25%	66.276.800,00	25%	72.040.000,00	25%	77.803.200,00	25%	83.566.400,00	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1	8	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pelayanan masyarakat	10%	10%	12.600.000,00	10%	13.800.000,00	10%	15.000.000,00	10%	16.200.000,00	10%	17.400.000,00	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1	8	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	67.200.000,00	25%	73.600.000,00	25%	80.000.000,00	25%	86.400.000,00	25%	92.800.000,00	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1	8	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sampah terlayani	58%	59%	3.740.520.000,00	60%	4.096.760.000,00	61%	4.453.000.000,00	62%	4.809.240.000,00	63%	5.165.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP; DINAS PASAR
1	8	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	Pencemaran lingkungan hidup lebih kecil dari ambang	<ambang batas	<ambang batas	1.431.455.340,00	<ambang batas	1.567.784.420,00	<ambang batas	1.704.113.500,00	<ambang batas	1.840.442.580,00	<ambang batas	1.976.771.660,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)	
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Lingkungan Hidup	batas yang ada													MINERAL; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	8	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	3%	3%	1.246.669.032,00	3%	1.365.399.416,00	3%	1.484.129.800,00	3%	1.602.860.184,00	3%	1.721.590.568,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1	8	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan Informasi SDA dan LH	80%	81%	164.176.320,00	82%	179.812.160,00	83%	195.448.000,00	84%	211.083.840,00	85%	226.719.680,00	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1	8	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat polusi dengan ambang batas	< ambang batas	< ambang batas	6.720.000,00	< ambang batas	7.360.000,00	< ambang batas	8.000.000,00	< ambang batas	8.640.000,00	< ambang batas	9.280.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
1	8	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase tersedianya informasi SDA dan LH.	80 %	81%	34.713.840,00	82%	38.019.920,00	83%	41.326.000,00	84%	44.632.080,00	85%	47.938.160,00	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1	8	24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luar ruang terbuka hijau	> 30%	> 30%	1.781.136.000,00	> 30%	1.950.768.000,00	> 30%	2.120.400.000,00	> 30%	2.290.032.000,00	> 30%	2.459.664.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	9		Pertanahan			2.889.185.040,00		3.164.345.520,00		3.439.506.000,00		3.714.666.480,00		3.989.826.960,00		
1	9	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	253.529.640,00	25%	277.675.320,00	25%	301.821.000,00	25%	325.966.680,00	25%	350.112.360,00	DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH
1	9	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Aparatur	25%	25%	218.982.120,00	25%	239.837.560,00	25%	260.693.000,00	25%	281.548.440,00	25%	302.403.880,00	DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH
1	9	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pelayanan masyarakat	10%	10%	97.776.000,00	10%	107.088.000,00	10%	116.400.000,00	10%	125.712.000,00	10%	135.024.000,00	DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	9	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	218.267.280,00	25%	239.054.640,00	25%	259.842.000,00	25%	280.629.360,00	25%	301.416.720,00	DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH
1	9	16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	55%	58%	1.614.270.000,00	59%	1.768.010.000,00	60%	1.921.750.000,00	90%	2.075.490.000,00	91%	2.229.230.000,00	DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; KECAMATAN PRAMBANAN
1	9	17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyelesaian Masalah Pertanahan	80%	80%	158.760.000,00	80%	173.880.000,00	80%	189.000.000,00	80%	204.120.000,00	80%	219.240.000,00	DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH; KECAMATAN PRAMBANAN
1	9	18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Informasi Pertanahan Tersedia	75%	76%	327.600.000,00	77%	358.800.000,00	78%	390.000.000,00	79%	421.200.000,00	75%	452.400.000,00	DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil			7.007.437.080,00		7.674.812.040,00		8.342.187.000,00		9.009.561.960,00		9.676.936.920,00		
1	10	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	4.042.879.680,00	25%	4.427.915.840,00	25%	4.812.952.000,00	25%	5.197.988.160,00	25%	5.583.024.320,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1	10	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	25%	25%	147.764.400,00	25%	161.837.200,00	25%	175.910.000,00	25%	189.982.800,00	25%	204.055.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1	10	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai masyarakat	10%	10%	21.649.320,00	10%	23.711.160,00	10%	25.773.000,00	10%	27.834.840,00	10%	29.896.680,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	10	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	87.494.400,00	25%	95.827.200,00	25%	104.160.000,00	25%	112.492.800,00	25%	120.825.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	10%	10%	2.707.649.280,00	10%	2.965.520.640,00	10%	3.223.392.000,00	10%	3.481.263.360,00	10%	3.739.134.720,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN
1	11		Pemberdayaan Perempuan				1.442.243.040,00		1.579.599.520,00		1.716.956.000,00		1.854.312.480,00		1.991.668.960,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	11	15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Sosialisasi peraturan perundangan KDRT dan perlindungan anak ditingkat desa	6 desa	16 desa	117.600.000,00	16 desa	128.800.000,00	16 desa	140.000.000,00	16 desa	151.200.000,00	16 desa	162.400.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	terfasilitasinya korban kekerasan bagi anak dan perempuan	90%	91%	1.025.603.040,00	92%	1.123.279.520,00	93%	1.220.956.000,00	94%	1.318.632.480,00	95%	1.416.308.960,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															CANGKRING AN	
1	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan	80%	85%	184.800.000,00	85%	202.400.000,00	100%	220.000.000,00	100%	237.600.000,00	100%	255.200.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang aktif	45%	50%	114.240.000,00	55%	125.120.000,00	60%	136.000.000,00	76%	146.880.000,00	77%	157.760.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				1.718.157.280,00		1.881.124.640,00		2.044.092.000,00		2.208.059.360,00		2.372.026.720,00	
1	12	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	202.272.000,00	25%	221.536.000,00	25%	240.800.000,00	25%	260.064.000,00	25%	279.328.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	25%	25%	288.224.160,00	25%	315.674.080,00	25%	343.124.000,00	25%	370.573.920,00	25%	398.023.840,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10 %	10 %	16.800.000,00	10 %	18.400.000,00	10%	20.000.000,00	10 %	21.600.000,00	10 %	23.200.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)
						Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	12	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	134.400.000,00	25%	147.200.000,00	25%	160.000.000,00	25 %	172.800.000,00	25%	185.600.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS)	79%	79,10%	409.893.120,00	79,11%	448.930.560,00	79,12%	487.968.000,00	79,13%	527.005.440,00	79,14%	566.042.880,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya tingkat perkawinan usia dini	25%	25%	26.880.000,00	25%	29.440.000,00	25%	32.000.000,00	25%	34.560.000,00	25%	37.120.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12	17	Program pelayanan kontrasepsi	Ketersediaan sarana KB	100%	100%	67.200.000,00	100%	73.600.000,00	100%	80.000.000,00	100%	86.400.000,00	100%	92.800.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase kepesertaan KB	60%	62%	403.620.000,00	64%	442.060.000,00	66%	480.500.000,00	68%	518.940.000,00	70%	557.380.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12	19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Meningkatnya jumlah Bina Keluarga Balita	2%	2%	21.000.000,00	2%	23.000.000,00	2%	25.000.000,00	2%	27.000.000,00	2%	29.000.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	12	20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan layanan informasi dan konseling KRR	80%	81%	21.168.000,00	82%	23.184.000,00	83%	25.200.000,00	84%	27.216.000,00	85%	29.232.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12	21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Penurunan pengguna narkoba, PMS (HIV/AIDS)	10%	10%	28.000.000,00	10%	30.000.000,00	10%	32.000.000,00	10%	35.000.000,00	10%	38.000.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase ketersediaan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	60%	62%	42.000.000,00	64%	46.000.000,00	66%	50.000.000,00	68%	54.000.000,00	70%	58.000.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	12	24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase KB Mandiri	55%	58,21%	56.700.000,00	60%	62.100.000,00	61,81%	67.500.000,00	71%	72.900.000,00	72%	78.300.000,00	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	13		Sosial			3.088.277.514,00		3.382.399.182,00		3.676.520.850,00		3.970.642.518,00		4.264.764.186,00		
1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	60%	60%	161.521.920,00	65%	176.904.960,00	70%	192.288.000,00	75%	207.671.040,00	80%	223.054.080,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE	40%	42%	319.442.382,00	44%	349.865.466,00	46%	380.288.550,00	48%	410.711.634,00	50%	441.134.718,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	13	17	Program pembinaan anak terlantar	Meningkatnya cakupan pembinaan anak terlantar	3%	3%	12.600.000,00	3%	13.800.000,00	3%	15.000.000,00	3%	16.200.000,00	3%	17.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	13	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Angka penyandang cacat terahabilitasi dan organisasi penca terbantu	12%	12%	41.244.000,00	12%	45.172.000,00	12%	49.100.000,00	12%	53.028.000,00	12%	56.956.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	13	19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan saran dan prasarana pelayanan kesejahteraan	51%	55%	109.200.000,00	56%	119.600.000,00	57%	130.000.000,00	58%	140.400.000,00	59%	150.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase WKBSM yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial	35%	40%	136.565.940,00	45%	149.572.220,00	50%	162.578.500,00	55%	175.584.780,00	60%	188.591.060,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	13	22	Program Penanggulanga Kemiskinan	Persentase KK miskin	21%	19%	2.307.703.272,00	18%	2.527.484.536,00	17%	2.747.265.800,00	13,5%	2.967.047.064,00	13,4%	3.186.828.328,00	DINAS PEKERJAAN UMUM AN PERUMAHAN; BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															AN DAERAH; DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL; BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; DINAS PASAR; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	
1	14				2.194.736.586,00		2.403.759.118,00		2.612.781.650,00		2.821.804.182,00		3.030.826.714,00			
1	14	1	Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	340.067.700,00	25%	372.455.100,00	25%	404.842.500,00	25%	437.229.900,00	25%	469.617.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	14	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarpras aparatur	25%	25%	268.598.820,00	25%	294.179.660,00	25%	319.760.500,00	25%	345.341.340,00	25%	370.922.180,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	14	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	98.738.640,00	10%	108.142.320,00	10%	117.546.000,00	10%	126.949.680,00	10%	136.353.360,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	14	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	65.914.800,00	25%	72.192.400,00	25%	78.470.000,00	25%	84.747.600,00	25%	91.025.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	45%	50%	861.498.204,00	55%	943.545.652,00	60%	1.025.593.100,00	65%	1.107.640.548,00	75%	1.189.687.996,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	60%	62%	261.263.100,00	64%	286.145.300,00	66%	311.027.500,00	68%	335.909.700,00	70%	360.791.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	14	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penurunan kecelakaan kerja	10%	10%	298.655.322,00	10%	327.098.686,00	10%	355.542.050,00	10%	383.985.414,00	10%	412.428.778,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			2.020.240.320,00		2.212.644.160,00		2.405.048.000,00		2.597.451.840,00		2.789.855.680,00		
1	15	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	533.181.600,00	25%	583.960.800,00	25%	634.740.000,00	25%	685.519.200,00	25%	736.298.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1	15	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	25%	25%	214.079.880,00	25%	234.468.440,00	25%	254.857.000,00	25%	275.245.560,00	25%	295.634.120,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1	15	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	42.798.000,00	10%	46.874.000,00	10%	50.950.000,00	10%	55.026.000,00	10%	59.102.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	15	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	145.908.000,00	25%	159.804.000,00	25%	173.700.000,00	25%	187.596.000,00	25%	201.492.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1	15	15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah	2%	2%	63.073.920,00	2%	69.080.960,00	2%	75.088.000,00	2%	81.095.040,00	2%	87.102.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi Aktif	12%, 438 Koperasi	12%, 438 Koperasi	354.114.600,00	12%, 438 Koperasi	387.839.800,00	12%, 438 Koperasi	421.565.000,00	12%, 438 koperasi	455.290.200,00	12%, 438 Koperasi	489.015.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya kuantitas pemasaran produk UKM	5%	5%	234.429.720,00	5%	256.756.360,00	5%	279.083.000,00	5%	301.409.640,00	5%	323.736.280,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya kuantitas pemasaran produk UKM	80%	80%	27.300.000,00	80%	29.900.000,00	80%	32.500.000,00	5%	35.100.000,00	5%	37.700.000,00	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	550	541	405.354.600,00	554	443.959.800,00	601	482.565.000,00	571	521.170.200,00	580	559.775.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1	16		Penanaman Modal Daerah			714.496.860,00		782.544.180,00		850.591.500,00		918.638.820,00		986.686.140,00		
1	16	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	100.374.960,00	25%	109.934.480,00	25%	119.494.000,00	25%	129.053.520,00	25%	138.613.040,00	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
1	16	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarpras aparatur	25%	25%	26.310.900,00	25%	28.816.700,00	25%	31.322.500,00	25%	33.828.300,00	25%	36.334.100,00	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
1	16	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	18.060.000,00	10%	19.780.000,00	10%	21.500.000,00	10%	23.220.000,00	10%	24.940.000,00	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
1	16	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	45.654.000,00	25%	50.002.000,00	25%	54.350.000,00	25%	58.698.000,00	25%	63.046.000,00	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
1	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN - PMA - PMDN	1,6 % 1,25%	1,88 % 1,30%	259.893.900,00	1,90 % 1,32%	284.645.700,00	1,92 % 1,35%	309.397.500,00	1,95 % 1,36%	334.149.300,00	1,97 % 1,38%	358.901.100,00	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
1	16	17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Meningkatnya kontribusi dana penguatan permodalan	1,4%	1,5%	264.203.100,00	1,6%	289.365.300,00	1,7%	314.527.500,00	1,85%	339.689.700,00	2%	364.851.900,00	KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
1	17		Kebudayaan			3.072.801.480,00		3.365.449.240,00		3.658.097.000,00		3.950.744.760,00		4.243.392.520,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	17	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	440.223.840,00	25%	482.149.920,00	25%	524.076.000,00	25%	566.002.080,00	25%	607.928.160,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1	17	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	25%	25%	186.930.240,00	25%	204.733.120,00	25%	222.536.000,00	25%	240.338.880,00	25%	258.141.760,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1	17	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	21.000.000,00	10%	23.000.000,00	10%	25.000.000,00	10%	27.000.000,00	25%	29.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1	17	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	96.587.400,00	25%	105.786.200,00	25%	114.985.000,00	25%	124.183.800,00	25%	133.382.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kekayaan budaya yang terkelola dengan baik	85%	86%	173.040.000,00	87%	189.520.000,00	88%	206.000.000,00	89%	222.480.000,00	90%	238.960.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1	17	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Lembaga dan peninggalan budaya terkelola dengan baik	80%	82%	575.820.000,00	84%	630.660.000,00	86%	685.500.000,00	88%	740.340.000,00	90%	795.180.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kelompok seni budaya terkelola dengan baik	75%	77%	1.579.200.000,00	79%	1.729.600.000,00	81%	1.880.000.000,00	83%	2.030.400.000,00	85%	2.180.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1	18		Kepemudaan dan Olah Raga				1.557.110.100,00		1.705.406.300,00		1.853.702.500,00		2.001.998.700,00		2.150.294.900,00	
1	18	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Ketersediaan data potensi kepemudaan	60%	62%	189.000.000,00	64%	207.000.000,00	66%	225.000.000,00	68%	243.000.000,00	70%	261.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75%	77%	378.000.000,00	80%	414.000.000,00	83%	450.000.000,00	85,75%	486.000.000,00	86%	522.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan	3%	3%	63.000.000,00	3%	69.000.000,00	3%	75.000.000,00	3%	81.000.000,00	3%	87.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	18	18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Penyuluhan tentang bahaya narkoba pertahun	10 kelompok	10	213.110.100,00	10	233.406.300,00	10	253.702.500,00	10	273.998.700,00	10	294.294.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
1	18	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Pembinaan kelembagaan klub olah raga pelajar (KOP) per tahun	48 klub	48	63.000.000,00	48	69.000.000,00	48	75.000.000,00	48	81.000.000,00	48	87.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pembinaan kwlas olah raga	5 kelas	5	399.000.000,00	5	437.000.000,00	5	475.000.000,00	5	513.000.000,00	5	551.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan prasarana olah raga terpelihara	75%	76%	25200000000%	77%	27600000000%	78%	30000000000%	79%	32400000000%	80%	348.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				4.896.898.860,00		5.363.270.180,00		5.829.641.500,00		6.296.012.820,00		6.762.384.140,00	
1	19	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	981.364.062,00	25%	1.074.827.306,00	25%	1.168.290.550,00	25%	1.261.753.794,00	25%	1.355.217.038,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; KANTOR KESATUAN BANGSA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	19	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarpras aparatur	25%	25%	574.708.680,00	25%	629.442.840,00	25%	684.177.000,00	25%	738.911.160,00	25%	793.645.320,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; KANTOR KESATUAN BANGSA
1	19	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	89.502.546,00	10%	98.026.598,00	10%	106.550.650,00	10%	115.074.702,00	10%	123.598.754,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; KANTOR KESATUAN BANGSA
1	19	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	345.337.482,00	25%	378.226.766,00	25%	411.116.050,00	25%	444.005.334,00	25%	476.894.618,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; KANTOR KESATUAN BANGSA
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase menurunnya Jumlah konflik di masyarakat	3%	3,7%	266.057.400,00	4,45%	291.396.200,00	6,25%	316.735.000,00	7,14%	342.073.800,00	7,14%	367.412.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGENEMPLAK;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING AN	
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kamtibmas terpelihara	80 %	81%	656.994.156,00	82%	719.565.028,00	83%	782.135.900,00	84%	844.706.772,00	85%	907.277.644,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; DINAS PASAR; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya pembinaan wasbang ke masyarakat	2%	2%	413.767.200,00	2%	453.173.600,00	2%	492.580.000,00	2%	531.986.400,00	2%	571.392.800,00	AN; KANTOR KESATUAN BANGSA
1	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Fasilitasi pengembangan wasbang	12 bulan	12 bulan	135.120.174,00	12 bulan	147.988.762,00	12 bulan	160.857.350,00	12 bulan	173.725.938,00	12 bulan	186.594.526,00	KANTOR KESATUAN BANGSA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	19	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Fasilitasi kegiatan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan	12 bulan	12 bulan	218.400.000,00	12 bulan	239.200.000,00	12 bulan	260.000.000,00	12 bulan	280.800.000,00	12 bulan	301.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	19	21	Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam	65%	70%	276.916.080,00	70,5%	303.289.040,00	71%	329.662.000,00	78%	356.034.960,00	79%	382.407.920,00	KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; KANTOR KESATUAN BANGSA
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan korban bencana	30%	31%	938.731.080,00	32%	1.028.134.040,00	33%	1.117.537.000,00	34%	1.206.939.960,00	35%	1.296.342.920,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN	
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah.		103.011.093.580,92		112.821.673.921,96		122.632.254.263,00		132.442.834.604,04		142.253.414.945,08			
1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	52.133.497.731,00	25%	57.098.592.753,00	25%	62.063.687.775,00	25%	67.028.782.797,00	25%	71.993.877.819,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; INSPEKTORAT KABUPATEN; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA; DINAS PENDAPATAN DAERAH	
1	20	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarpras aparatur	25%	25%	2.829.624.000,00	25%	3.099.112.000,00	25%	3.368.600.000,00	25%	3.638.088.000,00	25%	3.907.576.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; INSPEKTORTA KABUPATEN; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA; DINAS PENDAPATAN DAERAH	
1	20	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	591.128.748,00	10%	647.426.724,00	10%	703.724.700,00	10%	760.022.676,00	10%	816.320.652,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; INSPEKTORTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	20	6	Program peningkatan	Meningkatnya tertib	25%	25%	1.292.980.500,00	25%	1.416.121.500,00	25%	1.539.262.500,00	25%	1.662.403.500,00	25%	1.785.544.500,00	KABUPATEN; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA; DINAS PENDAPATAN DAERAH
																SEKRETARIAT DEWAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)	
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	administrasi keuangan dan pelaporan													PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; INSPEKTORTA KABUPATEN; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	20	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD	75%	80%	8.905.075.294,92	80%	9.753.177.703,96	80%	10.601.280.113,00	70%	11.449.382.522,04	70%	12.297.484.931,08	REPUBLIK INDONESIA; DINAS PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;
1	20	17	Program peningkatan dan	Catatan hasil pemeriksaan	1	1	8.982.142.155,00	1	9.837.584.265,00	1	10.693.026.375,00	1	11.548.468.485,00	1	12.403.910.595,00	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
																DAN INFORMATIKA; DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah	Kategori baik	Kategori baik	1.696.544.514,00	Kategori baik	1.858.120.182,00	Kategori baik	2.019.695.850,00	Kategori baik	2.181.271.518,00	Kategori baik	2.342.847.186,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA; DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN MINERAL; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP; DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH; DINAS KEPEN DUDUKAN DAN CATATAN SIPIL; BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; KANTOR PENANAMAN PENGUATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)	
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
															DAN PENYERTAAN MODAL; DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA; BADAN PENANG GULANGAN BENCANA DAERAH; SATUAN POLISI PA MONG PRAJA; SEKRETRAIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; INSPEKTORAT KABUPATEN; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN; KANTOR ARSIP DAERAH, KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH; KANTOR KESATUAN BANGSA; DINAS PENDAPATAN DAERAH	
1	20	21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas minimal B	10 SKPD	15 SKPD	37.800.000,00	15 SKPD	41.400.000,00	20 SKPD	45.000.000,00	25 SKPD	48.600.000,00	30 SKPD	52.200.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
1	20	22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti	95%	95%	34.578.978,00	95%	37.872.214,00	95%	41.165.450,00	95%	44.458.686,00	95%	47.751.922,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
1	20	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya jumlah sistem informasi terintegrasi	3 SIM	4 SIM	2.140.178.040,00	5 SIM	2.344.004.520,00	6 SIM	2.547.831.000,00	7 SIM	2.751.657.480,00	8 SIM	2.955.483.960,00	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; DINAS PASAR
1	20	26	Program Penataan Peraturan	Meningkatnya produk hukum	10%	10%	523.788.048,00	10%	573.672.624,00	10%	623.557.200,00	10%	673.441.776,00	10%	723.326.352,00	DINAS KESEHATAN; DINAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
			Perundang-												PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP; SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM	
1	20	28	Program Pendidikan Kedinasan	Pelaksanaan diklat pegawai sesuai analisis kebutuhan	10 diklat	16 diklat	393.447.432,00	20 diklat	430.918.616,00	25 diklat	468.389.800,00	30 diklat	505.860.984,00	35 diklat	543.332.168,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1	20	29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	2.402.206.800,00	10%	2.630.988.400,00	10%	2.859.770.000,00	10%	3.088.551.600,00	10%	3.317.333.200,00	DINAS KESEHATAN; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; DINAS PENDAPATAN DAERAH	
1	20	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks kepuasan pegawai	80%	80%	2.469.500.880,00	80%	2.704.691.440,00	80%	2.939.882.000,00	80%	3.175.072.560,00	80%	3.410.263.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
1	20	31	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Kinerja OPD baik	80%	81%	105.000.000,00	82%	115.000.000,00	83%	125.000.000,00	84%	135.000.000,00	85%	145.000.000,00	DINAS KESEHATAN; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1	20	32	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Kebijakan yang diimplementasikan	80%	80%	41.718.600,00	80%	45.691.800,00	80%	49.665.000,00	80%	53.638.200,00	80%	57.611.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1	20	33	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75%	75%	2.228.128.140,00	77%	2.440.330.820,00	79%	2.652.533.500,00	79%	2.864.736.180,00	79%	3.076.938.860,00	DINAS KESEHATAN ; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; DINAS PENGELOLAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)	
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
															KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; SEKRETARIAT DEWAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA	
1	20	34	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Administrasi kecamatan dan pemerintah desa baik	70%	71%	512.007.300,00	72%	560.769.900,00	73%	609.532.500,00	74%	658.295.100,00	75%	707.057.700,00	KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN
1	20	35	Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek	meningkatnya jumlah invensi dan inovasi teknologi	5%	5%	266.700.000,00	5%	292.100.000,00	5%	317.500.000,00	5%	342.900.000,00	5%	368.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	20	36	Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	Penyelesaian kasus hukum	85%	85%	92.400.000,00	85%	101.200.000,00	85%	110.000.000,00	85%	118.800.000,00	85%	127.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
1	20	37	Program penegakan hukum	Menurunnya pelanggaran Perda	10%	10%	276.381.000,00	10%	302.703.000,00	10%	329.025.000,00	10%	355.347.000,00	10%	381.669.000,00	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN	
1	20	38	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	15,10%	14,77%	15.056.265.420,00	15,10%	16.490.195.460,00	17,20%	17.924.125.500,00	20,0%	19.358.055.540,00	21,0%	20.791.985.580,00	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; DINAS PENDAPATAN DAERAH
1	21		Ketahanan Pangan			2.156.219.856,00		2.361.574.128,00		2.566.928.400,00		2.772.282.672,00		2.977.636.944,00		
1	21	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	435.120.000,00	25%	476.560.000,00	25%	518.000.000,00	25%	559.440.000,00	25%	600.880.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1	21	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya layanan pemerintahan	25%	25%	546.000.000,00	25%	598.000.000,00	25%	650.000.000,00	25%	702.000.000,00	25%	754.000.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1	21	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pelayanan masyarakat	10%	10%	448.560.000,00	10%	491.280.000,00	10%	534.000.000,00	10%	576.720.000,00	10%	619.440.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1	21	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	142.800.000,00	25%	156.400.000,00	25%	170.000.000,00	25%	183.600.000,00	25%	197.200.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	21	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Meningkatnya Produksi pangan	1,50%	1,50%	583.739.856,00	1,50%	639.334.128,00	1,5%	694.928.400,00	1,5%	750.522.672,00	1,50%	806.116.944,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			2.488.008.600,00		2.724.961.800,00		2.961.915.000,00		3.198.868.200,00		3.435.821.400,00		
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Lembaga kemasyarakatan desa aktif	80%	80%	244.203.120,00	80%	267.460.560,00	80%	290.718.000,00	80%	313.975.440,00	80%	337.232.880,00	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN	
1	22	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Lembaga ekonomi desa yang aktif	70%	71%	324.492.000,00	72%	355.396.000,00	73%	386.300.000,00	74%	417.204.000,00	75%	448.108.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio swadaya masyarakat	1:4	1:7,5	1.785.506.520,00	1:7,6	1.955.554.760,00	1:7,6	2.125.603.000,00	1:4	2.295.651.240,00	1:5	2.465.699.480,00	BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
																NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN
1	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Tertib Administrasi desa meningkat	5%	5%	133.806.960,00	5%	146.550.480,00	5%	159.294.000,00	5%	172.037.520,00	5%	184.781.040,00	KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															KECAMATAN CANGKRINGAN	
1	23		Statistik			2.068.975.440,00		2.266.020.720,00		2.463.066.000,00		2.660.111.280,00		2.857.156.560,00		
1	23	15	Program pengembangan data/informasi/daerah	Ketersediaan data dan informasi pembangunan	75%	76%	2.068.975.440,00	77%	2.266.020.720,00	78%	2.463.066.000,00	79%	2.660.111.280,00	80%	2.857.156.560,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; DINAS PASAR; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH;

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	
1	24		Kearsipan			731.587.920,00		801.262.960,00		870.938.000,00		940.613.040,00		1.010.288.080,00		
1	24	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	108.360.000,00	25%	118.680.000,00	25%	129.000.000,00	25%	139.320.000,00	25%	149.640.000,00	KANTOR ARSIP DAERAH
1	24	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarpras aparatur	25%	25%	37.800.000,00	25%	41.400.000,00	25%	45.000.000,00	25%	48.600.000,00	25%	52.200.000,00	KANTOR ARSIP DAERAH
1	24	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	52.500.000,00	10%	57.500.000,00	10%	62.500.000,00	10%	67.500.000,00	10%	72.500.000,00	KANTOR ARSIP DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	24	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	51.660.000,00	25%	56.580.000,00	25%	61.500.000,00	25%	66.420.000,00	25%	71.340.000,00	KANTOR ARSIP DAERAH
1	24	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Arsip dinamis terkelola baik	60%	60%	124.740.000,00	60%	136.620.000,00	60%	148.500.000,00	60%	160.380.000,00	60%	172.260.000,00	KECAMATAN TURI; KANTOR ARSIP DAERAH
1	24	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Arsip statis terkelola baik	40%	40%	258.667.920,00	40%	283.302.960,00	40%	307.938.000,00	40%	332.573.040,00	40%	357.208.080,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; KANTOR ARSIP DAERAH
1	24	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Tingkat kerusakan arsip	5%	5%	14.700.000,00	5%	16.100.000,00	5%	17.500.000,00	5%	18.900.000,00	5%	20.300.000,00	KANTOR ARSIP DAERAH
1	24	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah SKPD yang bisa mencapai standar kearsipan	35%	30%	83.160.000,00	35%	91.080.000,00	40%	99.000.000,00	45%	106.920.000,00	50%	114.840.000,00	KANTOR ARSIP DAERAH
1	25		Komunikasi dan Informatika				891.209.340,00		976.086.420,00		1.060.963.500,00		1.145.840.580,00		1.230.717.660,00	
1	25	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah SKPD melaksanakan e-gov	20 SKPD	23 SKPD	891.209.340,00	24 SKPD	976.086.420,00	25 SKPD	1.060.963.500,00	48 SKPD	1.145.840.580,00	48 SKPD	1.230.717.660,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															DAN INFORMATIKA; BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL; SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	
1	26		Perpustakaan			734.617.968,00		804.581.584,00		874.545.200,00		944.508.816,00		1.014.472.432,00		
1	26	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	25%	25%	83.940.528,00	25%	91.934.864,00	25%	99.929.200,00	25%	107.923.536,00	25%	115.917.872,00	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	26	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	25%	25%	97.238.400,00	25%	106.499.200,00	25%	115.760.000,00	25%	125.020.800,00	25%	134.281.600,00	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
1	26	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan pegawai	10%	10%	39.180.288,00	10%	42.911.744,00	10%	46.643.200,00	10%	50.374.656,00	10%	54.106.112,00	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
1	26	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan	25%	25%	39.761.400,00	25%	43.548.200,00	25%	47.335.000,00	25%	51.121.800,00	25%	54.908.600,00	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
1	26	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan	15%	2%	474.497.352,00	4%	519.687.576,00	6%	564.877.800,00	8%	610.068.024,00	10%	655.258.248,00	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
2			URUSAN PILIHAN			17.606.498.406,00		19.283.307.778,00		20.960.117.150,00		22.636.926.522,00		24.313.735.894,00		
2	1		Pertanian			3.775.019.304,00		4.134.544.952,00		4.494.070.600,00		4.853.596.248,00		5.213.121.896,00		
2	1	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan (PSK) petani	15%	15%	218.975.988,00	15%	239.830.844,00	15%	260.685.700,00	15%	281.540.556,00	15%	302.395.412,00	KECAMATAN TURI; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	1	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian	5%	5%	341.155.920,00	5%	373.646.960,00	5%	406.138.000,00	5%	438.629.040,00	5%	471.120.080,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2	1	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Jumlah kelompok yang menerapkan SOP GAP	15%	15%	627.900.000,00	15%	687.700.000,00	15%	747.500.000,00	15%	807.300.000,00	15%	867.100.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	1	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian	1,5%	1,5%	1.640.097.396,00	1,5%	1.796.297.148,00	1,5%	1.952.496.900,00	1,5%	2.108.696.652,00	1,5%	2.264.896.404,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	1	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya Jumlah penyuluh naik jenjang	20%	20%	359.100.000,00	20%	393.300.000,00	20%	427.500.000,00	20%	461.700.000,00	20%	495.900.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	1	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah ternak yang sehat	95%	95%	177.450.000,00	95%	194.350.000,00	95%	211.250.000,00	95%	228.150.000,00	95%	245.050.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	1	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya hasil produksi peternakan	2%	2%	45.360.000,00	2%	49.680.000,00	2%	54.000.000,00	2%	58.320.000,00	2%	62.640.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	1	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	2,50%	2,50%	45.360.000,00	2,50%	49.680.000,00	2,50%	54.000.000,00	2,50%	58.320.000,00	2,50%	62.640.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	1	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Meningkatnya jumlah peternak yang menerapkan teknologi	30%	30%	319.620.000,00	30%	350.060.000,00	30%	380.500.000,00	30%	410.940.000,00	30%	441.380.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	2		Kehutanan			271.197.612,00		297.025.956,00		322.854.300,00		348.682.644,00		374.510.988,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2	2	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	luas hutan rakyat	4.500 ha	5.950 ha	51.409.932,00	6.000 ha	56.306.116,00	6.050 ha	61.202.300,00	6.175 ha	66.098.484,00	6.200 ha	70.994.668,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	2	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	luas lahan kritis	726 ha	610 ha	219.787.680,00	580 ha	240.719.840,00	550 ha	261.652.000,00	450 ha	282.584.160,00	420 ha	303.516.320,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	3		Energi dan Sumberdaya Mineral			1.132.810.140,00		1.240.696.820,00		1.348.583.500,00		1.456.470.180,00		1.564.356.860,00		
2	3	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Penambangan yang sesuai dengan kaidah teknis	70%	71%	357.726.180,00	72%	391.795.340,00	73%	425.864.500,00	74%	459.933.660,00	75%	494.002.820,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
2	3	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Meningkatnya jumlah kelompok penambangan rakyat yang berjin	10%	10%	168.000.000,00	10%	184.000.000,00	10%	200.000.000,00	10%	216.000.000,00	10%	232.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
2	3	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase Elektrifikasi	95%	94,50%	378.000.000,00	95%	414.000.000,00	95,5%	450.000.000,00	99,30%	486.000.000,00	99,40%	522.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
2	3	18	Program Pengembangan Energi Terbarukan	Jumlah energi terbarukan terbangun	305 buah	310 buah	229.083.960,00	320 buah	250.901.480,00	330 buah	272.719.000,00	373 buah	294.536.520,00	380 buah	316.354.040,00	DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
2	4		Pariwisata			2.554.582.800,00		2.797.876.400,00		3.041.170.000,00		3.284.463.600,00		3.527.757.200,00		
2	4	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	kunjungan: wisatawan nusantara; wisatawan mancanegara	3.226.979 orang	3.277.728 orang	534.794.400,00	3.418.254 orang	585.727.200,00	3.613.577 orang	636.660.000,00	3.772.369 orang	687.592.800,00	3.940.293 orang	738.525.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2	4	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Obyek wisata terkelola baik	75%	76%	1.673.288.400,00	77%	1.832.649.200,00	78%	1.992.010.000,00	79%	2.151.370.800,00	80%	2.310.731.600,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	4	17	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya kemitraan pelaku pariwisata	5%	5%	346.500.000,00	5%	379.500.000,00	5%	412.500.000,00	5%	445.500.000,00	5%	478.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	5		Kelautan dan Perikanan				682.791.480,00		747.819.240,00		812.847.000,00		877.874.760,00		942.902.520,00	
2	5	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya produksi ikan	14%	14%	507.231.480,00	14%	555.539.240,00	14%	603.847.000,00	14%	652.154.760,00	14%	700.462.520,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	5	22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Meningkatnya penerapan teknologi dibidang perikanan	5%	5%	47.880.000,00	5%	52.440.000,00	5%	57.000.000,00	5%	61.560.000,00	5%	66.120.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	5	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan	10%	10%	87.360.000,00	10%	95.680.000,00	10%	104.000.000,00	10%	112.320.000,00	10%	120.640.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	5	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Terpeliharanya jenis ikan diperairan umum	5%	10%	40.320.000,00	15%	44.160.000,00	20%	48.000.000,00	25%	51.840.000,00	30%	55.680.000,00	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2	6		Perdagangan				8.015.273.070,00		8.778.632.410,00		9.541.991.750,00		10.305.351.090,00		11.068.710.430,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2	6	15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan 9 komoditas	75%	76%	85.680.000,00	77%	93.840.000,00	78%	102.000.000,00	79%	110.160.000,00	80%	118.320.000,00	DINAS PER INDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; DINAS PASAR; KECAMATAN NGAGLIK
2	6	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah	5%	5%	446.847.240,00	5%	489.404.120,00	5%	531.961.000,00	5%	574.517.880,00	5%	617.074.760,00	DINAS PER INDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
2	6	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penataan usaha perdagangan	15%	15%	88.200.000,00	15%	96.600.000,00	15%	105.000.000,00	15%	113.400.000,00	15%	121.800.000,00	DINAS PER INDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; DINAS PASAR
2	6	19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Pedagang menempati tempat dasarnya sesuai dengan ijin peruntukannya	50%	52,5%	331.454.760,00	55%	363.021.880,00	57,5%	394.589.000,00	60%	426.156.120,00	65%	457.723.240,00	DINAS PASAR; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab*)		
				Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
															TEMPEL; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN	
2	6	20	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah terpelihara baik	9,6%	10,8%	6.647.172.000,00	13,5%	7.280.236.000,00	16,5%	7.913.300.000,00	32%	8.546.364.000,00	34%	9.179.428.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS PASAR
2	6	21	Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	Kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku	70%	71%	415.919.070,00	72%	455.530.410,00	73%	495.141.750,00	74%	534.753.090,00	75%	574.364.430,00	DINAS PASAR
2	7		Perindustrian				972.552.000,00		1.065.176.000,00		1.157.800.000,00		1.250.424.000,00		1.343.048.000,00	
2	7	15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Presentase peningkatan nilai tambah industri	3%	3%	730.800.000,00	3%	800.400.000,00	3%	870.000.000,00	3%	939.600.000,00	3%	1.009.200.000,00	DINAS PER INDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
2	7	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya asosiasi UMKM	5%	5%	241.752.000,00	5%	264.776.000,00	5%	287.800.000,00	5%	310.824.000,00	5%	333.848.000,00	DINAS PER INDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
2	8		Transmigrasi				202.272.000,00		221.536.000,00		240.800.000,00		260.064.000,00		279.328.000,00	
2	8	17	Program Transmigrasi Regional	Angka transmigrans diberangkatkan	40%	40%	202.272.000,00	40%	221.536.000,00	40%	240.800.000,00	40%	260.064.000,00	40%	279.328.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Pada akhir tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015, terjadi dinamika dalam pencapaian target kinerja daerah, antara lain beberapa indikator telah tercapai jauh melampaui target namun ada pula yang masih jauh dibawah target. Indikator seperti ini dipandang perlu di revisi melalui perubahan RPJMD. Perubahan target dilakukan untuk target tahun 2014 dan 2015, sedangkan target tahun 2013 tidak berubah mengingat telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten Sleman. Dasar penghitungan kembali target indikator kinerja adalah capaian tahun 2011, 2012, dan 2013, sehingga angka capaian pada kondisi kinerja periode kedua RPJMD merupakan capaian tahun 2013. Data capaian diambil dari laporan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana format pada lampiran VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Tabel 9.1

Indikator Kinerja dan Target Kinerja

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1	Indeks Pembangunan Manusia	angka indeks	78,96	78,13	78,63	79,13	79,63	80,00	80,00	Dukungan terhadap pencapaian komponen Visi “Lebih Sejahtera”	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
2	Pendapatan perkapita (ADHB)	Rp.000	16.370	13.635	14.977	16.365	17.938	19.688	19.688	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Persentase peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2	%	0,30	0,25	0,25	0,30	0,30	0,33	1,43	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Badan Kepegawaian Daerah
4	Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	%	81,05	70	75	80	85	90	90	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Badan Kepegawaian Daerah
5	Persentase Kasus pelanggaran disiplin PNS	%	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Badan Kepegawaian Daerah
6	Persentase Tingkat capaian Indikator kinerja utama daerah	%	100,31	100	100	100	100	100	100	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Inspektorat
7	Predikat SAKIP Kabupaten		B	CC	B	B	B	B	B	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Inspektorat

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
8	Persentase OPD yang memiliki SOP	%	100	45	60	75	90	100	100	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
9	Jumlah sarana informasi publik	Sarana	9	9	9	10	10	10	10	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
10	Jenis informasi yang disajikan	Jenis	4	3	3	3	4	4	4	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
11	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	60	80	85	100	100	100	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Sekretariat Daerah (Bagian Humas)
12	Opini BPK	opini	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Inspektorat Kabupaten
13	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	16,33	14,77	15,10	17,20	20	21	21	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Dinas Pendapatan Daerah
14	Persentase kerjasama	%	94,64	50	60	70	95	95	95	Dukungan terhadap	Sekretariat Daerah (Bagian

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	yang aktif									pencapaian misi 1	Tata Pemerintahan)
15	Persentase Penanganan permasalahan pembangunan fisik	%	100	100	100	100	100	100	100	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan)
16	Persentase Penanganan kasus permasalahan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
17	Jumlah Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	orang	3.263	1.990	2.250	2.510	3.543	3.823	14.116	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Jumlah Regulasi penanggulangan bencana	Regulasi	5	3	3	4	6	8	8	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
19	Persentase Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana	%	27,1	10,06	15,06	20,06	27,71	30,06	30,06	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Jumlah Angka kejadian pelanggaran HAM	Kejadian	0	5	5	5	1	1	1	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Kantor Kesatuan Bangsa
21	Persentase Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD	%	88	80	80	80	70	70	70	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22	Persentase KK miskin	%	13,89	19	18	17	13,50	13,40	13,40	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan
23	Persentase penduduk dibawah garis	%	10,40	10,80	10,70	10,40	10,30	10,30	10,30	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	kemiskinan										masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan
24	PDRB per kapita (ADHB, ribu Rp.)	Rp. 000	16.370	12.170	12.786	13,417	17.938	19.688	19.688	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Angka Gini Ratio		0,44	0,30	0,30	0,30	0,44	0,44	0,44	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Fokus Kesejahteraan Mayarakat											
Urusan Pendidikan											
1	Angka melek huruf	%	98,03	92,36	92,46	92,56	98,40	98,50	98,50	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
											Olahraga
2	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,63	10,12	10,12	10,14	10,65	10,71	10,71	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Persentase Rata-rata APK PAUD	%	75,90	75,91	75,92	75,93	75,94	75,95	75,95		
	Persentase Rata-rata APK SD	%	114,77	115,84	115,86	115,88	114,79	114,81	114,81	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Persentase Rata-rata APK SMP	%	108,93	115,88	115,89	115,90	108,95	108,97	108,97	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Persentase Rata-rata APK SMA/K	%	79,00	75,76	75,78	75,80	79,02	79,04	79,04	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
4	Persentase Rata-rata APM SD	%	99,96	99,16	99,17	99,19	99,97	99,98	99,98	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Persentase Rata-rata APM SMP	%	81,24	81,02	81,04	81,06	81,25	81,26	81,26	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Persentase Rata-rata APM SMA/K	%	55,16	53,91	53,93	53,95	55,17	55,18	55,18	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Urusan Kesehatan											
5	Usia harapan hidup	tahun	76,10	74,76	74,76	74,76	76,12	76,14	76,14	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan
6	Angka kematian bayi	Per 1000 KH	4,60	4,08	4,08	4,08	5,22	5,22	5,22	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
7	Angka kematian balita	Per 1000 KH	0,35	<2	<2	<2	2	2	2	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan
8	Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	63,70	≤69,31	≤69,31	≤69,31	≤69,31	≤69,31	≤69,31	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan
9	Persentase Angka kesembuhan penderita TB paru BTA +	%	86,67	82,95	83	85	87	87	87	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan
10	Persentase Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	%	69,47	55	53	52	51	50	50	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan
11	Persentase Prevalensi HIV	%	0,05	< 0,50	< 0,50	< 0,50	0,50	0,50	0,50	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan
12	Persentase balita dengan gizi buruk	%	0,37	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan
13	Persentase balita dengan gizi kurang	%	9	9	9	9	9	9	9	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
Fokus Seni Budaya dan Olahraga											
Urusan Kebudayaan											
1	Persentase Fasilitasi kelompok seni	%	10,64	6,20	7,30	8,40	11,00	11,50	11,50	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Jenis Kelompok kesenian perempuan yang difasilitasi	jenis	4	4	4	4	5	5	5	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Pemuda dan Olahraga											
3	Prestasi olah raga tingkat provinsi	ranking	3	2	2	2	3	3	3	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM											
Fokus Pelayanan Urusan											

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
Wajib											
Urusan Pendidikan											
1	Persentase Kelayakan guru mengajar:									Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	SD	%	75,48	45	50	55	76	76,5	76,5	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	SMP	%	85,89	79	82	85	86,25	87,25	87,25	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	SMA/K	%	91,26	88	90	92	92,20	93,5	93,5	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
2	Jumlah Prestasi siswa akademik	jml. prestasi	15	5	7	9	17	19	19	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Jumlah Prestasi siswa non akademik	jml.siswa yang berprestasi	43	25	27	29	44	45	45	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Urusan Kesehatan											
4	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	%	72,01	49	51	53	72	75	75	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan
5	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum											

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
6	Persentase Proporsi panjang jalan dan jembatan baik - Jalan - Jembatan	%	47,89	32,5	33	33,5	67,91	70,05	70,05	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
7	Persentase Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis	%	66,48	73,5	75	76,5	78	79,5	79,5	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral
8	Persentase Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik	%	50,04	40	42,5	45	52,5	55	55	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah	%	78,91	76,5	77,8	79,4	82,3	82,4	82,4	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
10	Persentase Kelayakan prasarana dan sarana sekolah	%	75,90	73,5	75	76,5	80,5	81	81	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
11	Persentase Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik	%	80	80	80	83	83,5	84	84	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
12	Persentase Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik	%	76,29	64	66	68	76,5	77	77	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Kesehatan
13	Persentase Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik	%	68,32	50	52	54	59,8	65,2	65,2	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Urusan Perumahan											
14	Persentase kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman baik	%	47,93	37	38	39	49	50	50	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
15	Persentase Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93	90,01	91,28	92,20	92,43	93,14	93,14	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Urusan Penataan Ruang											

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
16	Persentase RTH Perkotaan	%	45,2	>30	>30	>30	>30	>30	>30	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan Perencanaan Pembangunan											
17	Persentase Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan	%	131,25	92	93	94	95	96	96	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	Keterwakilan komponen masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/musrenbang	komponen	8	8	8	8	8	8	8	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan Perhubungan											
19	Persentase Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill) dan	%	76	74	75	76	78	79	79	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	penerangan jalan umum pada jalan kabupaten										
Urusan Lingkungan Hidup											
20	Luas lahan kritis	ha	471,1	610	580	550	450	420	420	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
21	Luas lahan rusak akibat penambangan	ha	170	190	180	170	160	150	150	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral
22	Persentase Alih fungsi lahan pertanian	%	0,26	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,20	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
23	Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan	%	100	20	40	60	100	100	100	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Kantor Lingkungan Hidup

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	administratif dan teknis pencegahan pencemaran air										
24	Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	%	100	20	40	60	100	100	100	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Kantor Lingkungan Hidup
25	Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	90	60	70	80	90	100	100	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Kantor Lingkungan Hidup
26	Persentase Usaha yang memiliki IPAL	%	88,46	83	83,5	84	88,5	89	89	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Kantor Lingkungan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
											Hidup
27	Persentase Usaha yang memiliki dokumen lingkungan	%	98,79	98,90	99,00	99,10	99,20	99,30	99,30	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Kantor Lingkungan Hidup
Urusan Pertanian											
28	Persentase Tertib administrasi pertanahan	%	81,04	58	59	60	90	91	91	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
Urusan Kependudukan dan Capil											
29	Persentase Cakupan penerbitan KTP	%	97,79	94	95	96	98	99	99	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
30	Persentase Laju pertumbuhan penduduk	%	1,38	1,69	1,64	1,59	1,33	1,32	1,32	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Badan Perencanaan Pembangunan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
											Daerah
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
31	Indeks Pembangunan Gender	angka indeks	74,98	74,10	74,70	74,80	75,78	75,79	75,79	Dukungan terhadap pencapaian komponen visi misi 5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (100%)	%	96	85	85	85	100	100	100	Dukungan terhadap pencapaian misi 5	Badan Keluarga Berencanaan, Pemberdayaan masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan
33	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50%)	%	100	50	55	60	70	75	75	Dukungan terhadap pencapaian misi 5	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
34	Persentase Lembaga PUG yang aktif	%	75	50	55	60	76	77	77	Dukungan terhadap pencapaian misi 5	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
35	Persentase Pemenuhan hak-hak anak	%	70	74	75	76	77	78	78	Dukungan terhadap pencapaian misi 5	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
36	Persentase Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki	%	97	96,90	97,70	97,78	97,81	97,83	97,83	Dukungan terhadap pencapaian misi 5	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
37	Persentase Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf	%	82	84,76	84,78	84,80	99,50	99,60	99,60	Dukungan terhadap pencapaian misi 5	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
38	Persentase Partisipasi perempuan di eksekutif pemerintah	%	53	54	55	56	57	58	58	Dukungan terhadap pencapaian misi 5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
39	Persentase Keterwakilan perempuan dalam DPRD	%	16	-	-	-	30	30	30	Dukungan terhadap pencapaian misi 5	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
40	Persentase Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja	%	42,14	43,34	44,21	45,05	45,60	45,85	45,85	Dukungan terhadap pencapaian misi 5	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
											Masyarakat / Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
41	Persentase Pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%	14,45	79,10	79,11	79,12	79,13	79,14	79,14	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
42	Persentase Pasangan usia subur sasaran KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	%	9	9	9	9	8	7	7	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
43	Persentase KB pria	%	7,86	5,36	6,86	8,36	7,5	7,6	7,6	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
											Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
44	Persentase KB mandiri	%	68,82	58,21	60	61,81	71	72	72	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
Urusan Sosial											
45	Jumlah lembaga yang berperan dan berpartisipasi dalam menanggulangi PMKS	Lembaga	104	71	72	73	74	75	75	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
46	Jumlah Sumber potensi kesejahteraan sosial									Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
	- Karang Taruna Desa (KTD)	KTD	86	86	86	86	86	86	86		
	- Jumlah Pekerja sosial masyarakat	Orang	542	450	455	460	465	470	470		

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
47	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	%	69,31	45	50	55	60	65	65	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
48	Persentase Cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial	%	94,70	70	71	72	73	74	74	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Usuran Ketenagakerjaan											
49	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	%	6,47	7,19	6,99	6,80	6,25	6,10	6,10	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Usuran Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
50	Jumlah koperasi	koperasi	623	604	617	675	630	638	638	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
51	Jumlah koperasi aktif	koperasi	562	541	554	601	571	580	580	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Perindustrian, Perdagangan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
											dan Koperasi
Urusan Penanaman Modal											
52	Persentase Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	30,52	4,18	4,22	4,27	16,65	18,40	18,40	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal
53	Nilai Investasi PMDN	Rp.000	1.868.199.000	827.390.269	1.083.065.391	1.191.371.929	2.241.839.191	2.802.298.989	2.802.298.989	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal
54	Nilai Investasi PMA	Ribu US\$	2.067.900	1.851.860	2.335.602	2.393.992	2.067.883	2.456.645	2.456.645	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal
55	Nilai Investasi Non PMA/PMDN	Rp.000	3.787.620.000	3.067.297.339	3.489.552.501	3.838.507.751	4.355.763.832	5.009.128.407	5.009.128.407	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Kantor Penanaman,

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
											Penguatan dan Penyertaan Modal
56	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Investasi PMDN	orang	9.782	9.247	9.340	9.443	9.929	10.127	10.127	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
57	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Investasi PMA	orang	7.292	6.230	6.292	6.355	7.474	7.661	7.661	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
58	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Investasi Non PMA/PMDN	orang	266.489	233.463	241.751	250.038	273.764	281.292	281.292	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
59	ICOR		7,37	6,58	6,12	5,66	7,00	6,75	6,75	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal
60	Kebutuhan Investasi	Rp.000	2.550.300 .000	2.396.660.000	2.422.560.000	2.527.340.000	2.569.240.000	2.589.210.000	12.505.100.000	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
Urusan Kebudayaan											
61	Persentase Pelestarian nilai-nilai tradisi	%	54,35	30	35	40	57,00	57,50	57,50	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
62	Persentase Pelestarian warisan budaya	%	10,5	15	20	25	17,50	17,60	17,60	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
63	Persentase Pelestarian cagar budaya	%	10,5	15	20	25	4,90	4,90	4,90	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Pemuda dan Olahraga											
64	Persentase ormas kepemudaan yang aktif	%	85,71	77	80	83	85,75	86	86	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
65	Persentase menurunnya jumlah konflik di masyarakat	%	3,00	3,70	4,45	6,25	7,14	7,14	7,14	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Kantor Kesatuan Bangsa
66	Jumlah kasus suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)	kasus	2	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Kantor Kesatuan Bangsa
67	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg, Pilkada, Pikades, Pilduk	%	78,69	70	70,5	71	78	79	79	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Kantor Kesatuan Bangsa / Sekretariat Daerah
68	Jumlah ormas aktif	Organisasi	68	66	67	67	67	67	67	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Kantor Kesatuan Bangsa
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan											

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
Persandian											
69	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	70	70	75	80	85	90	90	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Satuan Polisi Pamong Praja / Kantor Kesatuan Bangsa
70	Persentase Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	85,71	85,71	85,71	85,71	95	95	95	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
71	Indeks kepuasan masyarakat	Angka indeks	78,65	75	77	79	79	79	79	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
Urusan Ketahanan Pangan											
72	Persentase Ketersediaan energi perkapita	%	132	130	132	135	137	140	140	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Pertanian, Perikanan dan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
											Kehutanan
73	Persentase Ketersediaan protein perkapita	%	133	131	133	136	138	141	141	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
74	Rasio swadaya masyarakat program stimulan gotong royong	Angka rasio	1:1,28	1:7,5	1:7,6	1:7,6	1:4	1:5	1:5	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan)
Urusan Kearsipan											
75	Persentase SKPD yang telah menerapkan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) kategori baik	%	60,42	55	57,5	60	62,5	62,5	62,5	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Kantor Arsip Daerah

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
Urusan Komunikasi dan Informatika											
76	Jumlah SKPD melaksanakan E-Gov	SKPD	48	23	24	25	48	48	48	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Urusan Perpustakaan											
77	Persentase Meningkatnya minat baca masyarakat	%	12,87	27	30	32	10,87	11,16	11,16	Dukungan terhadap pencapaian misi 2	Kantor Perpustakaan Daerah
78	Persentase Meningkatnya pengunjung perpustakaan	%	5,6	2	4	6	8	10	10	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Kantor Perpustakaan Daerah
79	Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan daerah	buku	56,421	28.737	29.037	29.337	56.521	56.661	29.937	Dukungan terhadap pencapaian misi 1	Kantor Perpustakaan Daerah
Fokus Layanan Urusan											

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
Pilihan											
Urusan Pertanian											
1	Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,84	11,87	11,22	10,85	12,52	12,40	12,40	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Urusan Kehutanan											
2	Luas hutan	ha	6.148,9	5.950	6.000	6.050	6.175	6.200	6.200	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral											
3	Jumlah Energi terbarukan terbangun	bh	366	310	320	330	373	380	380	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral
4	Persentase Elektrifikasi	%	99,25	94,50	95,00	95,50	99,30	99,40	99,40	Dukungan terhadap	Dinas Sumber Daya Air Energi

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
										pencapaian misi 4	dan Mineral
Urusan Pariwisata											
5	Jumlah Wisatawan	Orang	3.613.577	3.277.728	3.418.254	3.613.577	3.772.369	3.940.293	18.022.221	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Perdagangan											
6	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB	%	22,41	23,64	24,00	24,30	22,57	22,63	22,63	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Urusan Perindustrian											
7	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	14,55	12,63	12,13	11,74	14,41	14,32	14,32	Dukungan terhadap pencapaian misi 3	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
ASPEK DAYA SAING DAERAH											

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah										
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
8	Persentase Pertumbuhan ekonomi	%	5,69	5,19	5,20	5,24	5,85	5,93	5,93	Dukungan terhadap pencapaian komponen visi "Berdaya Saing"	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Sektor Primer	%	2,02	3,32	3,18	2,71	2,10	2,26	2,26		
	- Sektor Sekunder	%	4,87	4,75	4,98	5,48	5,18	5,27	5,27		
	- Sektor Tersier	%	7,02	6,16	6,23	6,63	7,07	7,09	7,09		
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur										
	Urusan Penataan Ruang										
9	Persentase Tersedianya informasi RTRW serta rencana rincinya	%	88	42,80	76,10	80,23	94	100	89,29	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Badan Perencanaan Pembangunan

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*

NO	ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD (2013)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2015)	KETERANGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	melalui peta analog dan peta digital										Daerah
Urusan Pekerjaan Umum											
10	Persentase Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik	%	34,09	10,8	13,5	16,2	32	34	34	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Urusan Pertanahan											
11	Persentase Tertib pemanfaatan tanah	%	77,5	82	84	86	78	78,5	78,5	Dukungan terhadap pencapaian misi 4	Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah

Tabel 9.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SLEMAN

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks Pembangunan Manusia	angka indeks	78,13	78,63	79,13	79,63	80,00
2.	Pendapatan perkapita (ADHB)	Rp.000	13.635	14.977	16.365	17.938	19.688
3.	Persentase Kasus pelanggaran disiplin PNS	%	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
4.	Persentase Tingkat capaian Indikator kinerja utama daerah	%	90	90	90	100	100
5.	Opini BPK	opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Predikat SAKIP Kabupaten	predikat	CC	B	B	B	B
7.	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	14,77	15,10	17,20	20	21
8.	Jumlah Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	orang	1.990	2.250	2.510	3.543	3.823
9.	Persentase produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD	%	80	80	80	70	70

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
10.	Persentase KK miskin	%	19	18	17	13,50	13,40
11.	Angka Gini Ratio		0,30	0,30	0,44	0,44	0,44
12.	Persentase Angka melek huruf	%	92,36	92,46	92,56	98,40	98,50
13.	Usia harapan hidup	tahun	74,76	74,76	74,76	76,12	76,14
14.	Persentase balita dengan gizi buruk	%	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50
15.	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100
16.	Persentase Proporsi panjang jalan dan jembatan baik -jalan -jembatan	%	32,5	33	33,5	67,91	70,05
17.	Persentase Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis	%	73,5	75	76,5	78	79,5
18.	Persentase Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	90,01	91,28	92,2	92,43	93,14
19.	Persentase Cakupan penerbitan KTP	%	94	95	96	98	99

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
			2011	2012	2013	2014	2015
20.	Indeks Pembangunan Gender	angka indeks	74,10	74,70	74,80	75,78	75,79
21.	Persentase Cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial	%	70	71	72	73	74
22.	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	%	7,19	6,99	6,80	6,25	6,10
23.	Indeks kepuasan masyarakat	Angka indeks	75	77	79	79	79
24.	Persentase Pertumbuhan ekonomi	%	5,19	5,20	5,24	5,85	5,93
25.	Persentase tersedianya informasi RTRW serta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	42,80	76,10	80,23	84,36	89,29

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

10.1 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati Sleman untuk masa bakti 2010-2015, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

10.2 KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Bupati Sleman untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Sleman masa bakti periode 2011-2015 serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025.

RPJMD Tahun 2011-2015 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman setiap tahunnya.

Misi Kabupaten Sleman menjadi acuan bagi semua SKPD dalam menjalankan program dan kegiatannya dan misi tersebut sekaligus sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun (2011-2015) yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan pemberdayaan perempuan.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2015, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sleman dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;

- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sleman dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Sleman;
- (3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya;
- (4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015;
- (5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2011-2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015;
- (6) Penyusunan RKPD Kabupaten Sleman harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
- (7) RKPD Kabupaten Sleman harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- (8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Sleman merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- (9) Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- (10) Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015, setiap SKPD perlu mengupayakan pengaturan peran stakeholders dalam mendukung

- pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, instansi terkait maupun masyarakat luas;
- (11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015, sebagai berikut:
- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (12) Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

- (13) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sleman dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO